



**FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**
Sekretariat : MPR / DPR-RI, Nusantara I, Lantai VII, Ruang 725, Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta 10270
 (021) 575 6187, 575 6189, 575 6363, Fax: 575 6188



**PANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA ATAS
RACANGAN UNDANG -UNDANG TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN
ANGGARAN 2022 BESERTA NOTA KEUANGANNYA**

Dibacakan Oleh : MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T.
No. Anggota : A-261

Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Salam sejahtera bagi kita sekalian

Om Swastiastu

Namo Budhaya

Salam Kebajikan

M E R D E K A !!!

Yang terhormat Pimpinan Sidang,

**Yang terhormat Saudari Menteri Keuangan yang mewakili
Pemerintah beserta jajarannya,**

**Rekan-rekan Anggota Dewan, rekan media dan hadirin sekalian
yang kami muliakan,**

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat limpahan rahmat dan anugerah serta bimbingan-Nya kita dapat hadir untuk melaksanakan tugas konstitusional kita dalam Rapat Paripurna ini, dengan agenda penyampaian pandangan Fraksi-Fraksi atas Rancangan Undang-

Undang tentang Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2022 (RUU APBN TA 2022) beserta dengan Nota Keuangannya.

Masih dalam suasana peringatan hari kemerdekaan RI kami segenap Pimpinan dan Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengucapkan Dirgahayu Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ke-76.

Yang Terhormat Pimpinan dan Anggota Sidang, serta hadirin yang dimulikan

Saat ini kita masih berada pada situasi Pandemi COVID-19 yang telah mengakibatkan perubahan kondisi yang luar biasa dan telah berdampak sangat signifikan dalam segala bidang kehidupan yaitu kesehatan, sosial, budaya, ekonomi, bahkan kegiatan bersama keagamaan. Pemulihan sosial dan ekonomi nasional sedang berlangsung, dan Rancangan APBN tahun Anggaran 2022, akan sangat ditentukan oleh efektivitas penanganan Pandemi Covid-19, pemulihan sosial dan ekonomi yang sedang dijalankan di Tahun 2021 ini. APBN 2022 juga agar dipersiapkan untuk dapat mengantisipasi ketidakpastian perkembangan Pandemi Covid-19 yang masih tinggi pada tahun 2022.

APBN disusun sebagai instrumen untuk menyelenggarakan pemerintahan negara mewujudkan tujuan bernegara. Dalam situasi Pandemi Covid-19, alokasi Program dan Anggaran di dalam APBN, selain diarahkan untuk penanganan Pandemi Covid-19 juga diarahkan untuk dapat menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan nasional.

Kapasitas Rancangan APBN sangat ditentukan oleh perkiraan pertumbuhan ekonomi, khususnya dalam memperkirakan pendapatan negara. Pertumbuhan ekonomi terjadi apabila terdapat peningkatan produksi barang dan jasa untuk memenuhi permintaan konsumsi. Dengan meningkatnya produksi tersebut diharapkan juga akan meningkatkan pendapatan masyarakat. Inilah tantangan yang harus kita hadapi bersama, yaitu bagaimana produksi barang dan jasa dapat berlangsung di tengah situasi Pandemi Covid-19?

Oleh karena itu, kebijakan fiskal pada tahun 2022 agar dapat diarahkan untuk memprioritaskan penanganan sektor kesehatan sebagai kunci keberhasilan pemulihan ekonomi, memperkuat dan menjaga daya beli masyarakat, serta pemulihan UMKM dan dunia usaha.

Tema kebijakan fiskal tahun 2022 adalah "Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural". Pemerintah memproyeksikan kinerja perekonomian tahun 2022 berada dalam pertumbuhan ekonomi yang berkisar pada 5,0% - 5,5%.

Dengan asumsi ini, Pemerintah agar memberikan perhatian kebijakan-kebijakan sebagai berikut:

- Konsumsi domestik sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional; Oleh karena itu Pemerintah agar memperkuat sektor-sektor lapangan usaha, yang mulai pulih, untuk dapat meningkatkan nilai tambah perekonomian khususnya penghasilan kepada masyarakat. Program perlindungan sosial tetap dilaksanakan untuk memperkuat daya beli dan kualitas kehidupan rakyat yang tidak mampu.
- Belanja pemerintah, selain untuk penanganan pemulihan sosial-ekonomi, melanjutkan pembangunan nasional, juga dapat memperkuat nilai tambah perekonomian pada sektor-sektor lapangan usaha; seperti

pertanian, perikanan, real estate, perdagangan, industri, jasa dsb; sehingga dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional.

- Kebijakan investasi dalam pelaksanaan proyek-proyek prioritas yang dapat meningkatkan impor bahan baku dan barang modal, agar memperhatikan risiko defisit neraca transaksi berjalan, dan perlu di imbangi dengan kebijakan pemenuhan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) di dalam proyek-proyek prioritas tersebut.
- Nilai tukar rupiah, pada tahun 2022, diasumsikan pada Rp 14.350 per USD. Pemerintah dan otoritas moneter agar dapat menjaga stabilitas nilai rupiah yang berkelanjutan sesuai dengan nilai fundamentalnya.
- Dalam menghadapi *outlook* harga minyak yang masih rendah pada tahun 2022, Kebijakan Pemerintah diarahkan untuk melakukan optimalisasi produksi minyak, serta kebijakan di sektor hulu minyak dan gas untuk tetap berproduksi sesuai potensinya, dan percepatan penyelesaian kilang minyak untuk memperkuat ketahanan energi nasional.

Pemerintah juga telah menetapkan dalam RAPBN Tahun 2022, NTP dan NTN berada pada kisaran 102-104 dan 102-105. Fraksi PDI Perjuangan berpendapat Pemerintah masih dapat meningkatkan angka NTP dan NTN untuk meningkatkan produktivitas serta kesejahteraan para petani dan nelayan sebagai bagian dalam membangun kedaulatan pangan Indonesia.

Yang Terhormat Pimpinan dan Anggota Sidang, serta hadirin yang dimuliakan

Dalam kondisi APBN yang mengalami penurunan pendapatan negara, meningkatnya belanja untuk penanganan Pandemi, dan melebarinya pembiayaan defisit, maka Pemerintah agar dapat mengoptimalkan

pendapatan negara, inovasi pembiayaan, serta merasionalisasi belanja negara yang memenuhi kualitas *spending better*.

Optimalisasi pendapatan negara melalui perpajakan agar dilakukan sejalan dengan pemulihan ekonomi nasional, serta pemberian insentif fiskal yang lebih terarah dan terukur untuk kegiatan ekonomi strategis dan memiliki *multiplier effect* yang kuat.

Rasionalisasi Belanja Negara yang memiliki kualitas *spending better*, ditandai dengan belanja yang efisien, produktif, menghasilkan *multiplier effect* perekonomian, dan efektif dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pemerintah agar menjalankan kebijakan kualitas belanja *spending better* tersebut secara konsisten dan disiplin untuk semua Kementerian dan Lembaga.

Pemerintah juga agar konsisten dalam menjaga kebijakan Belanja Pemerintah Pusat di Kementerian-Lembaga untuk diarahkan pada: Reformasi SDM, Reformasi Birokrasi, Efisiensi, Infrastruktur Pelayanan Dasar, Subsidi Tepat Sasaran, dukungan Pembangunan Infrastruktur Daerah, dan antisipasi/mitigasi bencana.

Dalam mengelola Pembiayaan Defisit, Pemerintah agar penuh dengan kehati-hatian dalam menjaga rasio utang dalam batas aman dan sesuai dengan Undang-Undang, meningkatkan efisiensi biaya utang, serta menjaga komposisi portofolio utang yang optimal dalam menjaga stabilitas perekonomian serta memperhatikan kapasitas fiskal APBN untuk masa yang akan datang.

Pengalaman dalam menjalankan APBN Tahun Anggaran 2021, yang harus merespon penanganan dan ketidakpastian perkembangan Pandemi Covid-19, dan mengakibatkan Pemerintah melakukan berbagai *refocusing* program dan anggaran, agar dapat diantisipasi pada APBN Tahun Anggaran 2022 yang akan datang. Sehingga Pemerintah dapat tetap efektif dalam menjalankan tugas Pemerintahan lainnya, selain fokus dalam penanganan Pandemi Covid-19.

Agenda pemerintah pada tahun 2022 untuk mempercepat reformasi belanja pemerintah yang berkualitas, mengoptimalkan peningkatan pendapatan negara dari sumber-sumber baru yang sejalan dengan pemulihan ekonomi, serta inovasi pembiayaan melalui penguatan peran LPI (Lembaga Pengelola Investasi) dan KPBU, agar dapat berjalan dengan efektif sehingga memberikan landasan dalam mencapai konsolidasi fiskal yang optimal pada tahun 2023.

Yang Terhormat Pimpinan dan Anggota Sidang, serta hadirin yang dimuliakan

Berdasarkan pandangan, pendapat, serta masukan pemikiran tersebut di atas, maka Fraksi PDI Perjuangan menyatakan dapat menyetujui untuk melanjutkan pembahasan dengan Pemerintah terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022. Pandangan dan pendapat yang telah kami sampaikan agar dapat menyempurnakan RAPBN 2022, sehingga APBN Tahun Anggaran 2022 dapat mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Demikianlah pandangan umum Fraksi PDI Perjuangan terkait Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 atas segala perhatian Sidang Dewan yang terhormat kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'aliakum warahmatullahi

Wabarakatuh Om shanti shanti shanti om

MERDEKA !!!

Jakarta, 19 Agustus 2021

PIMPINAN FRAKSI
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Ketua,

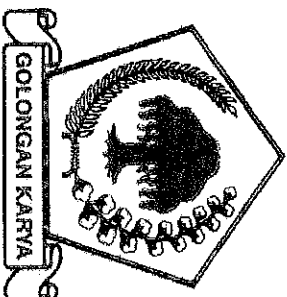


UTUT ADIANTO
Nomor Anggota A-194

Sekretaris, -



BAMBANG WURYANTO
Nomor Anggota A-184



FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA DPR RI

PANDANGAN UMUM

**FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
ATAS**

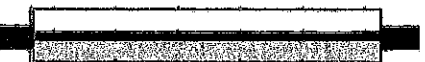
**RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2022 BESERTA NOTA KEUANGANNYA**

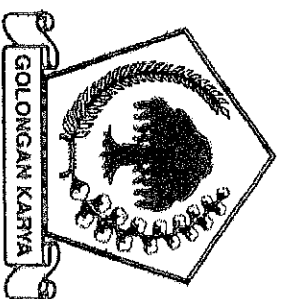
Dibacakan Oleh : H. Agung Widyantoro, S.H., M.Si.

Anggota DPR RI Nomor : A-310

Daerah Pemilihan : Jawa Tengah IX



JAKARTA, 19 AGUSTUS 2021



PANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
ATAS
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2022 BESERTA NOTA KEUANGANNYA

Dibacakan Oleh : H. Agung Widyantoro, S.H., M.Si.
Anggota DPR RI Nomor : A-310
Daerah Pemilihan : Jawa Tengah IX

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera untuk kita semua,

Yang Terhormat, Pimpinan Sidang Paripurna DPR RI,
Yang Terhormat, Menteri Keuangan beserta jajarannya,
dan hadirin yang Kami hormati,

Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankanlah kami mengajak hadirin sekalian untuk memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat mengikuti rapat panjuma hari ini, dalam rangka penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPR RI terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 beserta Nota Keuangannya dalam keadaan sehat wal 'aifat. Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankanlah kami Fraksi Partai GOLKAR mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-76. Dalam momentum peringatan kemerdekaan ini, marilah kita kembali memperbaiki semangat pengabdian kita dalam mewujudkan Indonesia yang semakin maju, sejahtera, adil dan makmur.

Pimpinan Sidang, dan Hadirin yang Kami hormati,

Tahun 2022 yang akan datang merupakan tahun yang penuh pengharapan bagi umat manusia, tak hanya di Indonesia tapi juga di seluruh dunia. Pandemi Covid-19 yang telah berlangsung lebih dari satu tahun lamanya ini telah mengugut lebih dari 4 juta jiwa di mana jumlahnya diperkirakan masih terus bertambah. Tak ada satu pihak pun yang dapat memprediksi kapan wabah ini akan berakhir. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) bahkan telah memberikan peringatan akan potensi munculnya varian-varian baru dari virus SARS-CoV-2 ini. Kita semua hanya bisa berharap bahwa masyarakat dan otoritas negara-negara di dunia dapat semakin bahu-membahu melewati badai ini bersama-sama. Sehingga, pada tahun 2022 yang akan datang, kita semua telah terbebas dari jeratan pandemi. Jika pun tidak, kita akan semakin siap menghadapi segala kemungkinan-kemungkinan yang ada.

Di tengah ancaman pandemi yang datang dengan gelombang-gelombang baru, penyusunan APBN 2022 tentu menghadapi kompleksitas serta tantangan yang tidak mudah. Dari sisi internal, APBN 2022 merupakan periode terakhir penerapan UU Nomor 2 tahun 2020 yang memungkinkan Pemerintah melakukan langkah-langkah *extraordinary* dalam rangka penanganan pandemi. Sebagai periode penerapan terakhir, di satu sisi APBN 2022 harus bersifat konsolidatif menuju normal, namun di sisi lain masih perlu melakukan ekspansi untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19 beserta dampak-dampaknya yang diperkirakan masih terus berlangsung. Dari sisi eksternal, APBN 2022 menghadapi ketidakpastian yang tinggi dari pemulihan perekonomian global, volatilitas harga komoditas, serta risiko terjadinya *capital outflow* akibat normalisasi kebijakan The Fed di Amerika Serikat.

Pimpinan Sidang, dan Hadirin yang Kami hormati,

Penyusunan APBN 2022 sangat bergantung pada pencapaian dan kinerja APBN 2021 tahun ini, Kita patut bersyukur bahwa pada kuartal II tahun ini, pertumbuhan ekonomi telah mencatatkan torehan positif pada level 7,07%. Capaian ini secara resmi telah membawa Indonesia keluar dari resesi ekonomi setelah pada empat kuartal sebelumnya mengalami kontraksi yang cukup dalam. Dalam hal ini, Fraksi Partai GOLKAR menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada jajaran pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin karena mampu menghadirkan momentum kebangkitan di tengah pandemi yang masih berlangsung.

Merebaknya kembali Covid-19 melalui varian Delta pada akhir kuartal II diperkirakan akan kembali menekan pertumbuhan ekonomi pada kuartal III dan IV tahun 2021 ini. Namun demikian, berdasarkan indikator-indikator yang ada, dampak dari varian Delta tersebut diyakini tidak sampai membawa Indonesia kembali ke jurang resesi ekonomi. Keyakinan tersebut juga didasarkan pada strategi dalam program Penanganan Pandemi dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC PEN) yang diambil Pemerintah sejauh ini. Capaian pada kuartal II 2021 menunjukkan bahwa strategi tersebut

telah berjalan efektif di mana pemulihan ekonomi telah berada pada jalur yang tepat. Hal ini dapat menjadi pondasi bagi optimisme kita dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang optimal pada tahun 2021 ini.

Selain itu, Fraksi Partai GOLKAR ingin mengingatkan bahwa pandemi tidak boleh melalaikan kita dari agenda yang tak kalah pentingnya, yaitu reformasi struktural demi menciptakan pondasi yang lebih kokoh bagi kebangkitan pembangunan pasca pandemi. Namun demikian, reformasi struktural yang telah tertuang dalam sejumlah RUU pada Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioñas tersebut harus dilakukan dengan seksama dan penuh kehati-hatian agar tidak kontraproduktif dengan cita-cita para pendiri bangsa. Pandemi tidak boleh menghalangi kita memandang jauh ke depan demi mewujudkan Visi Indonesia Maju 2045.

Pimpinan Sidang, dan Hadirin yang Kami hormati,

Setelah mencemati Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 beserta Nota Keuangannya, Fraksi Partai GOLKAR berpandangan sebagai berikut:

A. Dari sisi indikator ekonomi makro:

1. Fraksi Partai GOLKAR mengapresiasi langkah Pemerintah mengusulkan target pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5% – 5,5%. Dengan kinerja perekonomian pada tahun 2021 masih terganggu oleh meringketnya eskalasi pandemi, Fraksi Partai GOLKAR memandang target pertumbuhan pada 2022 tersebut sangat realistis, bahkan berpotensi mencapai batas atasnya. Namun demikian, upaya pencapaian target tersebut perlu menekankan pada pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, inklusif, serta berkesinambungan. Sehingga, pertumbuhan ekonomi dapat dinikmati dan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
2. Pemerintah menetapkan asumsi laju inflasi pada level 3%. Fraksi Partai GOLKAR menilai, target inflasi tersebut tergolong realistis, namun membutuhkan kerja keras serta kerja sama yang erat antar lembaga dalam pencapaiannya. Pemerintah perlu memastikan bahwa tercapainya target inflasi tidak didorong oleh kenaikan biaya pada sektor produksi, melainkan ditarik oleh kenaikan pada sisi permintaan. Oleh karenanya, dibutuhkan suatu strategi yang komprehensif untuk menjaga daya beli masyarakat serta memulihkan kembali konsumsi rumah tangga sebagai kontributor utama produk domestik bruto (PDB). Dalam hal ini, Fraksi Partai GOLKAR meminta penjelasan lebih rinci dari Pemerintah terkait langkah-langkah pencapaian target inflasi tersebut.
3. Fraksi Partai GOLKAR mengahrgai optimisme Pemerintah menetapkan asumsi nilai tukar rupiah pada level Rp 14.350 per dolar AS. Pada tahun 2022 yang akan datang terdapat tantangan eksternal yang signifikan berupa normalisasi kebijakan moneter di Amerika Serikat serta negara-negara ekonomi utama lainnya. Hal ini dapat memberikan tekanan yang

Iuar biasa pada kurs rupiah. Fraksi Partai GOLKAR memahami bahwa Pemerintah bersama Bank Indonesia telah melakukan langkah-langkah antisipatif antara lain melalui skema perdagangan menggunakan mata uang lokal dengan negara-negara mitra dagang. Namun demikian, Fraksi Partai GOLKAR mengharapakan penjelasan yang lebih komprehensif terkait perkembangan pasar keuangan global beserta langkah-langkah antisipasi lainnya.

4. Suku bunga SUN 10 Tahun ditargetkan pada level 6,82%. Potensi terjadinya *taper tantrum* pada tahun 2022 yang akan datang menghadirkan risiko kenaikan *yield* obligasi Pemerintah di atas target. Hal tersebut dikawatirkan akan menekan penyaluran kredit perbankan sehingga menghambat akselerasi pemulihan ekonomi nasional. Dalam hal ini, Fraksi Partai GOLKAR meminta Pemerintah bersama *stakeholder* lainnya pada Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk melakukan terobosan-terobosan guna memerangi fenomena *crowding out* serta menghindari terjadinya *credit crunch* yang berkepanjangan.

B. Dari sisi postur makro fiskal:

1. Belanja negara diusulkan sebesar Rp 2.708,7 triliun atau lebih rendah dari pagu 2021 sebesar Rp 2.750 triliun. Fraksi Partai GOLKAR menilai, menurunnya anggaran belanja negara pada 2022 sudah sesuai dengan agenda konsolidasi fiskal menuju normal pada 2023. Penurunan anggaran belanja ini diharapkan tidak melemahkan upaya penanganan pandemi beserta dampak-dampaknya yang diperkirakan masih berlangsung pada tahun depan. Oleh karenanya, Pemerintah perlu meningkatkan kualitas belanja APBN melalui program-program yang efektif, efisien, dan tepat sasaran.

2. Fraksi Partai GOLKAR mengapresiasi langkah Pemerintah menaikkan target pendapatan negara dari Rp 1.743,6 triliun pada 2021 menjadi Rp 1.840,7 triliun pada 2022. Kenaikan target pendapatan ini juga telah sesuai dengan agenda konsolidasi fiskal guna mengurangi *gap* antara penerimaan dan pengeluaran. Dalam hal ini, Fraksi Partai GOLKAR mengingatkan Pemerintah bahwasanya kebijakan reformasi perpajakan baik berupa intensifikasi maupun ekstensifikasi pajak perlu dilakukan dengan seksama dan mempertimbangkan *firming* yang tepat agar tidak kontraproduktif dengan upaya pemulihan ekonomi nasional.

3. Defisit anggaran diperkirakan mencapai Rp 868 triliun atau setara 4,85% PDB. Jika dibandingkan dengan tahun pertama penerapan UU Nomor 2 Tahun 2020, besaran defisit anggaran terus menurun. Hal ini mencerminkan komitmen Pemerintah dalam menyelenggarakan pengelolaan fiskal yang *prudent* dan *sustainable* di tengah tekanan pandemi yang berdampak multidimensi. Di sisi lain, Fraksi Partai GOLKAR juga mengapresiasi angka defisit keseimbangan primer yang terus menurun diperkirakan sebesar Rp 462,2 triliun pada 2022 yang akan datang.

Pimpinan Sidang, dan Hadirin yang Kami hormati,

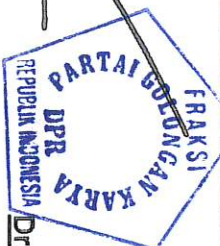
Berdasarkan beberapa pokok pikiran yang sudah kami sampaikan tersebut, Fraksi Partai GOLKAR menyatakan “menyetujui Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 beserta Nota Keuangannya untuk dibahas lebih lanjut.” Demikian Pandangan Fraksi Partai GOLKAR, semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa meridhoi kita semua dalam menunaikan tugas pengabdian kepada bangsa dan negara.

Wabillahaufiq Walhidayah.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, 19 Agustus 2021

PIMPINAN FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA




H. Kahar Muzakir

Ketua


Dr. Ir. H. Adies Kadir, S.H., M.Hum.

Sekretaris



FRAKSI PARTAI GERINDRA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Sekretariat : MPR/DPR-RI Nusanantara I Lantai 2/108 - 2/109, Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270

Telp. (021) 5755624, 5755627, 5755628 Fax. (021) 5755623



PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA DPR RI ATAS RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2022 BESERTA NOTA KEUANGANNYA

Disampaikan oleh : Wihadi Wiyanto, SH
Nomor Anggota : 114
Daerah Pemilihan : Jatim IX

*Bismillahirrahmaanirrahim,
Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua,
Om Swastyastu
Namo Buddhaya
Salam Kebajikan*

*Yang terhormat:
Pimpinan Rapat Paripurna dan Anggota DPR RI;
Menteri Keuangan Republik Indonesia selaku wakil Pemerintah;
serta para hadirin yang berbahagia.*

Pertama-tama, perkenalkan kami mengajak hadirin sekalian untuk senantiasa memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT., Tuhan Yang Maha Pengasih, yang telah memberikan anugerah kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Kita bersyukur bersama seluruh rakyat Indonesia di seluruh penjuru Tanah Air, dapat memperhatikan dan merayakan 76 tahun Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Fraksi Partai Gerindra DPR RI mengucapkan “Selamat Ulang Tahun ke-76 Republik Indonesia, Dirgahayu Republik Indonesia”.

Selanjutnya, kita telah bersama sama mendengarkan apa yang disampaikan Pemerintah tentang Nota Keuangan beserta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (R-APBN) Tahun Anggaran 2022. Bahwa Pemerintah menetapkan “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural” sebagai tema kebijakan fiskal tahun 2022, melanjutkan kebijakan fiskal yang berjalan pada tahun 2021 ini, yaitu “Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi”.

Sebelum menanggapi hal tersebut, Fraksi Partai Gerindra DPR RI menegaskan bahwa kebijakan ekonomi seyogyanya diarahkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, berkeadilan dan berkeadilan. Dalam mencapai sasaran tersebut, pembangunan ekonomi harus mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat, dalam arti (1) meningkatkan pendapatan; (2) mengurangi kemiskinan; (3) mengurangi kesenjangan,



FRAKSI PARTAI GERINDRA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Sekretariat : MPR/DPR-RI Nusanegara I Lantai 2108 - 2109, Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270
Telp. (021) 5755624, 5755627, 5755628 Fax. (021) 5755623



dan (4) meningkatkan kesempatan kerja, serta (5) mampu meningkatkan ketahanan ekonomi nasional.

Hal tersebut semakin penting untuk diperhatikan, mengingat dampak pandemi Covid-19 yang dirasakan masyarakat sejak awal tahun 2020 masih berlanjut hingga saat ini dan menyebabkan turunnya kesejahteraan masyarakat. Penurunan kesejahteraan masyarakat yang dimaksud antara lain tercermin dari menurunnya pengeluaran konsumsi rumah tangga, meningkatnya jumlah pengangguran, hingga meningkatnya jumlah penduduk miskin.

Telah pula kita sepakati bersama Perppu Nomor 1 Tahun 2020, yang kemudian disahkan menjadi UU Nomor 2 tahun 2020, sebagai langkah dalam menyikapi perlambatan laju pertumbuhan ekonomi nasional, penurunan penerimaan negara, serta peningkatan belanja negara dan pembiayaan. UU ini memberi alas langkah strategis dalam menangani pandemi Covid-19 di satu sisi dan di sisi lain memulihkan ekonomi nasional, yaitu pelebaran defisit APBN melebihi 3 persen dari PDB sampai tahun 2022. Sejak awal Pemerintah menyadari bahwa pemulihan ekonomi nasional bergantung pada keberhasilan penanganan pandemi Covid-19 secara menyeluruh dan totalitas dari hulu ke hilir serta terukur dan berkesinambungan program satu dengan yang lainnya.

Yang terhormat Saudara Pimpinan dan Anggota DPR RI, Wakil Pemerintah, dan hadirin yang berbahagia,

Pemerintah telah menyampaikan enam fokus utama kebijakan APBN 2022: *Pertama*, melanjutkan upaya pengendalian Covid-19 dengan tetap memprioritaskan sektor kesehatan. *Kedua*, menjaga keberlanjutan program perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan. *Ketiga*, memperkuat agenda peningkatan Sumber Daya Manusia yang unggul, berintegritas, dan berdaya saing. *Keempat*, melanjutkan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kemampuan adaptasi teknologi. *Kelima*, penguatan desentralisasi fiskal untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan antar daerah. Dan *keenam*, melanjutkan reformasi penganggaran dengan menerapkan *zero based budgeting* untuk mendorong agar belanja lebih efisien, memperkuat sinergi pusat dan daerah, fokus terhadap program prioritas dan berbasis hasil, serta antisipatif terhadap kondisi ketidakpastian.

Dengan memperhitungkan berbagai dinamika, akselerasi pemulihan ekonomi, reformasi struktural, dan reformasi fiskal, Pemerintah mengusulkan asumsi ekonomi makro untuk penyusunan R-APBN 2022. Antara lain, pertumbuhan ekonomi diusulkan sebesar 5,0 - 5,5 persen. Asumsi ini lebih rendah dari kesepakatan Pemerintah dan DPR pada Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) R-APBN 2022, sebesar 5,2 - 5,8 persen. Penurunan target pertumbuhan ekonomi dari rentang 5,2 - 5,8 persen menjadi 5,0 - 5,5 persen di satu sisi bisa dimaklumi karena kondisi yang dihadapi masih penuh ketidakpastian yang tinggi. Namun di sisi lain, proyeksi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,0 – 5,5 persen memberi kesan Pemerintah



FRAKSI PARTAI GERINDRA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Sekretariat : MPR/DPR-RI Nusanatara I Lantai 2/08 - 2/109, Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270

Telp. (021) 5755624, 5755627, 5755628 Fax. (021) 5755623



memaksakan pertumbuhan ekonomi yang harus lebih dari 5 persen, target tersebut rasanya terlalu optimis.

Mengacu pada capaian pertumbuhan ekonomi sebelum pandemi Covid-19 yang tidak mencapai target, dan pertumbuhan ekonomi minus 2,07 persen pada tahun 2020, Fraksi Partai Gerindra DPR RI mengingatkan Pemerintah bahwa mematok asumsi pertumbuhan yang terlalu tinggi, jika realisasinya tidak sesuai target perencanaan, bakal berdampak pada penurunan pendapatan negara dan belanja negara di satu sisi, dan di sisi lain meningkatkan defisit anggaran. Tahun anggaran 2022 adalah tahun terakhir pelebaran defisit anggaran melebihi 3%, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2020. UU ini juga mengamatkan agar dilakukan penurunan defisit anggaran secara bertahap, sebelum kembali ke paling tinggi 3% pada tahun 2023.

Realisasi APBN tahun 2020 mencatat defisit APBN sebesar 6,14 persen dan outlook APBN 2021 sebesar 5,82 persen, maka dalam R-APBN TA 2022 Pemerintah mengusulkan defisit sebesar 4,85 persen dari PDB. Angka defisit anggaran ini masih cukup tinggi. Oleh karena itu yang lebih realistis, **Fraksi Partai Gerinda DPR RI menyarankan lebih diturunkan lagi, hingga kisaran 4,0 persen sampai 4,5 persen.**

Yang terhormat Saudara Pimpinan dan Anggota DPR RI, Wakil Pemerintah, dan hadirin yang berbahagia,

Nota Keuangan menjelaskan empat pokok kebijakan fiskal dan arah kebijakan belanja negara. Empat pokok kebijakan fiskal RAPBN 2022 adalah: (1) Pemantapan pemulihan ekonomi dengan tetap memprioritaskan penanganan sektor kesehatan; (2) Program perlindungan sosial yang memperkuat fondasi kesejahteraan sosial, meningkatkan kemiskinan dan kerentanan; (3) Mendukung peningkatan daya saing dan produktivitas dengan implementasi reformasi struktural dan reformasi fiskal; (4) Optimalisasi pendapatan dan penguatan *spending better*.

Akan tetapi, Fraksi Partai Gerindra DPR RI mencermati atas rincian postur belanja negara mengindikasikan banyak hal yang tidak sesuai dengan pokok kebijakan fiskal yang diusung. Sekaligus kurang mendukung arah kebijakan belanja negara tersebut.

Belanja negara terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar Rp1.938,27 triliun, dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp770,41 triliun. Dibandingkan outlook APBN 2021, BPP naik sebesar 0,58%, sedangkan TKDD relatif setara atau hanya naik 0,02%.

Alokasi TKDD yang tidak mengalami kenaikan tampak tidak mendukung penyebutannya sebagai salah satu arah kebijakan belanja. Bahkan, terjadi penurunan dalam alokasi Dana Desa. Alokasi APBN 2021 sebesar Rp72 triliun dan outlook realisasinya mencapai Rp71,87 triliun. Dalam R-APBN 2022 turun menjadi Rp68 triliun atau turun 5,4% dari outlook 2021.



FRAKSI PARTAI GERINDRA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Sekretariat : MPR/DPR-RI Nusanitara I Lantai 2/108 - 2/109, Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270
Telp. (021) 5755624, 5755627, 5755628 Fax. (021) 5755623



Padahal, Nota Keuangan RAPBN 2022 mengedepankan keberhasilan kebijakan penggunaan Dana Desa pada tahun 2020. Ketika itu difokuskan untuk kegiatan penanganan pandemi Covid-19 dan bantuan sosial berupa BLT Desa. Hal itu dinilai berdampak positif dalam menahan kenaikan tingkat kemiskinan dengan menjaga tingkat konsumsi kelompok termiskin.

Fraksi Partai Gerindra DPR RI juga menyroti tiga pos anggaran yang mengalami penurunan signifikan dari *outlook* APBN 2021. Fungsi ekonomi dialokasikan sebesar Rp402,36 triliun, turun 12,5% dari Rp459,6 triliun. Fungsi kesehatan sebesar Rp141 triliun atau turun 22,9% dari Rp182,8 triliun. Fungsi perlindungan sosial sebesar Rp252,26 triliun atau turun 10,1% dari Rp280,6 triliun.

Yang terhormat Saudara Pimpinan dan Anggota DPR RI, Wakil Pemerintah, dan hadirin yang berbahagia,

Fraksi Partai Gerindra DPR RI menyroti rasio utang Pemerintah, yang proyekasinya dalam KEM-PPKF 2022 berada pada kisaran 43,76 - 44,28 persen dari PDB. Ini berarti naik signifikan dari asumsi rasio utang tahun 2021 sebesar 41 persen. Perlu diingat pula bahwa pada akhir 2020, utang pemerintah telah mencapai Rp 6.080 triliun atau mendekati 40 persen dari PDB. Jauh di atas rasio utang 2019 sebesar 31% dan kondisi akhir 2014 sebesar 24 persen dari PDB.

Meski rasio posisi utang atas PDB Indonesia itu diklaim masih aman, bagaimanapun Pemerintah harus mewaspadai dan menjaga agar struktur ULN tetap sehat. Bank Indonesia dan Pemerintah perlu terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolannya. Pemantauan ULN juga harus terus dioptimalkan menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pemulihan ekonomi nasional, dengan meminimalisasi risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian.

Perlu selalu diingat bahwa masalah utang pemerintah bukan hanya pada posisi dan rasio utang. Melainkan, terutama pada bertambahnya beban pembayaran utang, yaitu pelunasan pokok utang dan pembayaran bunga utang. Kemampuan membayar beban utang ini amat bergantung pada besarnya penerimaan negara. Nyatanya, beban pembayaran bunga utang terus meningkat dari tahun ke tahun: 14,1 persen pada 2019; 20 persen pada 2020 dan 21,10 persen pada 2021.

Data *Fiscal monitor* edisi April 2021 dari IMF menyebut penerimaan negara berkembang dan berpendapatan menengah pada tahun 2020 mencapai 25,21 persen dari PDB. Sementara itu, rasio penerimaan Pemerintah Indonesia pada tahun 2020 dilaporkan hanya sebesar 12,36 persen dari PDB. Dengan demikian, meski lebih baik dalam hal rasio utang, namun Indonesia lebih buruk dalam hal kemampuan membayar beban utang.



FRAKSI PARTAI GERINDRA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Sekretariat : MPR/DPR-RI Nusanitara I Lantai 2/108 - 2/109, Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270
Telp. (021) 5755624, 5755627, 5755628 Fax. (021) 5755623



Laporan IMF tersebut juga membuat proyeksi penerimaan negara hingga tahun 2026. Indonesia diproyeksikan hanya sedikit meningkat dari kondisi tahun 2020, yaitu menjadi 12,84 persen. Lagi-lagi masih jauh lebih rendah dari rata-rata negara berkembang dan berpendapatan menengah (termasuk Indonesia) tadi. Sebagai informasi tambahan, proyeksi rasio penerimaan negara atas PDB Indonesia dalam laporan tersebut lebih rendah dibandingkan beberapa negara yang sering disebut memiliki rasio utang lebih tinggi seperti Malaysia, Brazil, Mexico, dan India.

Fraksi Partai Gerindra DPR RI mengingatkan Pemerintah bahwa, *pertama*, negara-negara berkembang dan berpendapatan menengah tersebut tampak lebih baik dalam hal kemampuan membayar beban utang hingga beberapa tahun ke depan. *Kedua*, data porsi asing atas utang Indonesia termasuk berporosi terbesar, mencapai 50,87 persen pada akhir tahun 2020, menurut laporan IMF. Jauh lebih tinggi dari rata-rata negeri berkembang yang hanya 14,86 persen.

Yang terhormat Saudara Pimpinan dan Anggota DPR RI, Wakil Pemerintah, dan hadirin yang berbahagia,

Dalam dokumen RAPBN TA 2022 ditetapkan beberapa indikator pembangunan: Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di kisaran 5,5 – 6,3 persen; Tingkat kemiskinan di rentang 8,5 – 9,0 persen; Rasio gini 0,376 – 0,378; Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di rentang 73,41 – 73,46; Nilai Tukar Petani (NTP) kisaran 102 – 104; dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) 102 – 105.

Hadirnya pandemi Covid-19 mulai tahun 2020 membawa pengaruh signifikan terhadap kinerja ekonomi yang berdampak pada kemiskinan. Meskipun tingkat kemiskinan dan rasio gini pada Maret 2021 dilaporkan sempat mengalami penurunan secara terbatas menjadi 10,14 persen dan 0,384, namun untuk menekat tingkat kemiskinan dan rasio gini sebagaimana yang disebutkan dalam RAPBN 2022 diperlukan terus perlakuan pelaksanaan perlindungan sosial, stimulus fiskal untuk UMKM, dan penyesuaian realokasi transfer ke daerah melalui Dana Alokasi Khusus (DAK). Untuk efektivitas ketiga program tersebut, penting untuk memastikannya dilaksanakan dengan tepat sasaran.

Dalam pada itu, Fraksi Partai Gerindra DPR RI terus mendorong Pemerintah lebih serius lagi, dalam perbaikan data terpadu kesejahteraan sosial dengan data kependudukan untuk intervensi kebijakan afirmasi kelompok 40 persen terbawah. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia pada tahun 2020 tercatat 71,94. Angka ini di bawah target dalam APBN 2021 sebesar 72,78 - 72,95, apalagi R-APBN 2022 sebesar 73,41 - 73,46. Artinya, dengan pendidikan jarak jauh yang sudah lebih setahun berjalan, kualitas pendidikan kita dikhawatirkan tidak meningkat seperti diharapkan, dan pada akhirnya indeks IPM kita turut terdongkrak naik.

NTP dan NTN setelah Juni 2020 terus membaik hingga kondisi terakhir di Juli 2021, masing-masing berada pada angka 103,48 dan 104,89. Meski angka tersebut telah



FRAKSI PARTAI GERINDRA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Sekretariat : MPR/DPR-RI Nusantara I Lantai 2108 - 2109, Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270
Telp. (021) 5755624, 5755627, 5755628 Fax. (021) 5755623



melampaui target sebesar 102 - 104, Pemerintah harus tetap dapat mengupayakan agar NTP dan NTN terus meningkat dan sesuai target agar kesejahteraan petani dan nelayan semakin meningkat.

Yang terhormat Saudara Pimpinan dan Anggota DPR RI, Wakil Pemerintah, dan hadirin yang berbahagia,

Untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi dan target pembangunan Indonesia tahun 2022, Pemerintah juga harus meningkatkan pertumbuhan produktivitas di sektor-sektor dengan nilai tambah yang rendah sehingga menjadi *multiplier effect* terhadap pertumbuhan produktivitas sektor usaha, baik itu di kalangan usaha rumah tangga maupun usaha kecil dan menengah.

Reformasi kebijakan harus terus dilakukan untuk menciptakan lapangan pekerjaan, membangun angkatan kerja yang memiliki keterampilan untuk menjalankan berbagai pekerjaan baru di sektor-sektor dengan nilai tambah tinggi serta kompetitif. Inovasi dalam meningkatkan keterampilan angkatan kerja selaras dengan peralihan dan limpahan teknologi hasil dari penanaman modal dan investasi.

Pemerintah perlu mempertimbangkan *downside risk* ke depan melalui perumusan APBN yang sehat, kredibel, dan *sustainable* sehingga APBN yang kita rumuskan bersama dapat merespon kondisi yang masih dalam ketidakpastian.

Strategi penanganan pandemi Covid-19 dari sisi kesehatan, perlu diintensifkan, baik melalui *testing, tracing,* dan *treatment,* maupun percepatan program vaksinasi. Perlindungan sosial sebagai bantalan untuk memberikan bantuan terhadap masyarakat, dan dukungan terhadap sektor usaha tahun 2021 ini menjadi kunci dan *baseline* terwujudnya target kebijakan pembangunan di tahun 2022.

Yang terhormat Saudara Pimpinan dan Anggota DPR RI, Wakil Pemerintah, dan hadirin yang berbahagia,

Demikian pandangan Fraksi Partai Gerindra DPR RI, kami harapkan catatan-catatan di atas agar dapat menjadi perhatian dan dapat ditindaklanjuti dalam pembahasan selanjutnya dalam rangka penyusunan R-APBN Tahun Anggaran 2022. Terutama dalam kaitannya dengan agenda penguatan ekonomi nasional dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

Semoga Allah Yang Maha Kasih membimbing kita semua kepada tujuan berbangsa dan bernegara untuk mewujudkan negara adil dan makmur.



FRAKSI PARTAI GERINDRA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Sekretariat: MPR/DPR-RI Nusantara I Lantai 2108 - 2109, Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270
Telp. (021) 5755624, 5755627, 5755628 Fax. (021) 5755623




Billaahittaufiq walhidaayah
Massalaamu'alaikum warohmatullaahi wabarakaatuh,

Jakarta, 19 Agustus 2021

PIMPINAN FRAKSI PARTAI GERINDRA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Ketua


H. Ahmad Muzani
No. Anggota A-75

FRAKSI
PARTAI

Sekretaris




H. Desmond J. Mahesa, SH., MH
No. Anggota A-118

GERINDRA
GERAKAN INDONESIA RAYA
DPR - RI



**PANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI NASDEM DPR RI
ATAS**

RUU TENTANG APBN TA 2022 BESERTA NOTA KEUANGANNYA

Disampaikan Oleh : Willy Aditya, S.Fil., M.D.M.

Nomor Anggota: A - 383

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Salam Sejahtera bagi kita semua

Om Swastyastu

Namo Buddhaya

Salam Kebajikan Salam Restorasi!!!!

Yth. Sdr. Pimpinan Sidang Paripurna DPR RI;

Sdri. Menteri Keuangan beserta jajarannya;

Para Anggota DPR RI.

Sebagai pembuka izinkan kami untuk memanjatkan puji syukur yang tiada terkira atas rahmat dan Karunia Allah SWT sehingga pada pagi hari yang berbahagia ini kita dapat mengikuti Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian Pemandangan Umum fraksi-fraksi atas RUU Tentang APBN TA 2022 beserta Nota Keuangannya. Pada kesempatan yang berbahagia ini pula kami Fraksi Partai NasDem mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-76. Semoga dengan momentum proklamasi ini semangat pantang menyerah terus tumbuh dalam sanubari setiap anak bangsa sehingga masa depan Indonesia yang maju, adil dan sejahtera dapat kita raih.

Saudara Pimpinan, Anggota Dewan, Menteri Keuangan serta hadirin yang terhormat,

Tahun 2022 adalah momentum penting bagi masa depan perekonomian Indonesia. Sebagaimana kita tahu bersama tahun anggaran 2022 adalah periode terakhir kita menikmati kemewahan fiskal dengan relaksasi defisit di atas 3%. Sesuai dengan amanat UU No. 2 Tahun 2020 pada tahun 2023 defisit APBN akan kembali ke posisi normal. Meskipun dinamika pandemi Covid-19 masih sangat tinggi dan berdampak pada setiap aspek kehidupan masyarakat, pemerintah dituntut untuk menerapkan mitigasi resiko yang cermat untuk memastikan konsolidasi kebijakan fiskal berjalan secara kuat dan menyeluruh sehingga keberlanjutan fiscal tetap terjaga.

Fraksi Partai Nasdem mengapresiasi pemerintah yang mengejawantahkan Konstruksi pemikiran tersebut ke dalam rancangan anggaran dan belanja negara 2022 dengan tema "Pemulihan ekonomi dan Reformasi Struktural". Pokok-pokok kebijakan fiskal yang meliputi pemantapan pemulihan ekonomi, program perlindungan sosial, peningkatan daya saing dan produktivitas dengan implementasi reformasi struktural; serta optimalisasi pendapatan dan penguatan *spending better*, telah disusun dengan merupakan cerminan watak APBN kita yang responsive, antisipatif dan dan fleksibel dalam merespon dinamika ketidakpastian ekonomi global dan domestik..

Oleh karena itu Fraksi Partai NasDem kembali menegaskan pentingnya memaksimalkan keberpihakan anggaran untuk mendorong pertumbuhan inklusif yang dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia terutama masyarakat miskin, rentan miskin dan kelas menengah yang selama ini paling merasakan dampak negatif dari pandemi Covid-19. Data Bank Dunia menyatakan bahwa antara Februari 2020 sampai 2021 menyatakan bahwa jumlah pengangguran meningkat sebesar 1,8 juta dan 2,8 juta jiwa jatuh dibawah garis kemiskinan.

Saudara Pimpinan, Anggota Dewan, Menteri Keuangan serta hadirin yang terhormat,

Setelah mencermati Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara beserta nota keuangan, Fraksi Partai NasDem memberikan beberapa catatan sebagai berikut:

A. ASUMSI DASAR MAKKRO

1. Fraksi Partai NasDem menganggap bahwa besaran target pertumbuhan ekonomi 2022 sebesar 5,0 sampai 5,5% masih cukup realistis. Angka tersebut bahkan dapat dilampaui jika pemerintah fokus untuk mendorong sektor konsumsi dan investasi dengan mempercepat implementasi UU Cipta Kerja. Selama ini lapangan pekerjaan baru lebih banyak berada pada sector dengan produktivitas yang rendah dan pendapatan yang tidak cukup untuk mengangkat status mereka menjadi kelas menengah. Berdasarkan data bank Dunia diantara 85 juta pekerja berbayar di Indonesia hanya 13 juta atau 15% yang termasuk dalam kelas menengah. Pandemi Covid-19 memperburuk kondisi tersebut dimana postur kelas menengah Indonesia menurun sebesar 5,2%. Akselerasi tersebut diharapkan mampu mendorong peningkatan investasi yang berkualitas sehingga dapat menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan termasuk menjaga daya beli kelas pekerja yang terkena PHK melalui jaminan Kehilangan Pekerjaan.
2. Target inflasi sebesar 3% dianggap cukup rasional. Pemerintah diharapkan pemerintah terus menerus melakukan pengawasan atas rantai pasok bahan pangan di daerah.. Ketersediaan supply barang di daerah terutama bahan pokok tetap harus tetap terjaga seiring dengan proyeksi kenaikan tingkat permintaan akibat membaiknya daya beli masyarakat.
3. Target Nilai tukar pada kisaran Rp14.350 dianggap masih cukup moderat di tengah ketidakpastian akibat pandemi Covid-19 yang turut mempengaruhi pasar keuangan domestic. Namun demikian, Data Badan Pusat Statistik (BPS), menunjukkan bahwa Neraca perdagangan Indonesia Juni 2021 kembali surplus sebesar 1,32 miliar dolar AS, meskipun sedikit menurun dibandingkan

dengan surplus bulan sebelumnya sebesar 2,7 miliar dolar. Oleh karena itu Fraksi Partai NasDem mendorong mempertahankan surplus neraca perdagangan dalam mendukung penguatan kurs rupiah. Oleh karena itu trend penguatan masih cukup terbuka di tahun 2022 karena dampak pandemic diprediksi akan berkurang dan harga komoditas mulai stabil di pasar internasional.

4. Fraksi Partai Nasdem menganggap bahwa target tingkat bunga SUN sebesar 6,32-6,72% berada pada level yang moderat. Proses pemulihan ekonomi Amerika Serikat yang mempengaruhi sentimen pasar tidak dapat kita hindari. Fraksi Partai NasDem mendorong agar pemerintah mengantisipasi lonjakan tingkat suku bunga SBN akibat potensi *capital outflow effect* jika the Fed benar-benar melakukan tapering off. Langkah Pembelian SUN oleh Bank Indonesia di pasar primer seperti yang terjadi pada tahun 2020 sebaiknya dihindari karena pada tahun 2022 daya beli masyarakat kemungkinan akan kembali normal sehingga dapat meningkatkan inflasi.

5. Fraksi Partai NasDem berpandangan bahwa target lifting minyak 703 ribu Barrel per Hari cukup realistis mengingat beratnya permasalahan struktural yang kita hadapi berupa penurunan alamiah sumber produksi utama dan pandemi Covid-19. Pemerintah diharapkan mengantisipasi penurunan harga minyak internasional agar tetap menggalakkan aktivitas hulu migas. Fraksi Partai NasDem juga beranggapan bahwa masih ada peluang bagi pemerintah untuk meningkatkan aktivitas hulu migas mengingat Indonesia telah memiliki *Sovereign Wealth Fund* (SWF) yang didesain untuk menarik investasi sehingga dapat mendorong adanya eksplorasi sumber produksi migas baru.

B. Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal

1. Fraksi Partai NasDem menganggap bahwa target pendapatan negara tahun 2022 sebesar Rp. 1.840,7 masih cukup moderat.. Fraksi Partai NasDem mendorong pemerintah untuk menggali sumber alternatif untuk meningkatkan rasio pajak terutama perbaikan regulasi hukum untuk mengatasi kebocoran pajak pada sector-sektor tertentu sehingga resiko *shortfall* penerimaan pajak dapat diminimalisir.

2. Fraksi Partai NasDem mengapresiasi langkah pemerintah yang terus menerus melakukan perbaikan kebijakan dan mekanisme perencanaan dan

penganggaran Belanja. Target pemerintah Rp 2.631,8 triliun - Rp 2.775,3 triliun dianggap sangat realistis mengingat terbatasnya ruang fiskal yang kita miliki. Rendahnya penerimaan negara dan besarnya *mandatory spending* yang relatif cukup besar mengharuskan pemerintah untuk meningkatkan kualitas belanja agar lebih optimal dirasakan oleh masyarakat. Penanganan pandemi Covid-19 masih membutuhkan anggaran yang sangat besar dalam mendukung upaya pemulihan ekonomi nasional.

Fraksi Partai NasDem memberikan catatan terkait masih rendahnya penyerapan anggaran TKDD di daerah setelah *refocussing*. Selain itu Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) hingga akhir Maret 2021 baru mencapai Rp 98,9 triliun atau setara 9,4% dari APBD. Di sisi lain Simpanan pemerintah daerah di perbankkan hingga akhir Maret 2021 tercatat Rp 182,33 triliun atau membengkak 11,22% dari posisi bulan Februari 2021 yang sebesar Rp 163,95 triliun. Oleh karena itu pemerintah diharapkan mampu melakukan pemetaan yang intensif atas kendala teknis ataupun subtantif yang terjadi di lapangan sehingga belanja daerah dapat dipercepat terutama belanja untuk penanganan covid-19.

Saudara Pimpinan, Anggota Dewan, Menteri Keuangan serta hadirin yang terhormat,

Demikian Pemandangan Umum Fraksi Partai NasDem terhadap Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 beserta Nota Keuangannya.

Dengan mengucapkan Bismillahrahmanirahim, Fraksi Partai Nasdem menyatakan menyetujui RUU APBN TA 2022 untuk ditindaklanjuti dalam pembahasan selanjutnya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa mencurahkan rahmat dan hidayat-Nya kepada kita sekalian. Atas perhatian bapak/ibu sekalian kami ucapkan terima kasih.

Wabilillahitaufiq Walhidayah

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Salam Sejahtera

Om Swastiastu,

Namo Budaya

Salam Restorasi

Jakarta, 19 Agustus 2021

PIMPINAN FRAKSI PARTAI NasDem DPR RI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
KETUA
SEKRETARIS



H. Ahmad H. M. Ali, SE
Nomor Anggota: A - 395

Saan Mustopa
Nomor Anggota: A - 367



Membela Yang Benar

FPKB

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA DPR RI



PEMANDANGAN UMUM FRAKSI
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA DPR-RI
ATAS
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)
TAHUN ANGGARAN 2022
BESERTA NOTA KEUANGANNYA

Disampaikan Oleh Juru Bicara FPKB DPR RI:
SITI MUKAROMAH, S.Ag, M. AP.
Anggota Nomor: A-25

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Salam Sejahtera untuk kita semua,

Yang Terhormat, Saudara Pimpinan Sidang
Yang Terhormat, Saudara Anggota Dewan
Yang Terhormat, Saudari Menteri Keuangan RI
Yang Terhormat, Saudara Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Bappenas
Serta Hadirin sekalian yang berbahagia

Pada kesempatan ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas nikmat dan karunia-Nya, kita dapat hadir, baik secara fisik maupun virtual, dalam Rapat Paripurna DPR RI hari ini untuk mendengarkan penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi atas Rancangan Undang-Undang Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 beserta Nota Keuangannya.

Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing dan mengajarkan kepada kita bagaimana mengelola dan mengatur masyarakat, bangsa dan negara, sehingga kita dapat meladani beliau untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang *baladatin toyibatun wa rabbun ghafur*.

Saudara Pimpinan, Anggota Dewan, Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Serta Hadirin Yang Terhormat,

Penyusunan dan perumusan kebijakan fiskal Tahun Anggaran 2022 melalui instrument Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak boleh hanya bersifat *business as usual*, namun harus bersifat *out of the box* dan memberikan terobosan-terobosan riil untuk mempercepat pembangunan yang sehat dan terus berkelanjutan meski masih dibawah bayang-bayang akan ketidakpastian akan berakhirnya pandemi Covid-19 serta berbagai dampak distortif-nya. FPKB memandang bahwa kebijakan fiskal tahun 2022 yang bertemakan **“Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”** harus menjadi pijakan bersama seluruh stakeholder dalam melakukan

SEKRETARIAT FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA DPR RI

GEDUNG NUSANTARA I DPR/MPR RI, LANTAI 16 /RUANG 16.08-16.09
JL. JEND. GATOT SUBROTO, SENAYAN, JAKARTA 10270. TELP. (021) 575 5687 - 575 5716
FAX. (021) 575 5717, WEBSITE : www.fpkb.dpr.or.id

transformasi struktural yang lebih menyeluruh, untuk mempercepat program pemulihan ekonomi serta penguatan reformasi di berbagai aspek kebijakan dengan dilakukan secara efisien dan tepat sasaran untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang banyak terpuruk akibat pandemi Covid-19 sejak tahun 2020 yang lalu. Dalam hal ini FPKB berpendapat dengan Presiden Joko Widodo seperti yang beliau sampaikan dalam Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI tanggal 16 Agustus 2021 yang lalu bahwa pandemi Covid-19 juga memberikan hikmah kepada bangsa Indonesia bahwa krisis menuntut konsolidasi kekuatan negara untuk melayani rakyat, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan meraih Indonesia Maju yang kita cita-citakan.

Saudara Pimpinan, Anggota Dewan, Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Serta Hadirin Yang Terhormat,

Berkaitan telah disampaikannya RUU APBN Tahun Anggaran 2022 beserta Nota Keuangannya oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 16 Agustus 2021 yang lalu, dimana dalam dokumen tersebut juga menyatakan rencana target Asumsi Dasar Ekonomi Makro dan Indikator-Indikator Kesejahteraan sebagai tolak ukur pembangunan ekonomi di tahun 2022. Menanggapi hal tersebut, FPKB telah mencatat beberapa hal penting yang perlu menjadi perhatian pemerintah antara lain sebagai berikut:

1. **Pertumbuhan ekonomi diproyeksikan sebesar 5,0 persen - 5,5 persen.** FPKB berpendapat bahwa rentang target pertumbuhan ekonomi tersebut cukup realistis pada batas bawah dan cenderung *over estimate* pada batas atas. Namun demikian, secara umum pertumbuhan ekonomi tahun 2022 akan tergantung pada seberapa besar dorongan pola aktivitas dan mobilitas masyarakat yang semakin lebih baik selaras dengan proses pemulihan dari eskalasi pandemi Covid-19 dibandingkan tahun sebelumnya. FPKB mendesak pemerintah agar mampu memaksimalkan berbagai sumber-sumber utama pertumbuhan ekonomi nasional, seperti peningkatan konsumsi masyarakat dengan optimalisasi kebijakan program perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan yang menjadi faktor penting dalam mendorong kinerja konsumsi masyarakat. Optimalisasi belanja barang dan modal, reformasi struktural serta peningkatan layanan berbasis digital oleh pemerintah guna mendorong pertumbuhan investasi dalam negeri, peningkatan kinerja export dan import dan penciptaan lapangan kerja baru menjadi faktor penting guna menurunkan angka pengangguran. FPKB juga mendorong pemerintah untuk terus meningkatkan peranan sektor pertanian yang merupakan sumber lapangan kerja rakyat Indonesia dan penopang ketahanan pangan. Pengembangan konsep kelompok usaha (*group of enterprises*) dan *food estate* serta penggunaan teknologi diharapkan menjadi solusi sehingga petani dapat merasakan hasil yang lebih tinggi dan mendorong efisiensi produksi.

2. **Terkait dengan target inflasi sebesar 3,0 persen,** FPKB berpendapat bahwa dengan terus meningkatnya jumlah masyarakat yang sudah divaksin guna menurunkan tingkat penularan Covid-19, maka mobilitas masyarakat dan aktifitas ekonomi akan juga berangsur membaik, sehingga akan meningkatkan daya beli masyarakat. Untuk

menjaga ekspektasi inflasi di tahun 2022 tetap terkendali maka peningkatan koordinasi kebijakan antara otoritas moneter, otoritas fiskal dan sektor riil melalui sinergitas koordinasi antara Pemerintah dan Bank Indonesia harus terjaga dengan baik. Secara umum pergerakan inflasi pada tahun 2022 diperkirakan masih akan berasal dari komponen inti dan komponen bergelolak maupun karena faktor musiman dan iklim. FPKB juga mendorong kepada pemerintah untuk tetap menjaga dan tidak menaikkan harga bahan bakar minyak dan energy lainnya yang dibutuhkan masyarakat guna percepatan pemulihan ekonomi nasional. Selain itu, pemerintah juga harus menjamin ketersediaan pasokan pangan ditengah terus menurunnya pasokan pangan global akibat dari faktor alam yang extream dengan melakukan perbaikan sistem logistik nasional dan penguatan infrasktur.

3. **Nilai tukar rupiah diasumsikan sebesar 14.350 Rupiah per dollar AS tahun 2022**, FPKB berpandangan target tersebut cukup rasional ditengah tekanan keuangan global yang membayangi. Pulihnya perekonomian AS akan membuat banyak investor memilih untuk menginvestasikan ke instrumen yang dikeluarkan oleh AS yang dianggap lebih aman dan menguntungkan, hal itu akan membuat fluktuasi nilai tukar rupiah terganggu. FPKB juga mendorong kepada pemerintah untuk terus melakukan optimalisasi implementasi UTU Ciptaker beserta turunnya dengan melakukan berbagai penyederhanaan perizinan guna mendorong investasi didalam negeri. Untuk menghindari potensi pelemahan rupiah dari asumsi, maka FPKB mendukung upaya pemerintah bersama Bank Indonesia, OJK dan LPS untuk bersinergi dalam memitigasi resiko ini melalui langkah-langkah perbaikan struktural di sektor keuangan sehingga dapat berdampak positif menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah. Selain itu peningkatan penggunaan mata uang lokal (*local currency*) dalam perdagangan antar Negara dalam kawasan seperti Negara di ASEAN juga akan mengurangi fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

4. **Terhadap penetapan target tingkat Suku Bunga SUN 10 tahun sebesar 6,82 Persen**, FPKB berpendapat bahwa penetapan suku bunga tersebut masih cukup moderat. Tingkat suku bunga SUN 10 tahun yang rendah memang sangat diperlukan untuk mendukung proses pemulihan ekonomi, meningkatkan daya saing ekonomi nasional, dan efisiensi belanja negara, khususnya belanja bunga utang. Dengan mempercepat proses pemulihan ekonomi nasional dan pengelolaan fiskal yang optimal sehingga dapat meningkatkan kepercayaan investor dengan hal itu maka tingkat suku bunga SBN 10 tahun juga dapat ditekan. Penggunaan intrumen SBN sebagai salah satu sumber pembiayaan dan pengelolaan hutang luar negeri yang semakin hari semakin membesar juga harus diperhatikan dengan lebih cermat dan hati-hati. FPKB meminta kepada pemerintah untuk terus berkolaborasi dengan otoritas moneter dalam rangka menjaga rasio hutang Negara yang semakin mengkhawatirkan.

5. **Penetapan harga minyak mentah Indonesia (ICP) oleh pemerintah sebesar US\$ 63 per barel di tahun 2022**. FPKB memandang bahwa resiko ketidakstabilan harga akibat fluktuasi pergerakan harga minyak mentah dunia pada tahun 2022 masih akan terjadi. ICP diperkirakan akan naik dibandingkan tahun 2021 dengan asumsi permintaan minyak dunia

naik seiring dengan semakin terkendalinya covid-19 dan juga keberlanjutan kebijakan pengurangan produksi minyak dari OPEC+. Namun faktor geopolitik di Timur Tengah yang tidak menentu juga akan membatasi kenaikan harga minyak mentah. Kenaikan harga minyak mentah tentu dapat menambah penerimaan Negara dari sisi PNBp migas, namun upaya tersebut tentu tidak dapat berlangsung secara berkelanjutan mengingat target lifting dalam negeri seringkali tidak tercapai.

6. **Asumsi Lifting minyak bumi dipatok sebesar 703 ribu barel per hari (bph) dan juga lifting gas bumi sebesar 1.036 ribu barel setara minyak per hari (bsmph).** FPKB mendorong agar target lifting minyak dan gas di 2022 minimal harus mencapai batas atas proyeksi lifting yang diajukan pada KEM-PPKF 2022, yaitu masing-masing sebesar 726 ribu barel per hari untuk lifting minyak bumi dan 1.103 ribu barel setara minyak per hari untuk lifting gas. Target tersebut harus benar-benar dipayakakan agar dapat membantu penerimaan negara dalam rangka pemulihan ekonomi di masa pandemi ini. Hal tersebut didukung oleh meningkatnya harga minyak dunia, sehingga dapat memenuhi tingkat keekonomian proyek teknologi *Enhanced Oil Recovery* dan reaktivasi sumur tua. Selain itu pemerintah juga harus mempercepat pelaksanaan produksi proyek migas yang sudah direncanakan seperti proyek Pasir Petroleum, Pacific Oil & Gas, SGE, Eni East Sepinggan, PEPC (Lapangan Jambaran Tiung Biru/JTB), dan Tangguh Train-3.

7. Lebih lanjut, FPKB menyoroti target indikator kesejahteraan dalam rangka memastikan berjalannya tatanan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, yaitu sebagai berikut:

Pertama, Tingkat pengangguran terbuka ditarget pada kisaran 5,5 – 6,3 persen. Untuk mencapai target tersebut, FPKB meminta agar pemerintah lebih selektif dalam membuat program pembangunan infrastruktur dan mengarahkannya kepada program infrastruktur padat karya. Hal tersebut sangat bermanfaat untuk menyerap banyak tenaga kerja. Selain itu, FPKB juga mendorong efektivitas program pelatihan keterampilan untuk penganggur muda agar mendapatkan kerja yang layak ataupun menjadi wirasahawan.

Kedua, Angka kemiskinan ditarget pada kisaran 8,5 – 9,0 persen dan Tingkat Ketimpangan atau Rasio Gini sebesar 0,376 - 0,378. FPKB meminta kepada pemerintah agar terus memperbaiki target sasaran dari program perlindungan sosial. Data sasaran perlindungan sosial harus bisa diidentifikasi setepat-tepatnya agar yang dapat bantuan benar masuk kategori miskin dengan alamat jelas yang bisa ditelusuri sehingga bantuan tidak salah alamat. Selain itu, FPKB mendorong pemerintah untuk meningkatkan insentif bagi petani, peternak, dan nelayan, karena di sektor tersebut merupakan sumber utama dari rumah tangga miskin.

Ketiga, target Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 73,41 – 73,46. Dalam rangka meningkatkan IPM ini, FPKB meminta kepada pemerintah untuk menormalisasi system Pendidikan, baik melalui pembelajaran langsung maupun pembelajaran jarak jauh. Hal ini berkaitan dengan kualitas Pendidikan yang menurun dalam implementasi

pembelajaran jarak jauh dan mengancam terjadinya *lost generation*. Disisi Kesehatan, FPKB menggarisbawahi bahwa dalam masa pandemi ini, penyakit kronis non covid-19 sulit untuk mendapatkan layanan dan fasilitas Kesehatan. Maka dari itu, FPKB meminta agar pemerintah juga memperhatikan kesiapan fasilitas Kesehatan untuk melayani pasien non-covid-19.

Terkait dengan target Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) tahun 2022 yang ditetapkan oleh pemerintah masing-masing berada pada kisaran 103 – 105 dan 104 – 106. FPKB mendukung peningkatan NTP dan NTN yang ditetapkan oleh pemerintah, mengingat banyak keluarga miskin yang berasal dari petani dan nelayan. Di sisi pendapatan petani dan nelayan, FPKB mendorong agar pemerintah memfasilitasi peningkatan pendapatan petani dan nelayan melalui bantuan subsidi dan penyediaan infrastruktur. Di sisi pengendalian pengeluaran konsumsi rumah tangga petani dan nelayan pemberian raskin, subsidi pendidikan, subsidi kesehatan, dan lainnya rangka meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan.

Saudara Pimpinan, Anggota Dewan, Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Serta Hadirin Yang Terhormat,

Setelah mencermati postur RAPBN tahun anggaran 2022 yang diajukan oleh pemerintah, maka FPKB memandang perlu memberikan beberapa catatan penting, yaitu sebagai berikut:

1. Target **Pendapatan Negara** dalam RAPBN TA 2022 sebesar Rp1.840,7 triliun atau tumbuh 9,0 persen dibandingkan dengan *outlook* tahun 2020. **Penerimaan Perpajakan** diperkirakan mencapai sebesar Rp1.506,9 triliun atau naik sebesar 9,5 persen dari *outlook* tahun 2021, dan untuk **Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)** ditargetkan tumbuh negatif sebesar 0,7 persen dari *outlook* tahun 2021 mencapai sebesar Rp333,2 triliun, serta **Penerimaan Hibah** ditargetkan sebesar Rp 0,6 triliun. FPKB memandang bahwa target pendapatan negara ini cenderung *over estimate* dengan mempertimbangkan masih banyaknya resiko yang akan dihadapi dalam pemungutan penerimaan pajak maupun PNBP di tahun 2022 nanti sebagai konsekuensi keberlanjutan proses pemulihan ekonomi nasional dan global akibat pandemi Covid-19, serta rencana pemerintah untuk meneruskan pemberian berbagai insentif perpajakan. Untuk mengoptimalkan penerimaan negara demi terwujudnya konsolidasi fiskal jangka menengah, pemerintah juga telah mengajukan perbaikan regulasi sebagai perwujudan reformasi perpajakan yang sudah dimulai pada tahun 2021 ini yaitu melakukan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) Bersama DPR RI.

Tanpa bermaksud menggurui, FPKB mengingatkan pemerintah dalam upaya mendorong sistem perpajakan menjadi lebih efektif sebagai instrumen kebijakan, meminimalkan distorsi, adaptif dengan perubahan struktur ekonomi, teknologi, aktivitas dunia usaha dan perpajakan global, menjamin kepastian hukum serta optimal sebagai sumber pendapatan

untuk pembangunan nasional yang berkelanjutan tetap harus dengan didukung oleh otoritas pajak yang profesional dan akuntabel dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya. FPKB berpendapat langkah Pemerintah melakukan reformasi perpajakan melalui RUU KUP seperti yang dimaksud didalam Nota Keuangan yaitu untuk mewujudkan sistem perpajakan yang lebih sehat, adil, fleksibel dan akuntabel akan sulit dilakukan tanpa disertai dengan reformasi kelembagaan sebagai salah satu kebijakan fiskal yang diwujudkan melalui pembentukan suatu lembaga khusus yang bertugas mengumpulkan pendapatan atau penerimaan negara termasuk perpajakan yang bersifat otonom.

Selain itu, FPKB memandang ketegasan otoritas pajak dalam melakukan penegakan hukum (*law enforcement*) dengan disertai langkah *extra effort* untuk memperluas basis data perpajakan setidaknya akan mendorong pencapaian penerimaan pajak menjadi lebih baik di tahun 2022 nanti, sehingga bisa menutup *shortfall* pajak seperti dalam duabelas tahun terakhir ini. Demikian juga terkait wacana *sunset policy* yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, maka idealnya kebijakan tersebut harus dapat meningkatkan *tax ratio* Indonesia yang selama ini relatif rendah dibanding negara G20 dan ASEAN-6 maupun diarahkan untuk mendorong meningkatnya rasio pertumbuhan penerimaan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi (*tax buoyancy*) sebagai indikator untuk mewujudkan penerimaan perpajakan yang berkelanjutan seiring dengan tumbuhnya ekonomi yang sampai sekarang masih dibawah angka 1 (satu).

FPKB memahami tidak tercapainya target dan terjadinya kontraksi penerimaan perpajakan tersebut tentu sangat berdampak dalam pengelolaan kebijakan fiskal melalui instrumen APBN. Akan tetapi, FPKB juga memandang upaya pemerintah dalam mendorong kebijakan perluasan basis pemajakan dan mencari sumber baru penerimaan dengan menambah obyek pemungutan PPN seperti yang diusulkan dalam Revisi UU KUP yaitu terkait dengan barang dan jasa yang bersinggungan langsung dengan hajat hidup masyarakat seperti pengenaan PPN terhadap barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak dan juga jasa pendidikan, jasa pelayanan kesehatan medis untuk dipertimbangkan secara mendalam. Penambahan objek PPN tersebut yang dilakukan di tengah momentum pemulihan ekonomi baik di masa pandemi maupun paska pandemi tetap berisiko dapat menurunkan laju daya beli dan tingkat konsumsi masyarakat, yang selama ini merupakan penopang utama pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Mengingat potensi dampaknya terhadap masyarakat luas, FPKB selalu berpegang pada prinsip *'qowaidul fiqh'* yang berbunyi *"dar'ul mufasid mugaddamun 'ala al-jalbi al-mashohih"* (mencegah kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan), maka FPKB akan mengkaji dan mempertimbangkan secara lebih mendalam manfaat dan mudharat dari pengenaan objek PPN untuk barang dan jasa yang dibutuhkan rakyat banyak.

Secara umum FPKB berpendapat naiknya target Penerimaan Pajak ditahun 2022 baik yang berasal dari Pajak Penghasilan (Pph), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Pajak Lainnya dengan total Rp1.262,9 triliun atau tumbuh 10,5 persen dari *Outlook*

tahun 2021 dari sisi eksternal sangat bergantung kepada membaiknya harga komoditas utama dunia maupun dari dalam negeri berasal dari seberapa cepat keberlangsungan pemulihan ekonomi nasional. Besaran target Penerimaan Pajak tahun 2022 seperti PPh migas yang didorong akan meningkat 3,4 persen dan juga penerimaan PPh nonmigas tumbuh 11,3 persen maupun penerimaan PPN dan PPhBM akan meningkat sebesar 10,1 persen, lalu penerimaan PBB ditargetkan meningkat 23,8 persen serta pendapatan Pajak Lainnya ditargetkan meningkat 7,0 persen dari outlook tahun 2021 jelas membutuhkan dukungan perbaikan administrasi perpajakan dan reformasi kelembagaan yang serius oleh pemerintah.

Demikian juga terkait target penerimaan kepabeanan dan cukai pada RAPBN tahun anggaran 2022 diperkirakan meningkat 4,6 persen dibandingkan outlook tahun 2021 harus memperhatikan dampak lebih lanjut pemberian insentif fiskal kepabeanan maupun efektifitas kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi cukai yang telah dan akan dilakukan oleh Pemerintah seperti pemberlakuan pengenaan cukai produk plastik. Selain itu, dengan adanya proyeksi mulai membaiknya perekonomian global dan nasional di tahun 2022 maka aktifitas ekspor dan impor diharapkan meningkat kembali, maka dengan dukungan penerapan *National Logistics Ecosystem* (NLE) dan juga penguatan *joint program* antara DJP-DJBC-DJA, FPKB mendesak pemerintah dapat meningkatkan penerimaan kepabeanan dan cukai lebih baik lagi. Secara khusus FPKB berpendapat bahwa tingginya kontribusi cukai hasil tambakau selama ini harus dibandingkan lurus dengan kebijakan pemerintah dalam memperhatikan kesejahteraan petani tambakau dan serapan tenaga kerja industri tambakau sesuai dengan empat pilar yang dicantangkan yaitu pengendalian, penerimaan, tenaga kerja, dan dampak ke rokok ilegal.

Di sisi lain, FPKB berpendapat turunnya target **Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)** dalam RAPBN tahun 2022 yang diproyeksikan sebesar Rp333,2 triliun atau terkontraksi sebesar 6,7 persen dari outlook tahun 2021 sangat disayangkan. Turunnya target PNBP ini akibat kemungkinan terjadinya penurunan PNBP SDA Migas yang terkontraksi sebesar 9,5 persen dan juga adanya potensi penurunan pada PNBP Lainnya yang bisa terkontraksi sebesar 17,9 persen dari outlook tahun 2021. Dilain sisi, menurut perhitungan pemerintah dalam RAPBN 2022 bahwa penerimaan PNBP SDA Non Migas diperkirakan masih mampu tumbuh 0,2 persen, PNBP dari pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) akan tumbuh 18,6 persen, serta pendapatan dari BLU bisa lebih tinggi 0,6 persen dari outlook tahun 2021. Pendapatan SDA nonmigas selain yang berasal dari pertambangan mineral dan batubara yang diprediksi minus 3,3 persen, maka sumber pendapatan dari kehutanan, perikanan, dan panas bumi diperkirakan bisa tumbuh positif yaitu 5,3 persen, 70,1 persen dan 7,5 persen dari outlook tahun 2021.

FPKB cukup mengapresiasi peningkatan target PNBP Perikanan di tahun 2022 yang cukup tinggi, hal ini masih memungkinkan dengan melihat potensi Produksi Perikanan Tangkap yang masih sangat besar di Indonesia apalagi jika didukung dengan penegakan hukum terkait pemberantasan *Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing*. Sedangkan terkait PNBP KND yaitu pendapatan dari bagian Pemerintah

atas laba BUMN berupa dividen, maka FPKB berharap bisa meningkat di tahun 2022, apalagi dalam beberapa tahun terakhir pemerintah juga sudah memberikan Penyerahan Modal Negara (PMN) yang tidak sedikit kepada BUMN. Selanjutnya kembali pada persoalan potensi penurunan dari PNBPN SDA Migas dan PNBPN Lainnya pada tahun 2022 nanti, maka tidak ad acara lain harus dimitigasi agar tidak berkontraksi semakin dalam. Pemerintah wajib memastikan upaya pengendalian *cost recovery* KKKS yang terkait PNBPN SDA bisa maksimal dengan mengedepankan prinsip efektivitas dan efisiensi atas pengembalian biaya *operational expenditure (opex)* dan *capital expenditure (capex)* termasuk *unrecovered cost*, serta melakukan penyempurnaan tata kelola dan peningkatan penggalan potensi serta pengawasan untuk PNBPN Lainnya.

2. Sesuai dengan tema kebijakan fiskal tahun 2022 yaitu “*Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural*”, kebijakan **Belanja Negara** dalam RAPBN Tahun 2022 direncanakan sebesar Rp 2.708,7 triliun yaitu terdiri dari **Belanja Pemerintah Pusat** sebesar Rp. 1.938,3 triliun dan belanja **Transfer ke Daerah dan Dana Desa** sebesar Rp. 770,4 triliun. Terhadap porsi belanja tersebut, FPKB memahami bahwa dalam rangka konsolidasi fiskal menghadapi normalisasi anggaran pada tahun 2023, pemerintah mengurangi pagu belanja negara. Namun FPKB menyanggah ketimpangan pertumbuhan Belanja Pemerintah Pusat yang sebesar 0,6 persen dengan belanja Transfer Ke Daerah dan Dana Desa yang hanya tumbuh 0,02 persen. FPKB mendorong penyeimbangan pertumbuhan antar komponen belanja tersebut karena kebutuhan pendanaan daerah akan meningkat seiring dengan kebutuhan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat dan juga penanganan covid-19 yang dilakukan oleh daerah seperti insentif untuk Tenaga Kesehatan dan proses vaksinasi.

FPKB memandang alokasi **Belanja Pemerintah Pusat** yang terdiri dari **Belanja K/L** sebesar Rp.940,6 triliun maupun **Belanja Non K/L** sebesar Rp.997,7 triliun, dimana besaran Belanja Non K/L lebih besar dari belanja K/L, harus dikelola dengan efektif, efisien, dan produktif, sehingga mampu mengatasi permasalahan yang diakibatkan oleh pandemi covid-19 secara cepat dan tepat sasaran. Secara umum, FPKB melihat bahwa arah kebijakan belanja K/L oleh pemerintah di tahun 2022 yang diprioritaskan pada bidang pada bidang kesehatan, perlindungan sosial, pendidikan, infrastruktur, TIK, ketahanan pangan, pariwisata, serta pertahanan dan keamanan tersebut cukup komprehensif untuk mendukung proses pemulihan ekonomi serta penguatan reformasi di berbagai aspek kebijakan akibat pandemi Covid-19 tersebut.

Secara khusus terkait **belanja bidang Pendidikan** yang mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 541,7 Triliun atau 20 persen dari belanja, FPKB mendorong pemanfaatan anggaran Pendidikan untuk **Peningkatan Kompetensi dan Daya Saing Angkatan Kerja melalui Pelatihan Vokasi**. Hal tersebut didasarkan pada data bahwa mayoritas tenaga kerja Indonesia, sebanyak 56% dari jumlah tenaga kerja masih berpendidikan SMP kebawah, dan 24 persen pengangguran terbuka adalah lulusan SMK. Selain itu, tenaga kerja yang berkualitas masih banyak terkonsentrasi di pulau Jawa. Untuk dapat meningkatkan kualitas angkatan kerja dan tenaga kerja serta memperluas penyebaran angkatan

kerja yang berkualitas, maka dapat dilakukan melalui peningkatan kompetensi dan daya saing angkatan kerja dengan pelatihan vokasi dan sertifikasi kompetensi di seluruh Indonesia yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Sehingga tercipta *link and match* antara kompetensi Angkatan kerja dan kebutuhan dunia usaha dan dunia Industri. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan proporsi keberkerjaan dan produktivitas angkatan kerja di Indonesia yang pada akhirnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Di sisi lain, FPKB mendorong pemerintah untuk terus melakukan efisiensi pada **belanja pegawai** yang pada tahun 2022 meningkat sebesar 6,9 persen menjadi Rp 426.8 triliun atau 22 persen dari Belanja Pemerintah Pusat. FPKB memandang bahwa kebijakan reformasi birokrasi dan peningkatan efektivitas serta efisiensi birokrasi juga harus diikuti dengan efisiensi anggaran belanja pegawai. Maka dari itu, peningkatan belanja pegawai harus dirasionalisasi sejalan dengan reformasi birokrasi dan cara kerja baru yang lebih efisien. Kemudian terkait **belanja barang** sebesar Rp 337,8 triliun atau setara 17,43 persen, FPKB meminta pemerintah agar belanja barang yang diberikan kepada masyarakat dapat ditingkatkan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan efektivitasnya agar produktivitas masyarakat dapat meningkat.

Selanjutnya mengenai **belanja modal** sebesar Rp 196,6 triliun atau sebesar 10,14 persen, FPKB menggarisbawahi bahwa alokasi belanja modal pemerintah semakin menyusut. Hal tersebut dapat akan merugikan masyarakat karena belanja modal digunakan untuk membangun sarana dan fasilitas publik. Selain itu, FPKB meminta agar pemerintah memperbanyak porsi proyek padat karya, FPKB meminta kepada pemerintah agar pembangunan infrastruktur pelayanan dasar dilakukan berdasarkan aspek pemerataan, terutama di bidang Pendidikan. Di sisi yang lain Program Pengelolaan Utang Negara untuk **pembayaran bunga utang** dalam RAPBN 2022 direncanakan sebesar Rp. 405,8 triliun atau 20,94 dari total Belanja Pemerintah Pusat. Belanja pembayaran utang merupakan alokasi belanja terbesar kedua setelah belanja pegawai. Peningkatan yang sangat tajam ini merupakan konsekuensi logis dari fiskal ekspansif yang diterapkan oleh Indonesia dan dampaknya adalah ruang fiskal yang semakin menyempit. Oleh karena itu, FPKB mendorong pemerintah untuk melakukan renegoisasi dengan para kreditur agar terdapat ruang fiskal untuk pemulihan ekonomi.

Sedangkan alokasi **belanja bantuan sosial** di tahun 2022 adalah sebesar Rp 146,5 Triliun atau sebesar 7,56 persen dari total Belanja Pemerintah Pusat. FPKB meminta agar pemerintah terus memperbaiki dan meningkatkan keakuratan data penerima agar lebih tepat sasaran, tepat waktu dan jumlah guna. Selain itu, FPKB juga meminta kepada pemerintah untuk meningkatkan perlindungan sosial untuk pekerja informal yang jumlahnya sebanyak 56,5 persen dari jumlah pekerja di Indonesia. Terkait alokasi anggaran subsidi tahun 2022 ditetapkan sebesar Rp 206,9 triliun atau sebesar 10,68 persen dari total Belanja Pemerintah Pusat, yang dibagi untuk **subsidi energi** sebesar Rp. 134 triliun dan **subsidi non energi** sebesar Rp. 72,9 triliun. FPKB mendukung reformasi subsidi energi menjadi subsidi berbasis orang

untuk LPG tabung 3 kg. FPKB juga mendorong agar subsidi solar juga diubah menjadi subsidi berbasis orang. Hal tersebut akan semakin meningkatkan ketepatan sasaran dari program subsidi. Sedangkan untuk subsidi listrik, FPKB mendorong pemerintah untuk mengkaji kembali bahwa subsidi listrik berdasarkan DTKS, mengingat data DTKS belum solid dan juga banyak rumah tangga miskin, khususnya yang merupakan pelanggan R1 450 VA yang belum masuk kedalam DTKS.

Terkait dengan belanja **Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2022**, pemerintah didalam Nota Keuangan belum menyebutkan secara spesifik detail kegiatan akan dilanjutkan seperti apa, namun anggarannya sudah dicadangkan pada **Program Pengelolaan Belanja Lainnya** sebesar Rp 230 Triliun. FPKB pada prinsipnya mendukung apabila program Pemulihan Ekonomi Nasional tahun 2022 tetap dijalankan dengan catatan bahwa anggaran tidak diperuntukkan hanya untuk sektor esensial yang mendukung percepatan penanggulangan Covid-19 dan menjaga serta meningkatkan daya beli masyarakat. Untuk itu, FPKB mendorong agar Program PEN ini dijalankan secara efektif sehingga mulai bidang kesehatan hingga insentif usaha bisa berjalan beringan, serta perlindungan sosial dapat diarahkan kepada program yang lebih produktif.

Mengenai alokasi anggaran **Belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa** yang direncanakan sebesar Rp 770,4 triliun harus bisa menjadi *trigger* dalam melakukan pemulihan ekonomi di daerah akibat dari pandemi covid 19. Dana **Transfer ke Daerah** sebesar Rp.673,7 triliun dalam RAPBN 2022 yang dibagi *pertama*, Dana Perimbangan yaitu **Dana Transfer Umum** (Dana Bagi Hasil/ DBH dan Dana Alokasi Umum/ DAU) dan **Dana Transfer Khusus** (DAK Fisik dan DAK Non Fisik). Dana Perimbangan meningkat sebesar 1,4 persen dari Rp 664,4 Triliun pada outlook 2021 menjadi Rp 673,7 Triliun pada 2021. Terkait dengan **DAU**, FPKB mendorong agar pemerintah melakukan reformulasi DAU dengan menitikberatkan pada jumlah penduduk di daerah agar pelayanan masyarakat dapat lebih maksimal dan lebih mencerminkan keadilan. Selain itu, terkait dengan DAU yang akan disalurkan berbasis kinerja, FPKB mendukung langkah tersebut agar anggaran di daerah dapat menghasilkan pelayanan pemerintah daerah yang optimal untuk kesejahteraan masyarakat. Namun perlu diperhatikan kesiapan daerah agar terhadap daerah yang masih memiliki kinerja rendah tetap bisa mendapatkan alokasi Dana Alokasi Umum yang cukup untuk menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat.

Kedua, **Dana Insentif Daerah (DID)** menurun sebesar 47 persen dari outlook 2021 menjadi Rp 7 Triliun di tahun 2022. Di tahun pemulihan ekonomi ini, FPKB mendorong agar pemerintah memberikan prioritas DID kepada pemerintah daerah yang memenuhi persyaratan-persyaratan yang terkait dengan pelayanan publik seperti pendidikan, utamanya dalam menunjang Pembelajaran Jarak Jauh dan kesehatan, serta yang sudah memiliki tingkat vaksinasi yang tinggi terhadap warganya. Serta *ketiga*, **Dana Otonomi Khusus** dan **Dana Keistimewaan DIY** yang masing-masing dialokasikan sebesar Rp 20,4 Triliun dan Rp1,3 Triliun pada tahun 2022. Terkait Dana Otonomi Khusus, FPKB mendorong pemerintah untuk melakukan penguatan perencanaan dan penganggaran,

mendorong kualitas penyerapan anggaran, serta penguatan akuntabilitas pelaporan sudah mendesak dilakukan.

Sedangkan anggaran **Dana Desa** ditargetkan sebesar Rp.68,0 triliun dalam RAPBN 2022, mengalami penurunan sebesar Rp3,8 Triliun atau 5,4 persen dibandingkan dengan outlook tahun 2021. FPKB sangat menyayangkan dengan penurunan alokasi dana desa ini, mengingat anggaran desa sangat bermanfaat untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional. Sebagaimana kita ketahui, dimasa pandemi dana desa dipergunakan untuk BLT Dana Desa dan untuk program Padat Karya Tunai Desa yang mampu menjadi penyangga peningkatan angka pengangguran di masa pandemi. Oleh karena itu, FPKB meminta agar Dana Desa dapat ditingkatkan kembali untuk menggerakkan perekonomian di desa. Selain itu, FPKB juga mendorong agar prioritas dana desa digunakan untuk memperbaiki kelembagaan dan manajemen BUMDes agar dapat menjadi *buffer* perekonomian desa

3. FPKB memandang pelaksanaan kebijakan *fiskal ekspansif konsolidatif* dengan besaran **Defisit dan Pembiayaan Anggaran** pada tahun 2022 sebesar 4,85 persen dari PDB atau setara Rp868,02 triliun akan menjadi pertaruhan terhadap kredibilitas Pemerintah dalam melakukan pengelolaan keuangan negara. Terlebih sesuai mandat yang diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2020 bahwa batas akhir dizinkannya defisit APBN di atas 3 persen hanya sampai pelaksanaan APBN tahun 2022 nanti. Mengingat APBN juga merupakan instrumen *countercyclical* dalam menjaga stabilitas makroekonomi, maka pemerintah harus segera memiliki solusi yang lebih riil melaksanakan konsolidasi fiskal terutama menjaga laju defisit APBN dan defisit kesimbangan primer di tahun 2022 ditargetkan sebesar Rp.462,2 triliun bisa semakin melandai di tahun berikutnya. Pembiayaan anggaran yang terdiri dari **Pembiayaan Utang** sebesar Rp973,6 triliun, **Pembiayaan Investasi** sebesar minus Rp182,3 triliun, **Pemberian Pinjaman** sebesar Rp0,6 triliun dan **Kewajiban Penjaminan** sebesar minus Rp1,1 triliun serta **Pembiayaan Lainnya** sebesar Rp77,3 triliun harus dikelola secara cermat, terukur dan hati-hati.

FPKB berpendapat rencana sumber pembiayaan anggaran tahun 2022 dari **Pembiayaan Utang maupun Non Utang** harus dioptimalkan untuk mendukung program-program pemulihan ekonomi serta penguatan reformasi di berbagai aspek kebijakan. FPKB meminta pemerintah terus konsisten dalam menjaga disiplin fiskal agar tetap *manageable* dan aman bagi keberlangsungan fiskal jangka menengah panjang. Khususnya didalam menjaga keseimbangan biaya (*cost*) dan risiko (*risk*) dengan melakukan diversifikasi portofolio utang dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan APBN, terutama terhadap pengelolaan SBN karena sangat rentan dengan pergolakan pasar dan risiko *crowding out*. FPKB terus mendukung upaya pemerintah mendorong pembiayaan non utang selain sebagai instrumen untuk menutup defisit APBN, diarahkan dapat meningkatkan *value creation* agar dampak dan *spillover effects* yang dihasilkan dari alokasi pembiayaan non-utang bisa lebih besar dari *cost of funds* untuk pembiayaan penerbitan SBN.

Saudara Pimpinan, Anggota Dewan, Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Serta Hadirin Yang Terhormat,

Demikianlah Pemandangan Umum Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa terhadap RUU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 beserta Nota Keuangannya. FPKB sangat menyadari bahwa tantangan Pemerintah dalam mengelola keuangan negara semakin berat terutama dalam masa pandemi ini, oleh karena itu FPKB meminta komitmen pemerintah bahwa sekiranya tidak sanggup memenuhi seluruh target pembangunan tersebut maka tetap harus ikhtiyar semampunya mengerjakan yang bisa dilakukan sebagaimana kaidah fiqh:

مَا لَا يَنْزِعُ اللَّهُ إِلَّا يُرْسِدْكُمْ عَلَيْهِ

(Apa-apa yang tidak bisa dilakukan semuanya, jangan ditinggalkan semuanya)

Selanjutnya dengan mengucapkan *Bismillahirrahmanirrahim*, maka Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menyatakan persetujuannya agar RUU APBN TA 2022 beserta Nota Keuangannya ini dapat dibahas pada tahap selanjutnya sesuai dengan prosedur, mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

Atas segala perhatian yang diberikan, maka kami mengucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kesalahan. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan keridhoannya. Aamiin.

***Wallahul Muwaffiq Ilaa Aquwamith Thoriq,
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.***

Jakarta, 19 Agustus 2021

**PIMPINAN,
FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA DPR-RI**



H. Cucun Ahmad Samsurizal M.A.PP - RI
Ketua Fraksi PKB DPR RI

Drs. Fathan
Sekretaris Fraksi PKB DPR RI



FRAKSI PARTAI DEMOKRAT

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA



PANDANGAN
FRAKSI PARTAI DEMOKRAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
ATAS RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2022
BESERTA NOTA KEUANGANNYA

Disampaikan oleh : RIZKI AULLIA RAHMAN NATAKUSUMAH
Nomor Anggota : A-560

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh.

Salam sejahtera bagi kita semua,

Om Swastiastu,

Namo Buddhaya,

Salam kebajikan.

Demokrat Bersama Rakyat!

Yang terhormat

- Pimpinan DPR RI,
- Para Anggota DPR RI dan hadirin yang kami hormati,
- Menteri Keuangan RI Beserta Jajaran,
- Menteri Hukum dan HAM RI Beserta Jajaran,
- Menteri PPN/Kepala BAPPENAS RI Beserta Jajaran.
- Rekan-rekan media dan hadirin yang kami hormati baik yang hadir secara fisik maupun virtual

Puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahuwataala, Tuhan Yang Maha Esa, kami panjatkan atas rahmat dan karunia-Nya, karena hingga hari ini kita masih diberi anugerah kesehatan dan keselamatan, ditengah pandemi Covid 19 yang masih melanda negeri tercinta. Dalam kesempatan ini, Fraksi Partai Demokrat akan menyampaikan Pandangan Umum Fraksi atas RUU tentang APBN 2022 beserta

Nota Keuangannya, sebagaimana telah disampaikan dalam Pidato Kenegaraan Presiden RI Joko Widodo pada hari Senin, 16 Agustus 2021, dalam Rapat Paripurna di Gedung DPR/MPR RI. Masih dalam suasana Hari Kemerdekaan, semoga membawa berkah bagi Bangsa Indonesia. Dirgahayu Indonesial

SAUDARA PIMPINAN, PARA ANGGOTA DEWAN, JAJARAN KEMENTERIAN RI SERTA HADIRIN YANG KAMI HORMATI,

APBN tahun anggaran 2022 menjadi masa transisi bagi Pemerintah untuk memasuki APBN tahun 2023 dimana ambang batas defisit maksimal akan kembali ke angka maksimal 3 persen. Namun, sejak Juni 2021, pandemi Covid-19 di Indonesia memasuki fase baru dimana varian Delta dengan cepat menyebar di Indonesia, rekor tertinggi yakni 56 ribu pasien terkonfirmasi positif dalam satu hari. Pemerintah pada akhirnya menarik rem darurat dengan diterapkan PPKM Darurat selama 2 minggu, sejak awal Juli 2021, yang sampai saat ini masih diperpanjang dan dievaluasi secara berkala.

FPD mendorong kepada Pemerintah untuk terus mengkampanyekan disiplin dan ketaatan menjaga protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, menghindari kerumunan, menjaga jarak, serta membatasi mobilitasi. Selain itu, upaya *testing, tracing* dan *treatment* kepada setiap kontak erat pasien positif baru untuk mengendalikan laju penyebaran covid-19 harus ditingkatkan.

Program vaksinasi sebagai *game changer* dalam menghadapi pandemi harus ditingkatkan capaiannya. Distribusi vaksin perlu mendapatkan perhatian agar lebih cepat dan menyeluruh. Per tanggal 17 Agustus 2021, capaian vaksin dengan dosis lengkap (2 dosis) telah mencapai angka 28,8 juta penduduk dengan kecepatan penambahan harian sebesar 700 ribu dosis. Walaupun realisasinya belum mencapai target sebanyak satu juta vaksinasi per hari, FPD tetap memberi apresiasi terhadap upaya Pemerintah untuk mengentaskan Indonesia dari keterpurukan akibat pandemi. Kita sadar bahwa kesuksesan penyelenggaraan APBN dan Kebijakan-kebijakan yang menyertainya sangat bergantung pada kemampuan kita mengendalikan pandemi ini.

SAUDARA PIMPINAN, PARA ANGGOTA DEWAN, JAJARAN KEMENTERIAN RI SERTA HADIRIN YANG KAMI HORMATI,

Dengan semangat kebangsaan yang tidak pernah padam, marilah kita semua bergandengan tangan bersatu demi kepentingan rakyat Indonesia. Pandemi Covid-19 memaksa Pemerintah untuk lebih bekerja keras dengan *extra effort* untuk mewujudkan setiap kerja dan kebijakan yang dicanangkan.

Upaya Pemerintah untuk meningkatkan pemerataan kesejahteraan penduduk, meningkatkan SDM Unggul, Berintegritas dan Berdaya Saing serta melanjutkan pembangunan infrastruktur masih menghadapi tantangan yang terjal. Untuk itu, **Fraksi Partai Demokrat memberikan beberapa catatan sebagai berikut:**

1. Terkait Asumsi Makro, Defisit dan Pembiayaan RAPBN 2021, Fraksi Partai Demokrat memberikan catatan sebagai berikut:
 - a. Asumsi pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan sebesar 5,0-5,5 persen adalah target yang optimis di tengah ketidakpastian yang masih tinggi. Hal utama yang menjadi kendala adalah pandemi Covid-19 yang diperkirakan masih melanda dunia sampai pertengahan 2022 sebagaimana rilis yang disampaikan WHO. Konsistensi dan fokus pemerintah dalam penanganan Covid 19 melalui pelaksanaan vaksinasi dan penerapan protokol kesehatan menjadi salah satu kunci berhasilnya pemerintah untuk mencapai target optimis pertumbuhan 5 persen. FPD meminta Pemerintah untuk tetap mendorong kembali aktivitas perekonomian dan menjaga daya beli masyarakat serta memastikan perekonomian kembali berjalan agar kesejahteraan masyarakat juga membaik. Perbaikan pada aktivitas perekonomian akan mendorong terbukanya lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
 - b. Proyeksi inflasi tahun 2022 sebesar 3 persen merupakan target yang realistis, namun pemerintah diharapkan tidak hanya fokus pada pencapaian inflasi rendah, yang perlu menjadi perhatian adalah bagaimana meningkatkan kembali permintaan dan daya beli masyarakat yang semakin terpuruk pada masa pandemi serta mendorong kembali kelangsungan dunia usaha, industri

- dan UMKM yang berimplikasi pada penyerapan tenaga kerja dan pengurangan kemiskinan.
- c. Nilai tukar rupiah terhadap dolar diperkirakan bergerak pada kisaran Rp14.350 per US Dollar. Merupakan target yang cukup realistis, namun perlu diwaspadai terjadinya pembalikan arus modal, ketika Bank Sentral Amerika menghentikan kebijakan QE seiring dengan pemulihan ekonomi dan pandemi yang dapat diatasi. Dengan situasi tersebut nilai tukar rupiah pasti akan tertekan. Mencermati hal tersebut, FPD meminta kepada pemerintah bersama BI perlu menyiapkan mitigasi resiko pembalikan arus modal, jika pada tahun 2022 terjadi perubahan kebijakan moneter Amerika serikat dengan menghentikan kebijakan QE yang diikuti dengan kenaikan suku bunganya.
- d. Proyeksi harga minyak mentah Indonesia (ICP) tahun 2022 yang ditargetkan pada angka US\$ 63 per barel masih memiliki kemungkinan berubah karena dinamika politik global dan geopolitik seringkali mempengaruhi harga minyak. FPD meminta Pemerintah untuk senantiasa responsif dalam mengambil kebijakan harga minyak di tengah ketidakpastian tersebut.
- e. Terkait *lifting* minyak dan gas, dengan realisasi *lifting* yang setiap tahun mengalami penurunan, FPD meminta Pemerintah untuk adaptif dalam mengambil kebijakan, dan agar dapat mulai beralih ke sumber energi baru dan terbarukan serta mengembangkan *green economy* yang dapat berdampak baik bagi lingkungan di masa depan. Dengan energi yang kian terbatas, dan semakin mahal, Pemerintah perlu menggalakan kembali Gerakan Hemat Energi.
- f. Suku Bunga SUN 10 tahun ditargetkan pada angka 6,82%. Pemerintah berkepentingan untuk memperoleh dan menjaga suku bunga SUN relatif lebih rendah, sehingga bunga utang dan *yield* surat utang pemerintah tidak menjadi beban APBN. FPD meminta kepada pemerintah dalam penerbitan surat utang untuk pembiayaan APBN 2022 dapat diperoleh tingkat suku bunga yang lebih rendah.

g. Besaran defisit APBN 2022 diproyeksikan sebesar 4,85 persen atau sekitar Rp. 868 triliun, menjadi masa transisi bagi pemerintah untuk mencapai konsolidasi fiskal tahun 2023 dengan masimum defisit 3 persen. FPD dapat memahami bahwa belanja pemerintah akan sulit diturunkan ditengah ketidakpastian berakhirnya pandemi. Dengan ruang ekspansi fiskal yang semakin sempit, FPD meminta pemerintah tetap fokus pada penanganan pandemi dan memulihkan kesehatan masyarakat yang diikuti dengan program pemulihan ekonomi dan dunia usaha.

h. Terhadap kebijakan Utang Negara, Pemerintah perlu berhati-hati mengelola utang. Semakin besar utang yang dimiliki, maka konsekuensinya adalah semakin besarnya pengeluaran negara untuk membayar cicilan pokok dan bunga utang, hal ini bisa semakin menurunkan *fiscal space* yang bisa digunakan untuk belanja produktif dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

2. Terkait Penerimaan Negara, FPD memahami bahwa situasi perekonomian masih dalam kondisi sulit. Proses pemulihan ekonomi perlu terus dilakukan untuk mengembalikan kekuatan perekonomian. Insentif perpajakan harus dilakukan oleh Pemerintah dengan hati-hati dan terukur agar memiliki daya ungkit terhadap perekonomian. Perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan, integrasi data perpajakan dan perbaikan tata kelola perpajakan harus benar-benar diwujudkan Pemerintah melalui kerja konkret agar Penerimaan Negara sektor Perpajakan bisa tumbuh, *tax ratio* meningkat dan tidak mengalami *Shortfall*. Perlu juga dipertimbangkan adanya sistem *punishment and reward* dalam pemungutan pajak. Selain itu, Penerimaan negara sektor PNBP perlu ditingkatkan dengan tidak meninggalkan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah perlu tindakan yang *extraordinary* agar target peningkatan penerimaan negara melalui Perpajakan dan PNBP bisa tercapai.

3. Terhadap rencana Belanja Negara, Pemerintah perlu dengan ketat menentukan skala prioritas kebijakan yang sesuai serta mengedepankan prinsip *spending better*. Penanganan covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional harus menjadi prioritas utama. Pemerintah sebaiknya menunda program-program yang sifatnya kurang mendesak, seperti rencana pemindahan Ibu Kota Negara. Pemerintah juga perlu mengurangi potensi inefisiensi belanja negara dengan mengurangi belanja-belanja yang sifatnya dukungan manajemen serta mengalihkannya kepada belanja-belanja produktif dan memicu daya ungkit aktivitas ekonomi dan daya beli masyarakat.

FPD mengingatkan kepada Pemerintah agar terus melakukan upaya perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan miskin di Indonesia. Bantuan sosial, Transformasi Subsidi, Jaring Pengaman Sosial, serta stimulus perekonomian perlu ditekankan agar disalurkan dengan tepat sasaran, sesuai dengan DTKS (tidak berganda), sehingga program perlindungan sosial benar-benar membantu masyarakat untuk berahan hidup dan meningkatkan daya beli masyarakat. FPD meminta kepada Pemerintah untuk menyoroti *moral hazard* yang masih terjadi di tengah situasi sulit yang dihadapi Bangsa, *Ojo Korupsi Ojo Ngapusi*, Perilaku korupsi pada situasi krisis justru mencederai hati nurani rakyat.

4. Alokasi anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) diharapkan bisa diarahkan untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Upaya Pemerintah untuk membentuk SDM Unggul bisa dilakukan melalui pemanfaatan dana TKDD untuk peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan dan infrastruktur daerah. FPD meminta Pemerintah untuk meningkatkan harmonisasi dan sinergitas kebijakan penganggaran pusat dan daerah agar kebijakan TKDD bisa untuk mempercepat kinerja serta mendorong peran daerah yang lebih besar dalam pemulihan ekonomi terutama dalam rangka peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial dan penanganan covid-19 di daerah. Pemerintah Daerah juga diharapkan diberikan peran lebih besar dalam mengelola dana TKDD karena yang mengetahui potensi daerah adalah Pemerintah Daerah sehingga potensi ekonomi daerah dapat tergali dengan optimal.

Terhadap banyaknya temuan dana mengendap di kas daerah, FPD berharap Dana Daerah agar benar digunakan sesuai kepentingan daerah untuk kepentingan masyarakat luas, sehingga kepala daerah diharapkan lebih produktif dan kreatif dalam mengelola dana daerah secara aman dan terukur, agar perekonomian daerah lebih terpacu dan terakselerasi .

Berdasarkan catatan diatas, maka Fraksi Partai Demokrat menyampaikan rekomendasi untuk menjadi perhatian Pemerintah, yaitu:

1. FPD meminta kepada pemerintah dalam pelaksanaan APBN 2022 tidak hanya fokus pada pencapaian target pertumbuhan ekonomi 5 persen, namun yang lebih penting adalah bagaimana peran APBN pada penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan perekonomian, sebagaimana tujuan diterbitkannya Perppu No 1 tahun 2020. Meskipun Presiden sudah menegaskan bahwa dilakukan kebijakan Gas dan Rem, FPD berharap agar penanganan kesehatan tetap menjadi fokus utama karena sumber ketidakpastian saat ini adalah virus Covid-19. *Putting people's health and safety first*. Jika pemulihan kesehatan masyarakat dan pengendalian pandemi Covid-29 dapat berjalan dengan baik, maka akselerasi pembangunan ekonomi dan peningkatan kinerja dunia usaha bisa lebih cepat dijalankan dalam rangka pemulihan ekonomi nasional..

2. FPD meminta Pemerintah untuk mengarahkan kebijakan belanja negara yang memiliki *multiplier effect* yang kuat terhadap perekonomian serta efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. belanja negara harus diarahkan untuk berorientasi pada hasil, efektif, efisien, terukur, dan teruji sehingga pelaksanaan anggaran tidak sekedar *business as usual*. Reformasi struktural hendaknya dijalankan oleh Pemerintah dengan *monitoring* dan evaluasi secara berkala sehingga berbagai kendala dan dampak negatif yang mungkin muncul dalam penerapannya bisa segera diatasi yang berimplikasi pada perbaikan struktur kesejahteraan masyarakat.

3. FPD meminta kebijakan Belanja Subsidi diarahkan agar lebih tepat sasaran, Pemerintah harus memperhatikan dan bersungguh-sungguh dalam mensosialisasikan transformasi subsidi LPG 3 kg dan Listrik menjadi subsidi langsung, sebagai ganti hilangnya dana kompensasi di tahun 2022 sesuai hasil Panja Belanja Pemerintah Pusat dalam Pembahasan Pendahuluan RAPBN 2022 dan RDP Banggar tanggal 7 April 2021.

4. Kebijakan fiskal perlu diarahkan agar mampu mendorong terciptanya pengelolaan fiskal yang semakin sehat dan berdaya sehingga bisa mendukung pemantapan pemulihan ekonomi, melanjutkan program perlindungan sosial, meningkatkan mutu pendidikan, serta penguatan sistem kesehatan.

5. FPD meminta pemerintah memprioritaskan kebijakan yang *pro-growth* (pro pertumbuhan), *pro-poor* (pro kemiskinan), *pro-environment* (pro-lingkungan) dan *pro-job* (pro penciptaan lapangan kerja) agar tercipta lapangan kerja baru untuk mengurangi jumlah pengangguran yang meningkat karena pandemi Covid-19. Selain itu, perbaikan sistem pendidikan dan kualitas hasil pendidikan juga merupakan salah satu upaya meningkatkan kualitas SDM yang berintegrasi, unggul dan berdaya saing agar bangsa kita tidak mengalami Lost COVID Generation. Inklusifitas berkelanjutan melalui pendekatan *four tracks strategy* diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi guna mengurangi pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan distribusi pendapatan yang secara keseluruhan untuk menciptakan SDM Indonesia yang berkualitas.

SAUDARA PIMPINAN, PARA ANGGOTA DEWAN, JAJARAN KEMENTERIAN RI SERTA HADIRIN YANG KAMI HORMATI,

Berdasarkan pandangan yang telah kami sampaikan, Fraksi Partai Demokrat DPR RI menyatakan dapat menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 beserta nota keuangannya untuk dilanjutkan dalam pembahasan tingkat I dan II di DPR RI.

Kita masih harus melihat ke depan, bergandengan tangan agar negara yang kita cintai ini makin maju, makin rukun dan damai, makin adil dan makin sejahtera, kita harus memiliki visi dan pikiran cerdas serta mau bekerja keras tanpa lelah. Kita harus yakin, bahwa badai akan berlalu.

Harapan Rakyat, Perjuangan Demokrati!
Bersama Kita Kuat, Bersatu Kita Bangkiti!
Wabillahit Taufik Walhidayah, Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

JAKARTA, 19 AGUSTUS 2021
PIMPINAN FRAKSI PARTAI DEMOKRAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

K e t u a



DR. EDHIE BASKORO YUDHOYONO, M.Sc

Nomor Anggota: A-554



Sekretaris



MARWAN CIK ASAN, M.M.

Nomor Anggota : A-535

PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
ATAS
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2022 BESERTA NOTA KEUANGANNYA

Dibacakan oleh : Abdul Hakim Bafagih
Nomor Anggota : A-506
Daerah Pemilihan : Jawa Timur VIII



FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Gedung Nusantara I MPR / DPR - RI, Lt. 20 Ruang 2009
Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270 INDONESIA
Telp. : (+6221) 575 5810, 575 5812 Fax. : (+6221) 575 5811



PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA ATAS RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2022 BESERTA NOTA KEUANGANNYA

Dibacakan oleh : Abdul Hakim Batagih
Nomor Anggota : A-506
Daerah Pemilihan : Jawa Timur VIII

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Salam sejahtera untuk kita semua

Pimpinan dan Anggota Dewan Yang Kami Hormati
Saudara Menteri Keuangan RI Yang Kami Hormati
Saudara Menteri Hukum dan HAM RI Yang Kami Hormati
Saudara Menteri PPN/Kepala Bappenas RI Yang Kami Hormati
Saudara Gubernur Bank Indonesia Yang Kami Hormati

Marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karuniaNya, kita diberikan kesehatan sehingga dapat menghadiri Paripurna pada hari ini, dalam rangka penyampaian Pandangan Fraksi-Fraksi atas Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 Beserta Nota Keuangannya, di tengah pandemi Covid-19 yang masih berlangsung hingga saat ini.

Pada kesempatan yang sangat berharga ini, Fraksi PAN juga mengucapkan Dirgahayu Kemerdekaan RI ke-76. Semoga bangsa kita menjadi bangsa yang *gemah ripah loh jinawi, baldatun thoyyibatun wa robbun ghofur*. Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh, Indonesia Amanah. Dan kita berdoa semoga bangsa Indonesia segera terbebas dari pandemi Covid-19. *Aamiin*.

Pimpinan dan Anggota Dewan Yang Kami Hormati
Saudara Menteri Yang Kami Hormati

Fraksi PAN melihat bahwa Nota Keuangan dan RAPBN 2022 disusun oleh pemerintah dengan sebuah asumsi dasar yang sangat vital, tapi tidak dinyatakan secara tegas dan eksplisit. Asumsi vital tersebut adalah bahwa pemerintah optimis *herd immunity* atau kekebalan komunal akan tercapai sebelum tahun 2022 sehingga pandemi teratasi sejak awal 2022.

Terkait hal ini Fraksi PAN mengingatkan bahwa meski jumlah kasus harian COVID-19 menunjukkan tren penurunan di bulan Agustus 2021, jika dilihat dari “status transmisi”nya, Indonesia masih berada dalam transisi dari zona merah menuju zona kuning pandemi. Ini adalah evaluasi Fraksi PAN berdasarkan “status transmisi” sesuai ilmu kesehatan publik dan ekonomi kesehatan. Sebagai misal, pada tanggal 16 Agustus 2021 elastisitas produksi kesehatan kasus harian COVID-19 masih sebesar 3,24. Memang jauh menurun dibandingkan puncaknya yang sebesar 9,61 pada tanggal 16 Juli 2021. Namun elastisitas yang lebih besar dari satu (>1.0) itu menunjukkan status transmisi yang masih tinggi, yang membutuhkan pembatasan sosial selama *herd immunity* atau kekebalan komunal belum tercapai.

Di sisi lain, Fraksi PAN melihat bahwa perkembangan vaksinasi di Indonesia masih relatif lambat. Per tanggal 16 Agustus 2021, jumlah penduduk Indonesia yang sudah menerima minimal sekali suntikan vaksin adalah 55,1 juta. Namun jumlah penduduk yang sudah divaksin penuh baru 29,19 juta atau 10,8% dari populasi. Ini masih jauh di bawah rata-rata dunia yang sebesar 23,8% pada tanggal yang sama. Padahal, program vaksinasi ini sudah berjalan sejak 13 Januari 2021, atau sudah 7 bulan lebih. Di sisi lain Kementerian Keuangan kemarin (18/8) menyatakan menargetkan 70% penduduk sudah tervaksinasi pada akhir tahun 2021. Fraksi PAN menghitung, dengan target itu berarti kecepatan vaksinasi harus dinaikkan 8,5 kali lipat dari kinerja selama periode 13 Januari – 16 Agustus 2021.

Itu sebabnya Fraksi PAN mengingatkan agar pemerintah secara ketat memonitor dua variabel: (1) status transmisi COVID-19, dan (2) cakupan vaksinasi penuh. Pemerintah perlu memastikan bahwa status transmisi berada pada level rendah dan cakupan vaksinasi mencapai level kekebalan komunal. Jika kedua hal ini belum tercapai per 1 Januari 2022, Fraksi PAN menyarankan pemerintah memasukkan skenario di mana asumsi ekonomi dan rencana program dalam Nota Keuangan dan RAPBN 2022 disesuaikan dengan capaian dari kedua variabel tersebut.

Fraksi PAN memberi dukungan penuh kepada pemerintah untuk dapat melakukan penyesuaian anggaran secara fleksibel dan cepat melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 dengan tujuan mempercepat penanganan pandemi Covid—19 dan pemulihan ekonomi nasional. Hadirnya undang-undang tersebut harus digunakan secara bijaksana dan bertanggungjawab. Fraksi PAN menegaskan akan terus mengawal

pelaksanaan undang-undang tersebut agar tidak menyimpang dari tujuan utamanya dan berhasil mencapai sasaran sebagaimana yang telah menjadi komitmen Pemerintah dan DPR.

Pimpinan dan Anggota Dewan Yang Kami Hormati

Saudara Menteri Yang Kami Hormati

Setelah memperhatikan pidato nota keuangan yang disampaikan Presiden Republik Indonesia Bapak Ir Joko Widodo secara seksama tentang Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2022, maka Fraksi PAN memberikan beberapa catatan sebagai berikut:

- **Pertumbuhan Ekonomi**

Fraksi PAN menilai bahwa pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan Pemerintah sebesar 5,0% – 5.5% hanya bisa tercapai jika status transmisi COVID-19 rendah dan kekebalan komunal tercapai. Jika kedua hal ini tidak tercapai, maka perkiraan pertumbuhan tersebut terlalu optimis, bahkan kurang realistis. Ada beberapa hal yang harus diingat pemerintah, di antaranya: *pertama*, ketidakpastian akibat pandemi covid-19 masih tinggi. Angka terpapar dan angka kematian covid-19 hingga pertengahan Agustus 2021 masih tinggi. Cakupan vaksinasi penuh masih rendah, jauh di bawah rata-rata dunia. Fraksi PAN mengapresiasi pada kuartal kedua 2021 angka pertumbuhan kita sangat tinggi 7.07%. Namun tak lama kemudian Pemerintah memberlakukan PPKM darurat, sehingga bisa kita perkirakan pertumbuhan semester ketiga akan setinggi semester kedua.

Kedua, masih belum Bergeraknya sektor manufaktur dan komersial akibat PPKM. Sudah menjadi rahasia umum bahwa manufaktur merupakan salah satu kontributor bagi pertumbuhan ekonomi, namun 'mati suri' sejak PPKM darurat diberlakukan hingga sekarang. *Ketiga*, butuh dukungan pemulihan di sektor konsumsi, investasi dan ekspor secara bersamaan.

Jika status transmisi dan cakupan vaksinasi tidak membaik dengan signifikan, Fraksi PAN berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi yang realistis di tahun 2022 berada pada kisaran 4.0 %. Pandangan Fraksi PAN ini didasarkan pada asumsi bahwa pertumbuhan ekonomi tahun 2022 sangat erat kaitannya dengan kemampuan pemerintah menanggulangi pandemi Covid-19, khususnya meredam penyebaran Covid 19 dan mempercepat proses vaksinasi, mendorong daya beli masyarakat, meningkatnya permintaan dari pasar tujuan ekspor, *recovery* dari rantai pasok global, dan tantangan lainnya yang dapat menghambat upaya pemerintah untuk menciptakan iklim pertumbuhan ekonomi tinggi.

Mengingat banyaknya variable di atas yang berada di luar kontrol pemerintah, Fraksi PAN mengusulkan agar Pemerintah menuntaskan penanganan covid-19 di antaranya melalui vaksinasi, jaring pengaman sosial, dan lainnya. Penanganan covid-19 ini harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan dengan pengawasan yang sangat ketat, agar tidak ada ruang praktik korupsi. Selanjutnya Fraksi PAN juga mendorong agar belanja pemerintah bisa lebih dioptimalkan dan penyerapan anggaran bisa dipercepat sehingga tingkat konsumsi masyarakat dapat meningkat sedini mungkin. Apalagi diketahui bahwa belanja pemerintah merupakan satu-satunya faktor yang bisa mendorong laju pertumbuhan ekonomi di masa pandemi ini. Kami juga tegaskan kembali agar seluruh bantuan sembako yang diberikan sebagai bagian dari program jaring pengaman sosial disalurkan dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat sehingga dapat menggerakkan roda perekonomian nasional.

- **Penerimaan Perpajakan**

Pemerintah menargetkan penerimaan pajak tahun 2022 tumbuh sebesar Rp1.506,9 triliun. Keberadaan pajak sangat vital bagi penerimaan negara, namun selama ini penerimaan pajak terbukti selalu di bawah target. Pertumbuhan penerimaan pajak selama 2014 – 2020 rata-rata tumbuh 2,9% per tahun. Bahkan pertumbuhan perpajakan tahun 2019 (sebelum pandemi) hanya tumbuh 1,8%. Pemasukan pajak penghasilan yang ditetapkan pemerintah baik dari badan maupun individu relatif tinggi. Ini seperti buah simalakama pemerintah ingin menggenjot ekonomi, yang berimplikasi pada penerimaan pajak yang akan tinggi, tapi diisi lain sektor-sektor perekonomian kita masih belum pulih. Fraksi PAN menyarankan Kementerian Keuangan jangan hanya *business as usual* dalam menggenjot penerimaan negara, dan perlu lebih kreatif menggejar penerimaan negara memanfaatkan teknologi informasi dan informasi intelijen.

- **Reformasi Struktural**

Fraksi PAN meminta agar reformasi struktural jangan hanya mengandalkan pajak dari masyarakat, tapi juga dari BUMN. BUMN harus memberikan sumbangan yang signifikan dalam mendorong agenda-agenda reformasi struktural yang diusung pemerintah. Pemerintah sudah seharusnya menagih deviden dari BUMN. Selama pandemi BUMN telah mendapatkan bantuan Penyerahan Modal Negara (PMN) yang sangat besar dari pemerintah. Bantuan dari pemerintah seharusnya bisa terefleksikan pada kinerja BUMN, dalam bentuk kontribusi nyata melalui deviden untuk APBN. Namun yang terjadi justru sebaliknya, BUMN terus merugi. Share Kekayaan Negara (SKN) yang dipisahkan terhadap PNBP sejak 2019 sebesar

19,74 persen, di tahun 2020 sebesar 22.10 persen, dan di tahun 2021 sebesar 8,90 persen. BUMN harus menjadi bagian penting dari reformasi struktural.

- **Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)**

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun 2022 ditetapkan sebesar Rp333,2 triliun. Fraksi PAN meminta agar penetapan target ini harus didukung dengan berbagai kebijakan strategis yang dapat mengoptimalkan PNBP seperti PNBP SDA, dividen BUMN, PNBP pada Kementerian/Lembaga, dan PNBP pada BLU. Fraksi PAN juga mendorong agar pemerintah dapat segera menjalankan mandat Undang-Undang PNBP yang baru. Maka dari itu, pemerintah diharapkan dapat segera menyelesaikan peraturan turunan atas undang-undang tersebut sehingga rencana kerja atas PNBP dapat tergambar pada tahun mendatang.

- **Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)**

Target alokasi Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di tahun 2022 sebesar Rp321,2 T atau turun sebesar 56 persen dari tahun 2021 sebesar Rp744,45 triliun. Fraksi PAN memandang stimulus PEN ini sangat penting dalam mempercepat pemulihan ekonomi nasional yang pada gilirannya akan memperbaiki kinerja penerimaan perpajakan pada tahun depan. Meskipun alokasi PEN 2022 lebih rendah, tetapi Fraksi PAN meminta Pemerintah agar segera memastikan serapan PEN lebih maksimal mengingat saat ini penyerapan PEN baru mencapai 43 persen atau setara 320,3 triliun dari total pagu PEN per Agustus 2021. Fraksi PAN mendorong agar realisasi PEN mengutamakan pada bidang Kesehatan, yang saat ini sudah terealisasi sebesar 76,64 triliun atau 34,7 persen dari pagu sebesar 214,96 triliun. Anggaran tersebut harus digunakan untuk kepentingan 3T (testing, tracing, treatment), insentif nakes, pengadaan vaksin, insentif pada Kesehatan, dan lain-lain. Juga perlu mendorong realisasi kluster perlindungan social yang saat ini sudah mencapai 97,18 triliun atau 52,1 persen dari pagu sebesar 186,64 triliun, di mana anggaran tersebut digunakan untuk program bantuan social, bantuan subsidi upah, dan lain-lain, yang harus dimanfaatkan dan dioptimalkan dengan tepat sasaran. Untuk optimalisasi pencapaian, Fraksi PAN mendorong agar dilakukan akurasi data.

- **Perlindungan Sosial (Perlinsos)**

Fraksi PAN mengapresiasi program perlinsos yang dijalankan oleh pemerintah dalam menghadapi pandemi COVID-19. Dalam RAPBN 2022, pemerintah merencanakan perlinsos melalui belanja K/L pemerintah pusat berupa: (1) Program Keluarga Harapan bagi 10 juta KPM, sebesar Rp28.709,8 miliar; (2) Program Kartu Sembako bagi 18,8 juta KPM, sebesar Rp45.120,0 milyar; (3)

Program Indonesia Pintar bagi 20,2 juta siswa, sebesar Rp11.113,8 miliar; (4) Program KIP Kuliah bagi 650,6 ribu mahasiswa, sebesar Rp9.662,6 miliar; dan (5) bantuan iuran PBI JKN bagi 96,8 juta jiwa, sebesar Rp46.464,0 miliar. Perinsos melalui belanja non-K/L pemerintah pusat: (1) Subsidi listrik kepada 37,9 juta pelanggan, sebesar Rp56.479,9 miliar; (2) Subsidi LPG tabung 3 Kg dengan volume 8,0 juta Metrik Ton, sebesar Rp66.254,5 miliar; (3) Program Kartu Prakerja, sebesar Rp11.000,0 miliar; (4) penyaluran subsidi bunga KUR sebesar Rp23.100,0 miliar; dan (5) dukungan Pemerintah untuk Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) sebagai amanat UU Cipta Kerja. Selain melalui Belanja Pemerintah Pusat, dukungan anggaran perlindungan sosial melalui TKDD diberikan melalui pemberian bantuan langsung tunai (BLT) desa kepada 7,55 juta keluarga di pedesaan, sebesar Rp27.200,0 miliar.

Namun Fraksi PAN secara khusus mengingatkan Presiden bahwa anggaran Perinsos itu sangat rentan KKN, sangat berisiko tidak tepat sasaran dan tidak tepat manfaat. Karena itu, Fraksi PAN menyarankan agar Presiden mengembangkan sistem pengawasan dan pengendalian yang efektif untuk menjamin dana Perinsos 2022 sebesar Rp 427,5 triliun benar-benar tidak dikorupsi, tepat sasaran dan tepat manfaat. Fraksi PAN juga menyarankan agar pemerintah meninjau ulang rencana pengurangan anggaran Perinsos 2022 sebesar Rp 60,3 triliun, khususnya jika status transmisi dan cakupan vaksinasi tidak sesuai harapan.

- **Belanja Pemerintah Pusat**

Belanja pemerintah pusat tahun anggaran 2022 ditargetkan sebesar Rp1.938,3 triliun, atau lebih rendah dari tahun 2021 sebesar 1.951,3 triliun. Fraksi PAN memahami telah terjadi penurunan belanja modal pemerintah. Namun demikian, Pemerintah harus tetap mengoptimalkan belanja modal tersebut sesuai dengan kebutuhan yang mendesak untuk masyarakat. Sebab, realisasi belanja modal dari tahun ke tahun memperlihatkan serapan yang minim. Menurut laporan Kementerian Keuangan, realisasi belanja negara baru mencapai 2.306,71 triliun atau 84,2 persen. Fraksi PAN berkomitmen untuk terus mengawal perkembangan belanja modal di pemerintah pusat yang notabene sangat penting sekali untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional di tengah pandemi saat ini.

- **Transfer ke Daerah dan Dana Desa**

Transfer ke daerah dan dana desa tahun 2022 dialokasikan sebesar Rp770,4 triliun, atau turun dari sebelumnya sebesar 796,3 triliun pada tahun 2021. Meskipun terjadi pengurangan belanja transfer ke daerah dan dana desa

tersebut, Fraksi PAN meminta agar pemerintah pusat dapat mengoptimalkan dan mengarahkan pemanfaatan belanja transfer ke daerah dan dana desa untuk pemulihan kesehatan, perlindungan sosial dan ekonomi masyarakat serta peningkatan vaksinasi masyarakat. Fraksi PAN juga mendorong agar dana desa dapat difokuskan untuk beberapa program prioritas seperti padat karya tunai, pemberdayaan UKM dan sektor usaha pertanian, transformasi ekonomi desa melalui desa digital, dan peningkatan peran BUMDesa.

- **Penurunan Angka Kemiskinan**

Pemerintah menargetkan penurunan angka kemiskinan dari 10,19 persen menjadi 8,5 persen. Fraksi PAN menilai, target tersebut cukup realistis jika pandemi sudah terkendali dan roda perekonomian dapat berjalan normal, baik dunia usaha maupun konsumsi. Data BPS pada Maret 2021 menunjukkan, angka kemiskinan masih sebesar 10,19 persen atau 27,54 juta orang. Untuk menurunkan angka tersebut, ada hambatan yang sangat jelas yaitu kemiskinan yang tersebar di berbagai daerah. Untuk mengatasi kemiskinan yang tersebar itu, maka diperlukan komitmen yang kuat dan tanggung jawab bersama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Setiap daerah memiliki problematika yang berbeda. Di tengah pandemi yang tak kunjung usai ini, pemulihan belum tentu bisa dilakukan secara merata di semua daerah. Bagi daerah-daerah yang sudah berhasil melakukan vaksinasi secara massif dan mereta di daerahnya, aktivitas ekonomi sudah tentu bisa mulai dilakukan secara normal. Diharapkan Pendapat Asli Daerah (PAD) sudah bisa pulih, sehingga APBD kembali normal dan digunakan untuk menurunkan angka kemiskinan. Tetapi bagi daerah-daerah, khususnya daerah luar Jawa yang masih mengalami lonjakan covid, tentu belum dapat meningkatkan kapasitas fiskalnya, sehingga belum dapat menurunkan angka kemiskinan.

Pimpinan dan Anggota Dewan Yang Kami Hormati

Saudara Menteri Keuangan RI Yang Kami Hormati

Saudara Menteri Hukum dan HAM RI Yang Kami Hormati

Saudara Menteri PPN/Kepala Bappenas RI Yang Kami Hormati

Saudara Gubernur Bank Indonesia Yang Kami Hormati

Demikian Pendapat Akhir Mini Fraksi PAN atas Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022. Dengan mengucapkan *Bismillahrahmanirrahim*, Fraksi PAN setuju atas Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 untuk

dilanjutkan ke tahap berikutnya. Namun, Fraksi PAN meminta seluruh masukan dan catatan yang diberikan kepada Pemerintah agar menjadi perhatian yang dapat diindaklanjuti secara serius.

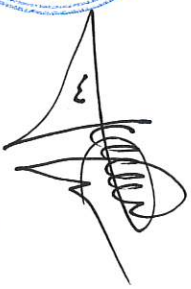
*Billahitaufiq wal hidayah,
Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakaatuh.*

Jakarta, 19 Agustus 2021

**PIMPINAN FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**



Dr. H. Saleh Partaonan Daulay, M.Ag., M.Hum., M.A.
Ketua



Eko Hendro Purmomo, S.Sos
Sekretaris



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

MPR / DPR - RI, Cd. Nusantara 1, Jl. Jend. Gatot Soebroto, Jakarta 10270
Telp. (021) 575 6087 - 575 6088 - 575 6090, Fax. (021) 575 6086
Website : www.fraksi.pks.id



PKS

PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TERHADAP

KETERANGAN PEMERINTAH ATAS RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)
TAHUN ANGGARAN 2022 BESERTA NOTA KEUANGAN

Disampaikan Oleh : Dr. H. Hermanto, S.E., M.M.
Nomor Anggota : A-415

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Pimpinan dan Anggota DPR RI, Saudara Menteri beserta jajaran, serta
hadirin yang kami hormati.

Pertama-tama, perkenankan kami mengajak hadirin sekalian untuk senantiasa memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah Subhanahu Wata'ala, Tuhan semesta alam, pemilik kekuasaan yang ada di langit dan di bumi. Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Pemurah, yang telah memberikan anugerah kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Kita bersyukur bersama seluruh rakyat Indonesia di seluruh penjuru tanah air, dapat memperingati dan merayakan 76 tahun Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) walau dalam keadaan pandemi Covid-19. Fraksi PKS sangat optimis dan percaya dengan semangat Kemerdekaan RI dan Tahun Baru Hijriyah bahwa kita semua dapat keluar dari krisis ini selama kita bersatu, saling tolong menolong, bantu membantu, dan bahu-membahu sebagai kesatuan anak bangsa.

Melalui Pidato Kenegaraan dan Keterangan Pemerintah Atas RUU Tentang APBN Tahun 2022, beserta Nota Keuangan yang telah disampaikan oleh Presiden, maka dapat memberikan pemahaman bagaimana capaian-capaian dan tantangan yang telah kita hadapi sebagai satu kesatuan perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Memasuki usia 76 Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia dan tujuh tahun tahun Pemerintahan Presiden Jokowi kita masih diliputi oleh persoalan-persoalan ekonomi yang fundamental dan diperburuk oleh pandemi Covid-19.

Mencermati krisis besar kesehatan yang terjadi pada beberapa minggu lalu, Fraksi PKS menilai bahwa Pemerintah masih belum memiliki *road map* kebijakan yang jelas dan menyeluruh dalam menangani Covid-19. Hal ini mengakibatkan kebijakan yang dilakukan Pemerintah menjadi bersifat sporadis dan tidak menyeluruh, sehingga berkesan tidak berdasarkan ilmu pengetahuan yang cukup (Evidence-Based Policy), dan pengelolaan data, pengalaman, kemampuan SDM, serta birokrasi yang baik dan efektif. Sehingga beberapa minggu yang lalu virus covid-19 varian delta masuk menyebar dengan cepat di Indonesia dan terlihat di luar skenario pencegahan dan penanganan oleh pemerintah.

Hadirin yang Kami Hormati,

Fraksi PKS memandang secara umum bahwa RAPBN tahun 2022 yang diajukan menunjukkan tidak ada yang istimewa dari target Pemerintah dalam menunaikan janji-janji ekonomi pada masa kampanye. RAPBN tahun 2022 membutuhkan penajaman agar lebih sehat, kredibel dan lebih pro-rakyat di masa pandemi ini, serta berdampak lebih optimal bagi kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 23 Ayat 1. Fraksi PKS juga memandang bahwa APBN 2022 adalah APBN Prakondisi yang akan menentukan beban target pemerintah di tahun 2023 termasuk target defisit di bawah 3 persen PDB.

Selanjutnya Fraksi PKS untuk menyampaikan catatan-catatan secara khusus sebagai berikut:

Asumsi Makro Ekonomi

1. Fraksi PKS menyoroti target pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan dalam bentuk interval yaitu 5 sampai 5,5 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak yakin terhadap target yang akan dicapai pada 2022. Kondisi ini akan memberikan sinyal yang tidak baik bagi pelaku ekonomi baik dunia usaha maupun investor karena mereka akan relatif sulit untuk merencanakan bisnis ketika target pertumbuhan ekonomi tidak bisa ditetapkan dengan angka yang lebih presisi. Selain masalah interval, margin antara 5 hingga 5,5 persen sangatlah lebar. Sebelumnya target pertumbuhan ekonomi ditetapkan dalam satu angka nominal tertentu. Selain itu, target dalam bentuk interval menyebabkan sulitnya melakukan evaluasi baik oleh ekonom maupun akademisi.
2. Fraksi PKS mendesak pemerintah untuk mencapai target-target pembangunan di bidang ekonomi maupun sosial sebagai wujud pertanggungjawaban kepada rakyat. Pencapaian target tersebut merupakan pemenuhan amanat rakyat yang ditetapkan di dalam konstitusi. Selama ini, RPJMN sebagai turunan janji-janji politik pemerintah tidak sepenuhnya dicapai sehingga berbagai indikator ekonomi dan sosial memburuk. Kesejahteraan rakyat pun menurun karena berbagai kebijakan ekonomi tidak pro rakyat kecil. Fraksi PKS juga menegaskan bahwa kegagalan mencapai target RPJMN 2015-2019 jangan terulang kembali pada RPJMN 2020-2024. Jika merujuk pada data RPJMN 2020-2024, target pertumbuhan 5 sampai 5,5 persen masuk kategori rendah dan sedang. Dokumen RPJMN menetapkan target pertumbuhan pada tiga skenario yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Pada kategori rendah ditetapkan target pertumbuhan 5,3 persen sedangkan untuk target sedang 5,4 persen dan target tinggi 5,7 persen. Dengan melihat data tersebut sejak awal memang pemerintah tidak berani menetapkan target pertumbuhan ekonomi dalam satu angka.
3. Fraksi PKS menilai bahwa pencapaian ekonomi 2022 sangat tergantung dari kemampuan pemerintah untuk menekan penyebaran covid-19 di Indonesia khususnya yang disebabkan oleh varian Delta serta mengantisipasi kemungkinan munculnya varian-varian baru yang lebih ganas. Jika hal

tersebut tidak dapat dilakukan maka Indonesia akan menjadi negara yang sangat terpuruk karena pandemi covid 19 yang berdampak pada kegagalan mencapai target-target ekonomi maupun sosial. Implikasinya ekonomi semakin sulit dan kehidupan rakyat semakin sengsara. Sejak munculnya pandemi covid-19 tahun 2020, penanganan kasus di Indonesia sangat menyita perhatian negara-negara di dunia. Pemerintah lebih condong ke aspek ekonomi dibandingkan aspek kesehatan, baik dari sisi anggaran pemulihan maupun kebijakan-kebijakan yang diambil. Melihat buruknya penanganan dan parahnya penyebaran pandemi covid 19 di Indonesia, sejumlah negara meresponnya lewat berbagai tindakan. Bagian pertama mengeluarkan *travel warning* dan melarang warga negaranya ke Indonesia. Tentu, langkah tersebut akan merugikan bagi Indonesia serta baik dari sisi ekonomi maupun persepsi global terhadap ekonomi maupun terhadap pemerintah. Selain itu beberapa negara pun telah melakukan evakuasi warga-warganya yang ada di Indonesia untuk menghindari terjangkitnya covid-19.

4. Fraksi PKS mendesak pemerintah menggalai potensi-potensi ekonomi baru di dalam negeri untuk mengurangi keberagantungan pada ekonomi global. Langkah ini sangat penting untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional dari pandemi covid-19. Sebagaimana diketahui, sebagian besar perekonomian Indonesia dikonstrubisikan oleh konsumsi rumah tangga dan investasi. Selain itu, Fraksi PKS mendesak pemerintah untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan pada 2022 karena sejak 2015 pemerintah selalu gagal mencapai target tersebut. Pemulihan ekonomi mitra dagang Indonesia harus dapat dimanfaatkan sehingga ekonomi terakselerasi dalam angka yang lebih tinggi. Triwulan II-2020, ekonomi Tiongkok tumbuh 7,9%; Amerika Serikat 12,2%; Singapura 14,3%; Korea Selatan 5,9%; Vietnam 6,6%; Hongkong 7,5% dan Uni Eropa tumbuh 13,2%. Peluang-peluang peningkatan ekspor dan investasi dapat dimaksimalkan sehingga mampu memambal pelemahan konsumsi rumah tangga.

5. Fraksi PKS mendesak pemerintah untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan. Dari sisi penggunaan, konsumsi rumah tangga ditargetkan 5-5,3% pada tahun 2022. Angka tersebut cukup tinggi dari

outlook pertumbuhan tahun 2021 yang mencapai 2,2-2,8%. Sementara itu, konsumsi pemerintah ditargetkan tumbuh 2,8-4,5% dengan *outlook* 2021 sebesar 3,9-4,6%. Pada posisi ini terlihat bahwa target pertumbuhan konsumsi pemerintah relatif lebih rendah di tahun 2022. Padahal, saat krisis konsumsi pemerintah diharapkan bisa menopang pertumbuhan ekonomi dengan menggantikan peranan sektor-sektor lain yang cenderung menurun. Sementara itu PMTB ditargetkan tumbuh 5,6-7% di tahun 2022 sedangkan *outlook* 2021 mencapai 4,7-6,1%. Harapan untuk tumbuh tinggi tahun 2022 memang relatif sulit jika pertumbuhan PMTB tidak maksimal. Tantangannya adalah masih buruknya iklim investasi di dalam negeri di tengah-tengah ekonomi global yang belum sepenuhnya pulih. Ekspor dan impor barang dan jasa masing-masing ditargetkan 5,8 hingga 7,9% dan 6% sampai 8,6%. Angka ini cukup tinggi di tengah-tengah kemampuan dan penetrasi dari barang-barang ekspor Indonesia relatif rendah (tidak berdayang saing). Sementara *outlook* pertumbuhan ekspor dan impor masing-masing 11,7-14,6% dan impor 12,2-16%

6. Fraksi PKS mendesak pemerintah untuk sigap mengidentifikasi sumber-sumber krisis sehingga dapat menyiapkan berbagai antisipasi. Sebagaimana diketahui siklus krisis semakin pendek sehingga potensi tekanannya pun semakin sering. Kegagalan mengidentifikasi sumber krisis berujung pada kegagalan menyiapkan langkah-langkah antisipasi sehingga dampak krisis semakin dalam. Biaya (fiskal dan nonfiskal) pun semakin mahal ketika gagal mencegah krisis. Selama ini, sumber krisis lebih dilihat dari sektor keuangan maupun fiskal. Sementara itu, krisis dari sektor kesehatan tidak mampu diidentifikasi. Saat krisis covid-19 terjadi, Indonesia tidak siap. Apalagi kehadiran varian delta yang sangat ganas semakin menyulitkan Indonesia dalam penanganannya. Ketidaksiapan tersebut terpantau dari rendahnya infrastruktur di sektor kesehatan. Hal yang sangat sering terlihat bahwa pasien menumpuk di rumah sakit dan banyak tenaga kesehatan yang menyerah (*resigned*).

7. Fraksi PKS menilai salah satu bagian paling penting dari asumsi makroekonomi adalah pertumbuhan sehingga target yang ditetapkan sangat

krusial untuk dicapai. Kegagalan mencapai target pertumbuhan dan kualitasnya sama artinya kegagalan memperbaiki kesejahteraan rakyat. Pencapaian pertumbuhan ekonomi pun semakin mendesak di tengah-tengah pandemi covid-19. Rakyat semakin menderita dan terjebak dalam garis kemiskinan karena terpasungnya aktivitas ekonomi dan sosial. Oleh karena itu, kegagalan mencapai target pertumbuhan ekonomi tidak boleh lagi terjadi karena rakyat sudah terpuruk baik sebelum pandemi covid-19 maupun saat ini. Selain masalah kesejahteraan yang semakin menurun, kegagalan pemerintah mencapai target pertumbuhan ekonomi diproyeksi menjebak Indonesia di dalam negara berpendapatan menengah (*middle income trap*). Tentu, situasi tersebut menenggelamkan impian menjadi lima besar perekonomian terbesar di dunia.

8. Fraksi PKS menilai bagian terpenting dari pencapaian pertumbuhan ekonomi adalah kualitas yang dihasilkan (pertumbuhan inklusif). Pertumbuhan inklusif pada gilirannya dapat dirasakan oleh seluruh rakyat bukan hanya golongan tertentu khususnya orang-orang kaya. Nyatanya, pertumbuhan ekonomi Indonesia sulit dirasakan oleh rakyat menengah ke bawah karena penguasaan sumberdaya ekonomi yang timpang. Golongan menengah ke bawah memiliki akses terbatas ke pusat-pusat produksi, distribusi hingga konsumsi, yang pada akhirnya menjebak mereka dalam pusaran kemiskinan. Fraksi PKS mendesak diwujudkannya keadilan ekonomi sehingga distribusi kegiatan ekonomi merata. Dengan demikian pertumbuhan berkualitas dan inklusif dapat segera diwujudkan. Tantangan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi inklusif semakin berat karena pandemi covid 19 menyebabkan ekonomi golongan menengah ke bawah terpuruk dan lumpuh. Hal itu terekam dari tingginya angka pengangguran dan kemiskinan selama pandemic covid-19. Oleh karena itu, Fraksi PKS mendesak pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang dapat memulihkan ekonomi rakyat kecil. Sementara itu, ekonomi golongan atas terus tumbuh dan bahkan jumlah orang kaya di Indonesia meningkat selama pandemi covid-19. Jumlah rekening bernominal di atas Rp5 miliar, misalnya, tumbuh sekitar 8% (yoy) per Mei 2021.

9. Fraksi PKS mendesak pemerintah untuk mendorong pemulihan ekonomi Indonesia sebagai penentu pemulihan kehidupan rakyat. Fraksi PKS melihat rakyat sudah terlalu lama terjebak dalam situasi sulit baik sebelum pandemi covid-19 maupun saat pandemi yang sedang berlangsung. Pemulihan ekonomi harus didorong oleh pelaku ekonomi kecil khususnya sektor Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Fraksi PKS menilai selama ini peranan UMKM semakin menurun karena kebijakan pemerintah yang cenderung mengarah kepada korporasi besar. Padahal UMKM berperan penting bagi perekonomian nasional baik dalam pembentukan PDB, penyerapan tenaga kerja, ekspor nonmigas hingga investasi. Tantangan untuk memulihkan pelaku ekonomi kecil seperti UMKM sangat berat setelah kegiatan ekonomi mereka lumpuh karena pandemi covid-19. Banyak UMKM terpaksa tutup karena kehabisan modal. Ketika sumber penghasilan mereka hilang maka mereka terseret ke kubangan kemiskinan. Sebagaimana diketahui bahwa jumlah UMKM di Indonesia mencapai 60 juta. Dapat dibayangkan jika separuh dari UMKM tersebut tutup dan bagaimana dampaknya bagi ekonomi Indonesia. Selain itu UMKM juga masih memiliki beban dalam cicilan di sektor perbankan. Hal ini harus menjadi perhatian pemerintah maupun otoritas perbankan sehingga dapat memberikan bantuan untuk penyelesaian pinjaman UMKM. Langkah tersebut diharapkan dapat mengurangi beban pelaku UMKM dari dampak pandemi covid-19. Bagian penting lainnya adalah bagaimana merawat UMKM yang tersisa sehingga tidak terseret ke dalam krisis pandemi covid-19. Fraksi PKS melihat salah satu langkahnya adalah melalui dukungan integrasi UMKM ke platform digital sehingga pemasaran semakin luas.
10. Fraksi PKS melihat menilai bahwa pemulihan ekonomi 2022 sangat tergantung dari dukungan sektor perbankan. Sebagaimana diketahui selama pandemi covid 19 sektor perbankan fungsi intermediasi lumpuh, yang tergambar dari pertumbuhan kredit negatif ditengah-tengah pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK). Setelah tumbuh negatif dalam durasi yang cukup lama, kredit per Juni 2021 tumbuh tipis 0,59% (yoy). Kredit investasi masih turun 0,41% (yoy) sedangkan kredit modal kerja dan kredit konsumsi masing-masing tumbuh 0,34% (yoy) dan 1,96% (yoy). Dari sisi lapangan usaha,

kredit sektor perdagangan dan eceran tumbuh 0,63% (yoy) sedangkan kredit sektor industri pengolahan masih turun 1,59% (yoy). Sementara itu dana pihak ketiga tumbuh 11,28% (yoy) dimana giro tumbuh 17,43% (yoy); tabungan tumbuh 13,07% (yoy) dan deposito tumbuh 6,32% (yoy). Tingginya pertumbuhan giro menunjukkan bahwa aktivitas sektor riil belum pulih sehingga dana giro menumpuk. Pada bagian lain, alokasi dana perbankan semakin meningkat pada penempatan obligasi. Pertengahan Agustus 2021 kepemilikan SBN bank umum (bank konvensional dan bank syariah) mencapai Rp1.513 triliun (angka tersebut mencapai 35% dari total SBN *tradable*). SBN yang dimiliki bank umum konvensional mencapai Rp1.442 triliun sedangkan bank syariah mencapai Rp70,98 triliun. Pada awal pandemic covid-19 (Maret 2020) kepemilikan SBN bank umum mencapai Rp763 triliun dimana bank konvensional memegang Rp731 triliun dan bank syariah Rp31,57 triliun. Sepanjang pandemi covid-19 (Maret 2020-Agustus 2021) nilai SBN bank umum tumbuh 98%. SBN bank umum konvensional naik 97% sedangkan bank syariah naik 124%.

11. Fraksi PKS mendesak pemerintah untuk memacu perbaikan iklim investasi untuk mendorong realisasi penanaman modal. Penanaman modal sangat dibutuhkan dalam pemulihan ekonomi nasional. Tantangan menarik investor global sangat berat karena iklim investasi global dan nasional yang belum kondusif. Investor global *wait and see* dalam penempatan dana sedangkan investor domestik lebih memilih investasi di pasar keuangan. Data Kementerian Investasi (2021) menunjukkan realisasi penanaman modal selama tahun 2020 hanya tumbuh 2,1% (yoy). Penanaman modal dalam negeri (PMDN) tumbuh 7% (yoy) dan penanaman modal asing (PMA) tumbuh - 2,4% (yoy). Selain itu, Fraksi PKS mengkhawatirkan ketimpangan distribusi realisasi PMDN dan PMA yang semakin terkonsentrasi pada sektor jasa (*nontradable*). Sektor transportasi gudang dan telekomunikasi dengan realisasi mencapai Rp144 triliun atau 17,5% dari total realisasi PMDN dan PMA. Sementara itu, penanaman modal sektor listrik gas dan air mencapai Rp102 triliun atau 12,3%; sektor industri logam dasar barang logam dan bukan mesin dan peralatannya terealisasi Rp94,8 triliun atau 11,5%. Semakin

dominannya realisasi penanaman modal pada sektor jasa berdampak buruk pada penyerapan tenaga kerja.

12. Fraksi PKS mendesak pemerintah untuk memperbaiki iklim investasi sehingga menarik realisasi investasi baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Sampai saat ini iklim investasi Indonesia relatif buruk dibandingkan negara-negara kawasan. Kesimpulan tersebut didukung oleh fakta bahwa ICOR di Indonesia masih di atas 6% sedangkan negara-negara yang sudah bergerak di bawah 5%. Situasi yang demikian menyebabkan daya saing Indonesia sangat buruk dimata investor global sehingga Indonesia bukan merupakan tujuan utama untuk berinvestasi. Yang paling tidak khawatir adalah investor-investor bisa saja berpindah ke negara-negara lain yang memiliki iklim lebih baik dengan biaya berusaha murah seperti Vietnam. Tantangan meningkatkan realisasi investasi semakin kompleks karena buruknya dampak pandemi covid-19 di Indonesia.

13. Fraksi PKS mendesak pemerintah mendorong perbaikan sektor-sektor *tradable* karena menjadi sektor yang sangat penting bagi perekonomian Indonesia. Sektor tersebut berperan tinggi dalam pembentukan PDB, penyerapan tenaga kerja, ekspor hingga investasi. Pemulihan sektor-sektor tersebut menjadi prasyarat pemulihan ekonomi Indonesia. Untuk mendorong pemulihan tersebut Fraksi PKS mendesak pemerintah untuk meningkatkan stimulus fiskal dan nonfiskal dan mendesak sektor keuangan untuk meningkatkan alokasi pembiayaan. Alokasi kredit ke sektor industri pengolahan, pertambangan dan pertanian semakin penurunan setiap tahunnya. Jika kondisi ini terus berlanjut maka ancaman terhadap pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja semakin tinggi. Triwulan II-2020, kontribusi sektor industri pengolahan hanya 19,29% dengan pertumbuhan di bawah pertumbuhan ekonomi. Penyerapan tenaga kerja sektor industri mencapai 17,82 juta atau 13,61% dari total tenaga kerja Indonesia.

14. Fraksi PKS mengingatkan kembali berbagai persoalan yang dihadapi oleh industri pengolahan Indonesia yaitu (i) masalah pelik dalam penyediaan bahan baku; (ii) persoalan infrastruktur baik infrastruktur dasar maupun infrastruktur yang mendukung sektor industri seperti pelabuhan dan

infrastruktur di kawasan industri; (iii) industri Indonesia mengalami kekurangan utilitas khususnya listrik, air, dan gas serta pengolahan limbah; (v) daya saing industri baik dari serbuan barang impor maupun kemampuannya bersaing di luar negeri; (vi) masalah harga input penting bagi industri khususnya gas; (vii) UMKM belum terintegrasi langsung dengan sektor industri; (viii) masalah dukungan pembiayaan baik dari investasi maupun perbankan; (ix) Masalah keberagantungan teknologi asing sehingga membebani biaya produksi.

15. Fraksi PKS mendesak pemerintah untuk memperhatikan perkembangan sektor pertanian karena sektor ini sangat vital bagi perekonomian Indonesia. Kontribusinya terhadap PDB terus menurun sedangkan penyerapan tenaga kerja pada sektor pertanian tetap tinggi. Menurut data BPS, penyerapan tenaga kerja pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan mencapai 38,78 juta atau 29,59% dari total tenaga kerja Indonesia pada Februari 2021. Pada triwulan ii-2021 kontribusi sektor pertanian mencapai 14,27%. Selama pandemi covid 19 dapat dikatakan bahwa sektor pertanian menjadi salah satu sektor yang tetap tumbuh positif selama covid 19. Selain data-data tersebut, keberadaan sektor pertanian memang menjadi sangat penting bagi Indonesia khususnya untuk memenuhi kebutuhan pangan. Oleh karena itu kebijakan-kebijakan pemerintah harus pro terhadap sektor tersebut. Selama ini terlihat bahwa pemerintah tidak begitu memperhatikan sektor pertanian, yang terlihat dari berbagai kebijakan khususnya dalam pemenuhan kebutuhan bahan pangan lewat keran impor. Yang paling menyakitkan bahwa impor dilakukan pada saat petani panen.
16. Fraksi PKS mendesak pemerintah untuk menghentikan kebijakan-kebijakan yang kontraproduktif terhadap upaya-upaya pemulihan ekonomi dari pandemi covid-19. Salah satu perkembangan yang menyita perhatian rakyat adalah rencana kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN). Rencana tersebut sangat disayangkan karena menggerus daya beli rakyat di tengah-tengah ekonomi yang terus memburuk. Bagaimana pun pemerintah harus peka terhadap kehidupan rakyat dan jangan menambah beban yang sudah berat.

Melalui Pidato Kenegaraan dan Keterangan Pemerintah Atas RUU Tentang APBN Tahun 2022, beserta Nota Keuangan yang telah disampaikan oleh Presiden, maka dapat memberikan pemahaman bagaimana capaian-capaian dan tantangan yang telah kita hadapi sebagai satu kesatuan perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Memasuki usia 76 Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia dan tujuh tahun pemerintahan Presiden Jokowi kita masih diliputi oleh persoalan-persoalan ekonomi yang fundamental dan diperburuk oleh pandemi Covid-19.

Mencermati krisis besar kesehatan yang terjadi pada beberapa minggu lalu, Fraksi PKS menilai bahwa Pemerintah masih belum memiliki *road map* kebijakan yang jelas dan menyeluruh dalam menangani Covid-19. Hal ini mengakibatkan kebijakan yang dilakukan Pemerintah menjadi bersifat reaktif sporadis dan tidak menyeluruh, sehingga berkesan tidak berdasarkan ilmu pengetahuan yang cukup (Evidence-Based Policy), dan pengelolaan data, pengalaman, kemampuan SDM, serta birokrasi yang baik dan efektif. Sehingga beberapa minggu yang lalu virus covid-19 varian delta masuk menyebar dengan cepat di Indonesia dan terlihat di luar skenario pencegahan dan penanganan oleh pemerintah.

Hadirin yang Kami Hormati,

Fraksi PKS memandang secara umum bahwa RAPPN tahun 2022 yang diajukan menunjukkan tidak ada yang istimewa dari target Pemerintah dalam menunaikan janji-janji ekonomi pada masa kampanye. RAPPN tahun 2022 membutuhkan penajaman agar lebih sehat, kredibel dan lebih pro-rakyat di masa pandemi ini, serta berdampak lebih optimal bagi kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 23 Ayat 1. Fraksi PKS juga memandang bahwa APBN 2022 adalah APBN Prakondisi yang akan menentukan beban target pemerintah di tahun 2023 termasuk target defisit di bawah 3 persen PDB.

Selanjutnya Fraksi PKS untuk menyampaikan catatan-catatan secara khusus sebagai berikut:

Padahal, petaniilah yang menjadi garda terdepan dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Ketidakberpihakan kebijakan menyebabkan kehidupan petani terus menurun. Nilai tukar petani (NTP) sulit naik karena nilai ekonomi hasil produksi pertanian jauh lebih rendah dari belanja yang dikeluarkan oleh petani. Sementara itu, petani semakin terhimpit oleh derasnya alih fungsi lahan menuju aktivitas non pertanian. NTP terus menurun dan belum pernah kembali ke level tertinggi pada 2004 sebesar 117.35. NPT tahun 2020 hanya 103,25; yang turun dari 104,46 pada tahun 2019. Data terakhir, NTP Juli 2021 mencapai 103,48.

20. Fraksi PKS mendesak pemerintah meningkatkan efektivitas Tim Pengendali Inflasi baik di pusat maupun di daerah. Keberadaan tim tersebut diharapkan dapat menekan inflasi khususnya dari sisi produksi. Jenis inflasi ini menjadi inflasi utama di Indonesia yang pada gilirannya menekan daya beli. Salah satu bagian penting dari peranan tim pengendali inflasi di daerah adalah menyediakan data akurat tentang produksi bahan-bahan makanan sehingga menjadi acuan dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, ketika produksi melimpah maka tidak ada lagi kebijakan impor yang merugikan petani. Selain itu fraksi PKS juga meminta tim pengendali inflasi tersebut dapat bergerak ke desa-desa untuk menekan inflasi di perdesaan. Sebagaimana diketahui inflasi di pedesaan relatif lebih tinggi dibandingkan inflasi di perkotaan.

21. Fraksi PKS menilai target nilai tukar terhadap nilai tukar Rupiah terhadap US Dollar sebesar Rp14.350 terlalu pesimis sehingga harus ditetapkan lebih kuat. Penetapan Rupiah yang lebih kuat dapat memberikan sinyal yang lebih positif terhadap pelaku pasar maupun pelaku di sektor industri. Selain itu, Fraksi PKS mendesak otoritas moneter untuk menjaga stabilitas nilai tukar agar tidak bergerak jauh dari target. Stabilitas nilai tukar sangat krusial di tengah-tengah krisis pandemi covid-19 yang belum berakhir. Dampak ketidakstabilan Rupiah menyebabkan impor semakin mahal sehingga pemulihan industri pengolahan terhambat. Stabilitas nilai tukar juga menentukan biaya bunga utang yang harus disiapkan pemerintah. Selain itu, Fraksi PKS menilai stabilitas nilai tukar Rupiah sangat penting untuk dijaga karena menjadi salah satu sumber krisis.

22. Fraksi PKS memberikan beberapa catatan tentang faktor-faktor penentu stabilitas Rupiah tahun depan yaitu: (i) penanganan covid-19 di Indonesia. Hal ini menjadi indikator *country risk* yang sangat relevan saat ini. Covid yang gagal dijinakkan berdampak pada buruknya *country risk* sehingga mendorong investor meninggalkan Indonesia. Implikasinya Rupiah tertekan; (ii) risiko fiskal karena yang bukan hanya bersumber dari lonjakan utang karena pandemi covid-19 tetapi tumpukan utang dari tahun-tahun sebelumnya. Rasio utang pemerintah pusat terhadap PDB di atas 40%; (iii) *credit default swap* (CDS) tenor 5 tahun. CDS sempat mencapai 210 pada Maret 2020. Angka tersebut sangat tinggi dibandingkan dengan negara sekawasan seperti Malaysia mencapai 115 sedangkan Thailand hanya 65; (iv) relatif rendahnya cadangan devisa. Ukuran ketersediaan cadangan devisa pun hanya menghitung komponen-komponen kewajiban pemerintah seperti pembayaran utang serta impor industri. Untuk kebutuhan korporasi belum sepenuhnya dihitung.
23. Fraksi PKS mendesak pemerintah untuk memacu perbaikan neraca transaksi berjalan karena berpengaruh terhadap stabilitas nilai tukar. Perbaikan neraca transaksi berjalan dilakukan lewat peningkatan surplus neraca perdagangan dan menekan defisit neraca jasa dan neraca pendapatan. Indonesia memiliki pekerjaan rumah pada ketiga neraca tersebut. Pada neraca perdagangan, tantangan muncul dari kinerja ekspor yang masih bergantung pada perkembangan harga komoditas mentah. Selain itu, penetrasi ekspor masih pada negara-negara tradisional. Tantangan memperbaiki neraca jasa berasal dari keberuntungan neraca tersebut pada aliran wisata asing. Sementara itu, upaya meningkatkan wisatawan asing relatif sulit saat pandemi. Persoalan neraca pendapatan muncul dari tingginya kebergantungan Indonesia pada dana asing sehingga aliran pendapatan dana asing tersebut tidak bisa dibendung. Hal ini pada akhirnya menekan Rupiah saat terjadi transfer modal dan keuntungan. Tahun 2020, defisit neraca transaksi berjalan sempat menurun menjadi 0,41% dari PDB yang disebabkan melemahnya kegiatan ekonomi. Dalam kondisi normal, defisit neraca transaksi berjalan bergerak mendekati 3% dari PDB.

24. Fraksi PKS menilai target tingkat suku bunga SUN 10 tahun terlalu tinggi. Pemerintah menetapkan target 6,82% pada tahun 2022. Penetapan target yang lebih rendah sangat penting mengingat beban cicilan bunga utang semakin tinggi. Belanja cicilan bunga utang telah mengambil porsi sekitar 20% dari belanja pemerintah pusat. Situasi tersebut berdampak pada penurunan alokasi belanja produktif cenderung menurun. Langkah-langka menekan yield SBN harus dilakukan lintas lembaga. Pemerintah menjaga sisi fiskal, sedangkan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan menjaga dari sisi moneter dan keuangan. Tahun 2021 *outlook* tingkat suku bunga SUN 10 tahun mencapai 6,34-7,24%. Saat pandemi, yield SBN cenderung meningkat sehingga biaya penerbitan SBN semakin tinggi. Yield SBN Indonesia masih lebih tinggi dibandingkan negara-negara sekawasan. Tahun 2020, yield SBN 5 tahun mencapai 5,18%; sedangkan untuk 10, 15, dan 20 tahun masing-masing 5,93%; 6,37% dan 6,51%. Data terakhir pada Juni 2021, yield SBN 5 tahun mencapai 5,36%; 10 tahun mencapai 6,56%; 15 tahun dan 20 tahun masing-masing 6,4% dan 7,24%. Fraksi PKS juga mendesak otoritas moneter dan otoritas perbankan memperdalam pasar keuangan domestik sehingga berpengaruh positif terhadap penurunan yield SBN. Pendalaman pasar keuangan domestik selain lewat peningkatan instrument-instrumen investasi (baik konvensional maupun syariah) tetapi juga meningkatkan porsi pelaku domestik. Perlu edukasi intensif khususnya bagi kaum millennial agar berpartisipasi dalam pembangunan perekonomian lewat kepelikan SBN.

Indikator Kesejahteraan

25. Fraksi PKS mendesak pemerintah untuk menangani lonjakan angka pengangguran secara serius. Lonjakan pengangguran terlihat dari lonjakan klaim BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) dan klaim jaminan hari tua (JHT). Menurut BP Jamsostek, sampai 7 Agustus 2020, pekerja yang di-PHK mencapai 538.305 orang dan diproyeksikan hingga akhir tahun 2021 sebanyak 894.579 pekerja. Fraksi PKS juga mendesak pemerintah untuk meningkatkan dukungan fiskal maupun nonfiskal pada sektor-sektor padat karya. Hal ini sangat penting untuk mengurangi dampak lanjutan covid-19

dalam bentuk lonjakan pengangguran. Tanpa Industri padat karya, bonus demografi yang akan mencapai puncaknya pada 2024 justru akan menjadi beban berat. Upaya menjaga kinerja sektor-sektor padat karya juga dapat dilakukan dengan pemberian insentif bagi PMDN dan PMA agar bergerak ke sektor tersebut. Lonjakan investasi pada sektor tersier dan penurunan investasi pada sektor sekunder akan berdampak buruk pada sektor ketenagakerjaan. Fraksi PKS juga mendorong pemerintah segera menyelesaikan persoalan mendasar di sektor ketenagakerjaan. Beberapa diantaranya adalah rendahnya produktivitas, pasar tenaga kerja yang rigid, *mismatch* antara kebutuhan dan ketersediaan sumberdaya manusia di pasar tenaga kerja. Produktivitas yang rendah disebabkan oleh tingginya porsi tenaga kerja informal. Pemerintah harus meningkatkan program-program yang dapat memigrasi pekerja informal ke pekerja formal.

26. Fraksi PKS mendesak pemerintah meningkatkan kualitas program-program yang berorientasi pada keluarga miskin. Pada Maret 2021, angka kemiskinan meledak. Angka kemiskinan naik menjadi 27,54 juta orang pada Maret 2021; jika dibandingkan dengan data Maret 2020, jumlah penduduk miskin naik 1,12 juta orang. Penduduk miskin Indonesia terbanyak berdasarkan provinsi ada di Jawa Timur (4,6 juta orang), Jawa Barat (4,2 juta orang), dan Jawa Timur (4,1 juta orang). Fraksi PKS menuntut pemerintah untuk segera membuka dan meningkatkan lapangan kerja untuk mengurangi lonjakan angka kemiskinan. Selain itu, pemerintah perlu memastikan keterjangkauan harga pangan terutama, makanan pokok, telur, gula, hingga bumbu-bumbu dapur. Dukungan terhadap sektor pertanian harus terus dilakukan.

27. Fraksi PKS mendesak pemerintah untuk memacu penciptaan lapangan kerja. Menurut komponen ketersediaan lapangan kerja yang merupakan salah satu komponen Indeks Kondisi Ekonomi (IKE) saat ini masih memburuk. Penurunan indeks ketersediaan lapangan kerja sudah berada di level terendah. Pada Mei 2021, komponen tersebut 77,4 poin sedangkan pada Juni naik sedikit menjadi 80,4. Sementara pada Juli 2021 anjlok menjadi hanya 50,1 poin. Penurunan tersebut berdampak dari Pemberlakuan Pembatasan

- Kegiatan Ekonomi (PPKM) akibat penanganan pandemi yang kurang konsisten.
28. Fraksi PKS mencermati kemungkinan Pemerintah akan kesulitan untuk memenuhi target IPM (Indeks Pembangunan Manusia) yang ditargetkan pada 2022 sebesar 73,41-73,46. Hal ini karena untuk realisasi target IPM 2020 sebesar 72,51 gagal tercapai, hanya meningkat 0,02 poin dibanding capaian sebelumnya dengan sebesar 71,94. Padahal, kenaikan pada tahun-tahun sebelumnya IPM biasa meningkat sekitar 0,5 sampai 0,6. Kemungkinan pemerintah untuk mencapai target IPM 2021 dan 2022 akan semakin berat. Pemerintah harus serius dalam membenahi peringkat IPM, mengingat IPM Indonesia berada di peringkat 107 dari 189 negara. Di kawasan asia tenggara Indonesia kalah dari Singapura (11), Malaysia (62), Thailand (79).
29. Fraksi PKS mendesak pemerintah konsisten memperbaiki nilai tukar petani (NTP). Pada 2020 NTP hanya mencapai 99,47 menjadi titik terendah. Sementara selama tahun 2021 NTP hanya sedikit membaik, pada Mei 2021 naik menjadi 103,39 persen atau naik 0,44 dari bulan sebelumnya. Untuk bulan Juni 2021 sebesar 103,59 atau naik 0,1 persen. Tetapi NTP kembali turun pada bulan Juli 2021 sebesar 0,11 persen menjadi 103,48. Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP) nasional Juli 2021 sebesar 103,77 juga mengalami penurunan sebesar 0,10 persen dibanding NTUP sebelumnya.

Penerimaan Negara

30. Fraksi PKS memandang Pemerintah perlu menyusun target pendapatan, terutama penerimaan perpajakan yang realistis. Pada periode 2014-2019, rata-rata realisasi Pendapatan Negara dan penerimaan perpajakan setiap tahun secara berturut-turut hanya sebesar 91% dan 88%. Target yang terlalu tinggi ini selalu diiringi dengan shorttall perpajakan pada tengah tahunnya, yang membuat Indonesia terpaksa melebarkan defisit anggaran yang akhirnya menambah beban utang.
31. Fraksi PKS mendorong Pemerintah untuk dasarnya perlu mengantisipasi berbagai kemungkinan gejala fiskal dengan menciptakan perancangan keuangan yang kredibel. Masih tingginya ketidakpastian karena belum

tertangannya pandemi dengan baik, melambatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia akibat deindustrialisasi dini, ketergantungan atas harga komoditas global dan ketidakpastian perekonomian global perlu diantisipasi dari awal. Fraksi PKS menilai bahwa target pendapatan negara masih terlalu optimis, dimana dibandingkan dengan outlook 2021, maka target penerimaan perpajakan pada RAPBN 2022 mengalami pertumbuhan sebesar sampai 9,52 persen dengan catatan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,5 persen. Sebagai perbandingan, pada tahun 2019, dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,02%, penerimaan perpajakan hanya tumbuh 1,8%. Target pendapatan negara juga, dengan skenario optimis juga akan tumbuh 6,17 persen dibandingkan outlook 2021.

32. Fraksi PKS berpendapat Pemerintah harus waspada terhadap sejumlah sumber perpajakan memiliki risiko fiskal tinggi, seperti PPH badan, yang secara historis memiliki waktu pulih yang lebih lama paska adanya krisis ekonomi dibandingkan sumber perpajakan yang lain. Lebih lanjut, dengan masih lambatnya progress vaksinasi, baik di Indonesia, dan potensi gelombang Covid ke-3 di sejumlah negara, maka diperkirakan permintaan global masih lemah, yang pada akhirnya akan mempengaruhi kinerja pendapatan negara.

33. Fraksi PKS berpendapat bahwa kinerja keuangan Indonesia selama ini masih jauh dari harapan. Rasio pendapatan terhadap PDB Indonesia hanya mencapai 14% atau peringkat empat terendah diantara negara-negara emerging. Salah satu problematika utamanya adalah masih rendahnya rasio perpajakan. Rasio perpajakan (*tax ratio*) yang pada awalnya di atas 11%, pada tahun 2019 hanya mencapai 9,76%, dan tahun 2020 semakin menurun menjadi 8,30%. *Tax ratio* tahun 2021 diprediksi hanya mencapai kisaran 8,25% sampai 8,63%, dan Pemerintah hanya menargetkan *tax ratio* pada tahun 2022 pada kisaran 8,37%-8,42%. Rendahnya rasio ini disebabkan oleh administrasi perpajakan yang masih belum baik, basis perpajakan yang masih relatif stagnan, serta adanya sektor yang under-tax dan didorong dengan pemberian insentif (belanja perpajakan) dalam jumlah yang sangat besar. Contohnya sektor konstruksi dan real estate yang kontribusi perpajakannya

(2016-2020) hanya sebesar 5,8% persen, padahal kontribusi perekonomiannya (kepada PDB) mencapai 14 persen, atau sektor manufaktur yang kontribusi GDP mencapai 19%, tetapi kontribusi perpajakannya hanya mencapai 11%. Lebih lanjut, tax buoyancy Indonesia pada berada dikisaran 0,5, menunjukkan Indonesia memiliki potensi memperluas basis perpajakan.

34. Fraksi PKS juga berpendapat bahwa masih rendahnya kinerja perpajakan disebabkan masih belum kuatnya basis perpajakan pada masyarakat berpendapatan tinggi. Kontribusi Pajak penghasilan orang pribadi non-karyawan hanya mencapai 1,8%, dimana diperkirakan potensi perpajakannya yang belum terealisasi mencapai Rp 117 Triliun. Hal ini sebenarnya dapat menjadi sumber penerimaan baru yang dapat dimaksimalkan oleh Pemerintah.

35. Fraksi PKS berpendapat Pemerintah perlu mengatur kembali kebijakan belanja perpajakan sifatnya regresif dan masih jauh dari prinsip keadilan dan pemerataan pendapatan. Belanja perpajakan terus mengalami peningkatan signifikan, dimana pada tahun 2020 mencapai Rp 234 Triliun, atau meningkat lebih dari 20% dibandingkan tahun 2016.

36. Fraksi PKS berpendapat bahwa Pemerintah perlu mengoptimalkan pendapatan dari Bea dan Cukai. Bea dan Cukai termasuk pendapatan yang tidak terdampak besar pada kondisi resesi dan pandemi yang saat ini terjadi, dimana kontraksi pendapatan pada tahun 2020 hanya mencapai 0,2%. Untuk mendorong pendapatan dari pajak perdagangan internasional, Pemerintah perlu memperkuat sistem administrasi, mendorong optimalisasi sistem single submission hingga memperkuat pengawasan. Sedangkan dari sisi cukai, Pemerintah dapat mendorong optimalisasi dari cukai rokok. Saat ini rata-rata cukai untuk produk rokok baru mencapai 57,4%, masih sangat jauh dari standar yang ditetapkan WHO yang mencapai 75%.

37. Fraksi PKS mengingatkan terkait kinerja program PEN, khususnya untuk insentif perpajakan, di tahun 2020 yang masih jauh dari optimal. Untuk insentif perpajakan, dari pagu Rp 120 Triliun, realisasinya hanya mencapai 46,8%. Hal ini menjadi miss opportunity yang besar, terutama tambahan anggaran untuk program PEN dibiayai oleh tambahan utang, yang menjadi

beban APBN ke depannya. Lebih lanjut, insentif perpajakan banyak dinikmati oleh pelaku usaha skala besar, bukan UMKM. Berdasarkan data, dari total nilai realisasi insentif perpajakan pada program PEN, hanya 1,17% yang dinikmati oleh UMKM.

38. Fraksi PKS mengingatkan terkait rencana Pemerintah menaikkan tarif PPN (Intensifikasi). Berdasarkan RAPPN 2021, ditulis secara jelas bahwa strategi Pemerintah adalah perluasan basis perpajakan (ekstensifikasi). Perlu ada kejelasan dan konsistensi kebijakan dari Pemerintah. Fraksi PKS berpendapat kenaikan tarif PPN akan kontraproduktif dengan rencana pemulihan ekonomi nasional. Sumber PPN terbesar berasal PPN dalam negeri, berupa konsumsi masyarakat, dan PPN impor, yang merupakan konsumsi bahan modal dan bahan baku bagi industri. Artinya, kenaikan tarif PPN tidak hanya melemahkan daya beli masyarakat, tetapi juga akan meningkatkan tekanan bagi industri.

39. Fraksi PKS berpendapat pendapatan dari pajak pertambahan nilai masih jauh di bawah potensi yang ada. Rasio PPN terhadap PDB hanya mencapai 3,6%, sangat rendah dari standar negara-negara secara umum yang mencapai 6 hingga 9%. Sehingga, diperkirakan pada tahun 2018, potensi penerimaan PPN diperkirakan masih mencapai 32% dari potensi yang ada. Dibandingkan meningkatkan tarif yang akan berdampak kepada masyarakat secara umum, seharusnya Pemerintah fokus memperluas basis perpajakan PPN.

40. Fraksi PKS berpendapat bahwa strategi mendorong basis perpajakan melalui cukai plastik perlu dipertimbangkan secara matang. Pada satu sisi, konsumsi plastik yang berlebihan memang dapat menimbulkan biaya lingkungan. Tetapi di sisi lain, plastik juga banyak dikonsumsi oleh masyarakat berpendapatan rendah. Studi menunjukkan bahwa pasar modern menyumbang sampah plastik 30% dan pasar tradisional 70 persen. Artinya pengenaan cukai tanpa pertimbangan yang matang berpotensi melebarkan jurang ketimpangan sosial.

41. Fraksi PKS mengkritisi strategi fiskal yang dilakukan dengan memberikan sejumlah insentif perpajakan untuk dunia usaha, terutama dunia usaha skala besar. Insentif perpajakan yang diberikan oleh Pemerintah pada tahun 2018

berupa penurunan tarif PPh badan hingga pembebasan PPh 22 impor. Fraksi PKS mengingatkan total belanja perpajakan yang sudah dikeluarkan oleh Pemerintah pada periode 2016-2020 mencapai di atas Rp 1000 Triliun. Selama ini skema untuk insentif perpajakan yang ada belum dapat mendorong lanju investasi. Perlu menjadi catatan penting, permasalahan utama yang menghambat investasi di Indonesia, terutama pada bidang perpajakan bukan pada tarif pajaknya, akan tetapi justru pada proses administrasi perpajakannya. Selama ini yang banyak dikeluarkan oleh dunia usaha dan investor adalah proses administrasi perpajakan yang sulit dan kurang transparan. Hal tersebut membuat dunia usaha dan investor enggan untuk menambah kapasitas investasinya. Sejumlah riset telah menyatakan bahwa untuk kasus negara berkembang, pemberian insentif perpajakan tidak efektif untuk mendorong investasi, selama masih ada permasalahan dalam birokrasi dan administrasi perpajakan.

42. Fraksi PKS berpendapat Kebijakan fiskal Pemerintah seharusnya lebih menyentuh pada reformasi mendasar perpajakan Indonesia. Kualitas dan kuantitas tenaga pajak perlu terus ditingkatkan. Kemudahan birokrasi yang diikuti dengan perbaikan administrasi perpajakan seharusnya menjadi kunci utama. Selama Pemerintah masih sibuk mendahulukan besaran tarif perpajakan, dibandingkan perbaikan administrasi perpajakan, maka stagnansi tax ratio masih akan terus terjadi.

43. Fraksi PKS berpandangan stagnannya target PNBp pada tahun 2021 sesuai dengan kondisi turunnya harga komoditas global. Fraksi PKS mendorong Pemerintah untuk terus mendorong potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak yang belum banyak tergali dan mendorong tingkat kepatuhan pembayaran. Rasio PNBp terhadap PDB nasional terus mengalami penurunan setiap tahunnya, dari 3,8 persen (2014) menjadi hanya 1,69 persen (APBN 2021). Pasca disahkan UU No. 9 Tahun 2018 tentang PNBp, Pemerintah seharusnya dapat melakukan langkah-langkah strategis, terutama dalam perbaikan administrasi dan birokrasi, sehingga dapat mendorong tingkat kepatuhan dan pada akhirnya pertumbuhan PNBp nasional. Selain itu, Pemerintah perlu melakukan optimalisasi pada pengelolaan aset-aset nasional yang saat ini

memiliki nilai mencapai Rp 10.400 Triliun. Untuk mendorong PNBp, maka aset tersebut didorong produktifitasnya dengan me

44. Fraksi PKS berpendapat Pemerintah tidak boleh bergantung pada PNBp SDA yang sangat rentan dengan volatilitas global. Pemerintah perlu mengoptimalkan pengelolaan BMN, BUMN, serta BLU sehingga dapat mendorong penerimaan PNBp nasional. Pendapatan BLU pada tahun 2019 berkontribusi sebesar 12 persen dari total PNBp, dan pada tahun 2020 diperkirakan meningkat kontribusinya menjadi 18,9 persen. Tentu potensi tersebut dapat terus dikembangkan.

Belanja Pemerintah Pusat

45. Fraksi PKS memandang bahwa Belanja Negara dalam APBN tahun 2022 masih harus fokus terhadap pencegahan dan penanganan krisis kesehatan akibat virus Covid-19. Kemudian belanja negara fokus terhadap penanganan dan pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Fraksi PKS berpendapat bahwa Pemerintah sudah harus mulai berfikir tidak hanya menangani namun mulai dapat melakukan lokalisasi penyebaran virus dan juga menstimulus atau memfasilitasi agar daya imunitas rakyat terhadap virus meningkat termasuk mendorong dan melakukan edukasi agar masyarakat mematuhi protokol kesehatan. Tidak hanya menjadikan program vaksinasi sebagai faktor utama dalam penanganan Covid-19.

46. Fraksi PKS mencermati bahwa Belanja Negara dalam RAPBN 2022 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan APBN 2021 sebesar Rp41,3 triliun menjadi Rp2.708,7 triliun. Belanja Pemerintah Pusat di dalam RAPBN 2022 mengalami penurunan Rp16,2 triliun menjadi Rp1.938,3 yang sebelumnya Rp1.954,5 di dalam APBN 2021. Hal ini memberikan defisit 4,85 persen setelah dihitung dengan Pendapatan negara dalam RAPBN 2022. Fraksi PKS berpendapat bahwa APBN tahun 2022 merupakan prakondisi agar target pemerintah di tahun 2023 terkait dengan defisit di bawah 3 persen dapat terwujud. Sehingga pemerintah perlu menyiapkan langkah-langkah perencanaan sejak tahun 2022 yang dapat terukur dan jelas serta terarah

agar beban defisit di bawah tiga persen dari PDB tidak menjadi terlalu berat di APBN 2023. Namun, perlu untuk menjadi perhatian Pemerintah bahwa pelaksanaan untuk mencapai target tersebut jangan sampai membuat kondisi ekonomi masyarakat utamanya yang berada di golongan rentan dan miskin menjadi semakin tertekan dan berat. Program Subsidi dan Bantuan Sosial untuk masyarakat ekonomi lemah dan terdampak oleh pandemi Covid-19 agar lebih ditingkatkan. Karena, pada akhirnya semakin sejahtera rakyat, maka kontribusi terhadap negara berupa pajak juga dapat semakin meningkat.

47. Fraksi PKS mendesak Pemerintah agar memastikan ketepatan penerima dan ketepatan manfaat dan pencegahan risiko korupsi terhadap belanja perlindungan sosial Covid-19. Pemerintah perlu memperbaiki basis data penerima seperti DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) dan tata kelola pelaksanaan belanja bantuan sosial. Berdasarkan data BPS Agustus 2020, sebanyak 60,47 persen orang yang bekerja adalah pekerja informal berpenghasilan tidak tetap, baik dari pekerjaan sektor pertanian maupun non-pertanian. Dari kelompok pekerja formal, sekitar 17,48 juta adalah pekerja di sektor manufaktur yang sebagian besar bekerja dengan upah harian. Oleh karena itu, Fraksi PKS berpendapat bahwa belanja perlindungan sosial menjadi penting dan mendesak dalam APBN 2022. Fraksi PKS mencatat bahwa dalam RAPBN 2022 belanja untuk perlindungan sosial mengalami pengurangan dari Rp498,0 triliun tahun 2020 menjadi Rp427,5 triliun. Fraksi PKS mengingatkan Pemerintah bahwa pengurangan anggaran ini harus mempertimbangkan jumlah peningkatan dan penurunan tingkat masyarakat ekonomi rentan dan miskin.

48. Fraksi PKS mengingatkan Pemerintah dengan serius agar melihat rakyat tidak hanya sebagai sumber penerimaan negara yaitu pajak, tapi juga harus melihat lebih mendalam dari sisi bagaimana caranya agar rakyat miskin dan rentan dapat tetap hidup dan dapat membayar pajak di tengah himpitan situasi pandemi Covid-19 dan krisis ekonomi yang mengancamnya. Sehingga, belanja negara perlu untuk difokuskan terhadap aktifitas yang menstimulus dan berdampak langsung terutama terhadap kehidupan rakyat miskin. Pemerintah hendaknya merancang dengan serius dan menata kebijakan

Belanja dalam APBN tahun 2022 dengan melakukan penguatan spending better melalui pengendalian belanja agar lebih efisien, lebih produktif, dan menghasilkan multiplier effect yang kuat terhadap perekonomian serta efektif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pencegahan dan Penegakan hukum terhadap kejahatan berupa penyimpangan, penyalahgunaan, dan korupsi dalam pelaksanaan belanja negara harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Fraksi PKS mendesak Pemerintah untuk melakukan Efisiensi biaya birokrasi pusat dan daerah, mitigasi terhadap pelbagai kemungkinan dan kebutuhan penting-mendesak, serta memperkokoh pondasi ekonomi agar kedepannya dapat terbebas dari *middle income trap*. Pemerintah wajib melakukan *spending better* dan mempertimbangkan value for money dari setiap rupiah yang dibelanjakan.

49. Fraksi PKS memandang bahwa pandemi ini semakin mendesak Pemerintah agar dapat melakukan reformasi struktur ekonomi yang bersifat jangka panjang agar pertumbuhan ekonomi dapat berkualitas dan berterusan. Fraksi PKS mendorong agar struktur ekonomi kita yang selama ini lebih dari 55% dikontribusikan oleh konsumsi rumah tangga, agar dapat ditransformasi menjadi lebih produktif dengan mendorong hilirisasi, investasi dan ekspor. Salah satunya adalah belanja pembangunan infrastruktur pada saat ini perlu diarahkan kepada infrastruktur yang penting dan sangat mendesak memiliki pengaruh langsung kepada penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi. Investasi dan hilirisasi sektor industri mendukung produksi output bernilai tambah tinggi yang mendorong ekspor dan mengurangi ketergantungan bahan baku dan input dari luar negeri. PMN (Pernyataan Modal Negara) juga perlu diarahkan tidak untuk menjadi sekadar "alat pemadam kebakaran" dan menjadi beban negara. PMN seharusnya memberikan hasil peningkatan pendapatan kepada negara namun juga benar-benar menjadi alat stimulus meningkatnya penyerapan tenaga kerja, meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

50. Fraksi PKS mendorong Pemerintah agar efisisensi belanja bukan prioritas berupa penghematan belanja barang non operasional seperti perjalanan dinas, paket-paket meeting dan seterusnya harus terus dilakukan. Selain itu

tidak melakukan alokasi anggaran pembangunan infrastruktur yang tidak penting dan tidak mendesak salah satunya adalah pembangunan Ibu Kota Negara kepada belanja penanganan risiko pandemi Covid-19 dan belanja peningkatan kesejahteraan rakyat pada APBN 2022. Optimalisasi manfaat dari pembangunan infrastruktur tergantung pada perencanaan yang tepat sesuai dengan karakteristik wilayah dan dukungan dari masyarakat. Fraksi PKS menilai bahwa belanja infrastruktur yang dilakukan oleh Pemerintah belum memiliki daya ungkit pembangunan optimal kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi karena tidak didasarkan kepada kebutuhan masyarakat yang penting dan mendesak seperti kegagalan keselarasan perencanaan pembangunan infrastruktur dengan Rencana Tata Ruang Wilayah. Belanja infrastruktur yang tidak optimal hanya akan menjadi beban mubazir bagi keuangan negara, karena setiap pembangunan infrastruktur diperlukan anggaran untuk pemeliharannya. Ditambah lagi berdasarkan nota RAPBN 2022, risiko fiskal yang berpotensi memberikan dampak kepada APBN adalah program percepatan infrastruktur (penuugasan BUMN) yang berpotensi memengaruhi besarnya kewajiban kontigensi.

51. Fraksi PKS mendorong secara terus menerus agar kualitas dan kuantitas anggaran belanja kesehatan dapat dijaga kualitas dan kuantitasnya sesuai dengan amanat undang-undang kesehatan yaitu minimal 5 persen dari APBN. Pemerintah perlu memastikan agar belanja kesehatan mempertimbangkan value of money dan efektifitas dalam capaian kinerja output dan outcome termasuk seperti meningkatkan capaian jumlah orang sakit yang berkurang dan jumlah warga gaya hidup sehat yang bertambah. Pemerintah masih harus terus memperbaiki sistem jaminan kesehatan Nasional agar dapat berkelanjutan. Tiga kriteria penting untuk mengukur pemenuhan hak kesehatan adalah ketersediaan (availability), keterjangkauan (accessibility) dan mutu (quality). Pemerintah perlu memastikan pelaksanaan peningkatan kuantitas dan kualitas layanan dari Sistem JKN dalam APBN 2022. Fraksi PKS mencatat dalam RAPBN 2022 belanja fungsi kesehatan mengalami penurunan jika dibandingkan dengan outlook APBN 2021 sampai 22,9 persen. Penurunan ini perlu untuk menjadi perhatian serius dalam pembahasan selanjutnya.

52. Fraksi PKS mendesak Pemerintah agar insentif tenaga kesehatan tetap dilanjutkan dan Pemerintah dengan serius memperbaiki mekanisme pencairannya. Pencairan insentif tenaga kesehatan masih menjadi persoalan yang belum diselesaikan oleh Pemerintah. Menurut laporan di beberapa media bahwa masih banyak tenaga kesehatan yang berada di garda terdepan penanganan pandemi Covid-19 yang belum dan terkendala dalam menerima haknya. Fraksi PKS mendesak Pemerintah agar tenaga kesehatan yang telah beribaku di garda terdepan tidak disibukkan dengan urusan administratif seperti pengisian form yang telalu banyak dan menyibukkan, sehingga dapat mengalihkan perhatian tenaga kesehatan dari pasien kepada urusan administratif. Pemerintah selayaknya pada masa pandemi ini dapat memfasilitasi urusan administratif tersebut dengan sistem informasi yang integratif tanpa harus mengurangi kualitas dan kuantitas ketepatan sasaran insentif tersebut.

53. Fraksi PKS mendorong pemerintah untuk mendukung dan memfasilitasi UMKM agar naik kelas bahkan berdaya saing internasional. Fraksi PKS memperhatikan bahwa Pemerintah perlu untuk mendukung partisipasi UMKM dalam Ekonomi digital dan Pasar Internasional. Peran UMKM dalam Pasar Internasional diharapkan mampu meningkatkan ekspor langsung dan ekspor tidak langsung oleh UMKM. Mengingat, sektor UMKM memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Berdasarkan jumlah pelaku, serapan tenaga kerja, dan kontribusi terhadap PDB, maka UMKM tidak boleh dipandang sebelah mata. Pelaku UMKM yang mencapai 64,1 juta atau mencapai 99 persen dari jumlah pelaku usaha yang ada di Indonesia mampu menyerap tenaga kerja mencapai 116 juta. Kemudian, UMKM juga berkontribusi 58 persen terhadap PDB Indonesia. Namun nilai ekspor UMKM masih berada di angka 16 persen dari total ekspor menurut data Kemerkop (2019). Kebijakan untuk mendukung agar UMKM berdaya saing internasional salah satunya adalah dengan kemampuan akses UMKM melalui aplikasi dan internet, kemudian diikuti dukungan terhadap fasilitas pembiayaan atau permodalan.

54. Fraksi PKS mendorong pemerintah program ketahanan dan kedaulatan pangan dengan alokasi anggaran yang memadai. Hal ini sangat penting mengingat permasalahan ketersediaan, kecukupan, dan kenaikan harga-harga pangan selalu berimbas pada turunnya daya beli dan kesejahteraan rakyat secara luas. Fraksi PKS mendorong agar Pemerintah dapat mengoptimalkan sumberdaya lokal untuk memperkuat ketahanan pangan rumah tangga, khususnya di daerah rawan pangan. Pengembangan pangan lokal harus disinergikan dengan strategi yang tepat, dengan memanfaatkan seluruh potensi lokal untuk menggerakkan ekonomi masyarakat. Pemerintah perlu meneruskan pemberian insentif dan subsidi berusaha tani secara memadai, seperti subsidi benih, subsidi pupuk, asuransi pertanian, jaminan pembelian, dan lain-lain. Demikian juga program-program kesejahteraan dan perlindungan nelayan perlu ditingkatkan. Fraksi PKS juga berpendapat sebaiknya Pemerintah menjalankan amanah Undang Undang dengan membentuk Badan Pangan Nasional.

55. Fraksi PKS mendorong Pemerintah agar senantiasa mengalokasikan anggaran Pendidikan sebagaimana *mandatory spending* 20 persen dari APBN oleh amanat konstitusi secara efektif dan efisien. Dengan alokasi anggaran tersebut, Indonesia seharusnya mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusianya yang memiliki keunggulan komparatif dari sisi jumlah penduduk. Namun kenyataan yang terjadi kualitas sumber daya manusia Indonesia belum dapat bersaing secara optimal di wilayah dan global. Maka, alokasi dan realisasi belanja pendidikan oleh Pemerintah selama ini belum optimal keluaran (output) dan terlebih lagi hasilnya (outcome). Terlebih lagi selama masa pandemi covid-19, Pemerintah seperti tidak berdaya dan kebingungan mengatasi pelbagai masalah yang lahir dari kebijakan pembelajaran jarak jauh (PJJ). Disparitas digital antar daerah di Indonesia sangat tinggi. Sehingga angka putus sekolah bertambah, dan peserta pendidikan dari keluarga miskin tidak dapat mengikuti persekolahan karena tidak memiliki alat komunikasi internet. Kemudian diperparah juga dengan beberapa daerah di Indonesia yang tidak mendapatkan jaringan internet. Maka, pembangunan infrastruktur demi terselenggaranya pendidikan daring jarak jauh selama

pandemi Covid-19 adalah penting dan mendesak. Kemudian, Fraksi PKS mendesak Pemerintah untuk terus meningkatkan spending better belanja pendidikan agar ketimpangan akses pendidikan terutama menegah ke atas, ketersediaan sarana dan prasana yang belum merata, mismatch pendidikan vokasi dengan kebutuhan industri dapat segera terselesaikan. Fraksi PKS mencatat terjadi peningkatan anggaran pendidikan 6,1 persen dalam RAPBN 2022 jika dibandingkan dengan outlook APBN 2021.

56. Fraksi PKS mencermati bahwa terjadi penurunan Tunjangan Profesi Guru ASND dalam RAPBN 2022 jika dibandingkan dengan outlook APBN 2021 yaitu dari Rp55,3 triliun menjadi Rp52 triliun. Fraksi PKS mendesak jika penurunan ini mengakibatkan turunnya jumlah penerima yang berhak maka anggaran dalam APBN 2022 harus ditingkatkan. Sedangkan peningkatan jumlah alokasi Tambahan Penghasilan Guru ASND dari outlook 2021 Rp0,4 triliun menjadi Rp1,7 triliun, dan tunjangan Khusus Guru ASND di Daerah Khusus dari Rp1,2 triliun menjadi Rp1,7 triliun tidak hanya sekadar peningkatan alokasi anggaran, namun juga peningkatan Jumlah sasaran Guru yang berhak, baik PNS maupun swasta dan juga kontrak.

57. Fraksi PKS mengingatkan pemerintah bahwa subsidi adalah salah satu bentuk hadirnya negara dalam memenuhi kebutuhan rakyat dan menjaga daya beli masyarakat. Maka Fraksi PKS mendorong Pemerintah agar alokasi anggaran subsidi tidak berkurang untuk mencukupi jumlah penerima subsidi yang berhak. Fraksi PKS mencatat, Subsidi non energi RABPN 2022 mengalami penurunan menjadi Rp72,9 triliun yang sebelumnya Rp120,1 triliun berdasarkan outlook 2021. Turunya subsidi non energi disebabkan oleh Pajak DTP yang turun dari Rp32,4 triliun menjadi Rp12,7 triliun, bunga Kredit program dari Rp52,7 triliun menjadi Rp29,0 triliun, dan pupuk dari 29,1 triliun menjadi Rp25,3 triliun. Sedangkan, alokasi anggaran subsidi energi dalam RABPN 2021 mengalami peningkatan, namun perlu dipastikan juga jumlah rakyat penerima manfaat subsidi tidak berkurang. Fraksi PKS mendorong agar belanja subsidi lebih tepat sasaran dari subsidi berbasis komoditas menjadi subsidi berbasis penerima manfaat, penggunaan metode perhitungan subsidi

yang didukung dengan perbaikan basis data yang transparan, dan sistem penyaluran subsidi yang lebih akuntabel.

58. Fraksi PKS berpandangan agar daya beli rakyat menguat dan meringankan beban hidup rakyat, maka Pemerintah perlu menetapkan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Roda Dua adalah yang dikecualikan kewajiban pembayarannya sebagai Pajak Provinsi. Fraksi PKS berpandangan hal ini perlu untuk dilakukan agar masyarakat miskin dan rentan yang menggunakan kendaraan bermotor roda dua sebagai bagian dari alat mata pencaharian hidup tidak terbebani setiap tahun untuk mengurus dan membayar Pajak Kendaraan Bermotor roda dua, dan membayar kewajiban Bea Balik Nama Kendaraan bermotor roda dua. Hal ini perlu dilakukan sebagai insentif kepada masyarakat kecil dan berpenghasilan rendah yang pada umumnya menjadikan kendaraan bermotor roda dua sebagai bagian dari alat untuk mencari penghasilan hidup. Fraksi PKS berpandangan berkurangnya Pendapatan Asli Daerah dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Roda Dua, dan pungutan biaya STNK Motor tersebut dapat ditutup dengan bagi hasil pajak dari pemerintah Pusat terutama dari Pajak Pertambahan Nilai nantinya.

59. Kemudian, Fraksi PKS berpandangan agar Surat Izin Mengemudi (SIM) dapat berlaku seumur hidup. Pemberlakuan ini dilakukan agar masyarakat tidak terbebani setiap lima tahun sekali melakukan perpanjangan masa berlaku SIM, baik beban ekonomi maupun beban waktu dan tenaga. Hal ini juga sebagai insentif masyarakat kecil yang sebagian besar menjadikan motor sebagai bagian dari alat transportasi untuk mencari penghasilan. Pembaruan SIM setiap lima tahun sekali dapat merepotkan karena harus mengorbankan waktu produktif atau waktu mencari penghasilan untuk mengurus administrasi perpanjangan masa berlaku SIM. Dengan menghilangkannya kewajiban ini maka dapat mempunyai efek positif kepada penghematan waktu produktif masyarakat. Selain itu, dengan hanya membayar sekali saja pengurusan untuk mendapatkan SIM maka pembatasan ini dapat memberikan keringanan masyarakat. Namun, pemberlakuan ini dapat dievaluasi jika selama penggunaan SIM terjadi pelanggaran hukum lalu lintas berat atau yang

disamakan dengannya sehingga SIM dapat dicabut. Bagi pengendara yang SIM-nya dicabut dapat mengajukan kembali permohonan SIM baru dan menempuh ujian untuk mendapatkan SIM sebagaimana peraturan yang berlaku.

60. Selanjutnya, Fraksi PKS berpandangan agar Pemerintah membebaskan kewajiban pembayaran pajak bagi Wajib Pajak pribadi berpenghasilan sampai dengan Rp8 juta per bulan. Fraksi PKS berpandangan hal ini perlu dilakukan dengan tujuan untuk mengatasi rendahnya daya beli dan mengurangi beban kesulitan hidup yang mendera masyarakat kecil dan rentan. Selain itu ada beberapa pertimbangan yang Fraksi PKS berikan di antaranya adalah pertumbuhan ekonomi stagnan dan pelemahan daya beli masyarakat, kenaikan PTKP belum cukup mendorong daya beli masyarakat, besarnya jumlah kaum muda berpenghasilan menengah ke bawah yang rentan jatuh ke jurang kemiskinan, dibutuhkan stimulus fiskal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Program ini tidak akan membebani APBN secara signifikan, mengurangi beban perusahaan dan mendorong penciptaan lapangan kerja. Fraksi PKS berpandangan bahwa meskipun kebijakan ini akan berdampak pada penurunan penerimaan Pph, namun di sisi lain ini merupakan potensi daya beli yang dapat meningkatkan kontribusi konsumsi rumah tangga terhadap pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, potensi kehilangan penerimaan Pph tersebut sangat mungkin dikompensasi oleh peningkatan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas konsumsi masyarakat yang menguat serta transaksi ekonomi yang meningkat. Selain itu, kehilangan potensi penerimaan Pph tersebut dapat pula ditutup dengan program-program ekstensifikasi dan intensifikasi pengenaan pajak yang perlu terus dimaksimalkan oleh Direktorat Jenderal Pajak tanpa memberatkan masyarakat.

61. Terkait dengan alokasi anggaran untuk fungsi Pertahanan dalam RAPPN 2022 sebesar Rp134,1 triliun atau mengalami peningkatan dibanding outlook 2021 menjadi Rp120,2 triliun dan mengalami penurunan jika dibandingkan dengan realisasi APBN 2020 yaitu Rp136,9 triliun. Fraksi PKS menilai hal ini perlu dikaji lebih dalam pembahasan di DPR, mengingat pentingnya kekuatan

pertahanan dengan melanjutkan pemenuhan kekuatan dasar. Fraksi PKS juga memandang bahwa alokasi anggaran pertahanan harus berdampak langsung secara positif terutama terhadap kesejahteraan prajurit, industri pertahanan dan alutsista dalam negeri. Fraksi PKS juga mendorong agar kesejahteraan para prajurit TNI juga dapat ditingkatkan terutama yang menjalankan pengabdian di daerah terpencil dan perbatasan-perbatasan negara. Anggaran Belanja fungsi pertahanan harus berkelanjutan agar jelas capaian output dan outcome yang dicapai pada setiap tahun. Alokasi anggaran pertahanan harus berdampak langsung terutama terhadap kesejahteraan prajurit, industri pertahanan dan alutsista dalam negeri. Fraksi PKS juga mengingatkan bahwa anggaran belanja fungsi pertahanan ini dapat dijaga tata kelolanya dan dipastikan tidak mengalami korupsi karena merupakan belanja yang vital bagi kelangsungan negara.

62. Fraksi PKS menekankan akan pentingnya perlindungan tenaga kerja Indonesia oleh Pemerintah. Di tengah pandemi Covid-19, Pemerintah tetap perlu menjalankan fungsi perlingkungannya terhadap para pahlawan devisa Indonesia di luar negeri. Fraksi PKS memandang bahwa ketimpangan jumlah penduduk yang mencapai ratusan juta jiwa terhadap ketersediaan lapangan pekerjaan menimbulkan beragam masalah ketenagakerjaan di Indonesia yang perlu diberikan solusi dan penanganan oleh Pemerintah. Fraksi PKS juga mendesak Pemerintah agar jangan sampai salah dalam menganalisa akar masalah hanya untuk alasan mendongkrak investasi besar luar negeri, pemerintah seakan-akan tidak memberikan perlindungan kepada tenaga kerjanya dari bangsanya sendiri.

63. Fraksi PKS mendesak agar Pemerintah dapat menekan jumlah utang negara. Jumlah utang yang meningkat mengakibatkan pembayaran bunga utang yang juga terus meningkat. Dalam Anggaran Pembayaran Bunga Utang RAPBN 2022 meningkat menjadi Rp405,9 triliun yang sebelumnya outlook APBN 2021 sebesar Rp366,2 triliun. Fraksi PKS menyoroti terkait dengan meningkatnya pembayaran bunga utang dalam negeri dalam RAPBN 2020 sebesar Rp393,7 triliun, berdasarkan outlook 2021 Rp348,1 triliun. Meningkatnya bunga pembayaran utang dalam negeri walau tidak berisiko terhadap gangguan

kedaulatan negara, namun dapat memberikan indikasi mahalanya sumber pembiayaan (*cost of debt*) dari dalam negeri jika dibandingkan dengan sumber pembiayaan dari luar negeri. Peningkatan jumlah Utang dan Bunga Utang mengakibatkan celah fiskal APBN semakin menyempit, setelah memenuhi *mandatory spending* yang diamanatkan oleh konstitusi. Fraksi PKS mendorong Pemerintah untuk dapat menjalankan manajemen Defisit yang baik sehingga APBN khususnya utang negara dan pembayaran bunga utang dapat optimal dan *value of money*.

Transfer Ke Daerah & Dana Desa

64. Fraksi PKS memandang penting untuk mengingatkan arah Kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) tahun 2022 dalam pembahasan RAPBN secara umum yakni untuk pemulihan ekonomi, peningkatan kualitas pelaksanaan dan pengawasan guna mendukung peningkatan kinerja daerah. Beberapa hal mendasar yang harus diperhatikan dalam pembahasan TKDD. Pertama, TKDD harus konsisten dan terkendali dengan memperhatikan arah kebijakan, detail perencanaan yang sudah ditetapkan dan mempertimbangkan skala prioritas. Kedua, kebijakan TKDD tahun 2022 harus tetap fokus pada perbaikan kualitas penggunaan, penguatan sinergi penganggaran dengan memperhatikan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Ketiga, peningkatan kualitas infrastruktur publik, pengembangan potensi, pemulihan ekonomi, dan pembangunan SDM di daerah harus mampu mendorong peningkatan capaian output dan outcome serta mendukung perbaikan kualitas layanan. Keempat, permasalahan keakuratan data, pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, pengangguran, ketimpangan fiskal antardaerah, kemiskinan, pengangguran, pemerataan teknologi informasi harus mendapat perhatian khusus dalam alokasi TKDD. Kelima, sesuai amanat Undang-Undang Desa telah menempatkan Desa sebagai ujung tombak pembangunan dan diberikan kewenangan serta sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimilikinya guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

65. Anggaran TKDD pada RAPBN tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp770,4 triliun. Anggaran ini kembali menunjukkan tren menurun dibandingkan dengan APBN 2021 yakni sebesar Rp795,5 triliun. Dengan anggaran sebesar Rp770,4 triliun yang direncanakan tahun 2022, maka kembali terjadi penurunan alokasi karena tren TKDD selalu meningkat. Dari Rp766,2 triliun (2018), Rp826,77 triliun (2019), Rp856,94 triliun (2020). Meskipun memang pernah terjadi pemangkasan terhadap anggaran TKDD di tahun 2020 berdasarkan Perpres Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 menjadi sebesar Rp763,93 triliun. Rincian TKDD pada RAPBN tahun anggaran 2022 terdiri dari Transfer Ke Daerah sebesar Rp702,4 triliun dan Dana Desa sebesar Rp68 triliun. Transfer ke Daerah terdiri dari Dana Perimbangan yang direncanakan sebesar Rp673,7 triliun. Dana Perimbangan terdiri atas Dana Transfer Umum dan Dana Transfer Khusus masing-masing sebesar Rp483,3 triliun dan Rp190,4 triliun. Dana Insentif Daerah (DID) direncanakan Rp7,0 triliun yang terdiri dari DID yang dialokasikan untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya sebesar Rp4,2 triliun dan DID yang dialokasikan untuk penghargaan kinerja tahun berjalan sebesar Rp2,8 triliun. DID ini mengalami penurunan drastis dari sebelumnya Rp13,2 triliun pada outlook 2021. Sedangkan Dana Otsus dan Keistimewaan DIY direncanakan sebesar Rp21,8 triliun. Fraksi PKS memandang tren penurunan TKDD harus kembali diperhatikan sebagai catatan dalam pembahasan RAPBN tahun anggaran 2022 oleh Pemerintah bersama DPR.
66. Fraksi PKS mengingatkan pemenuhan mandatory spending khususnya pendidikan sebesar 20% sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4), alokasi anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) minimal sebesar 26% dari penerimaan dalam negeri neto, alokasi anggaran Dana Bagi Hasil (DBH), alokasi anggaran kesehatan sebesar 5% dari APBN dan juga alokasi otonomi khusus. Harus diperhatikan penekanan beberapa pos belanja lewat Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dalam RAPBN 2022 yakni anggaran kesehatan sebesar Rp67,73 triliun, pendidikan sebesar Rp290,5 triliun atau mencapai 53,6 persen dari total anggaran pendidikan tahun 2022. Berikutnya adalah pagu

DAU yang dalam RAPBN tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp378 triliun dan DBH Rp105,3 triliun dimana dalam perhitungan pagu DAU tahun 2022, PDN neto dihitung berdasarkan penjumlahan antara Penerimaan Perpajakan dan PNPB, dikurangi dengan pendapatan negara yang earmarked dan total Transfer ke Daerah dan Dana Desa selain DAU.

67. Fraksi PKS mengingatkan pentingnya penekanan alokasi anggaran Pendidikan melalui TKDD dalam RAPBN tahun anggaran 2022 yang direncanakan mencapai 53,6 persen dari total anggaran pendidikan tahun 2022 atau sebesar Rp290,5 triliun. Besarnya porsi anggaran pendidikan di TKDD tersebar dalam beberapa komponen yakni Dana Transfer Umum (yang terdiri dari DAU dan DBH) yang diperkirakan untuk bidang pendidikan, Dana Transfer Khusus (DAK Fisik dan DAK Nonfisik bidang Pendidikan), Dana Insentif Daerah yang diperkirakan untuk pendidikan, dan Dana Otonomi Khusus yang diperkirakan untuk bidang Pendidikan. Fraksi PKS kembali menggaris bawahi kalimat "diperkirakan untuk bidang pendidikan" sebagai catatan dalam pembahasan RAPBN tahun anggaran 2022.

68. Fraksi PKS memberikan beberapa catatan atas kenaikan alokasi anggaran Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan untuk mendukung pelaksanaan otonomi khusus di Provinsi Aceh, Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, serta pelaksanaan keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar Rp21,8 triliun yang naik dari outlook tahun 2021 sebesar Rp20,8 triliun. Berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, terdapat beberapa perubahan pengaturan terkait dengan kebijakan Dana Otsus dan DTI bagi Papua, sehingga kebijakan Dana Otsus dan DTI bagi Papua tahun 2022 salah satunya adalah perpanjangan pengalokasian Dana Otsus Papua sampai dengan tahun 2041 dengan peningkatan persentase menjadi sebesar 2,25 persen dari DAU. Catatan pertama, Dana Otsus merupakan salah satu alokasi (transfer) fiskal dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah dalam rangka penyediaan dukungan untuk menjalankan kewenangan sebagaimana yang diatur dalam UU Otsus Papua. Maka Dana Otsus tersebut harus mampu memberikan dampak positif termasuk

menstimulus perekonomian yang signifikan pada Orang Asli Papua (OAP). Kedua, kenaikan Dana Otsus ini harus diimbangi dengan peningkatan tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas. Ketiga, perbaikan kualitas sumber daya manusia aparatur birokrasi, baik di level provinsi maupun kabupaten dan kota untuk memanfaatkan Dana Otsus secara optimal. Keempat, alokasi Dana Otsus per sektor harus dilakukan dengan tepat dan akurat khususnya sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan, pembangunan infrastruktur, perencanaan dan monitoring evaluasi, bantuan afirmasi serta program prioritas. Kelima, pemberian "punishment" atas hasil evaluasi bagi daerah yang dianggap gagal mencapai target sasaran sebagai pelajaran penting karena Dana Otsus pada dasarnya dana rakyat yang harus digunakan untuk kepentingan rakyat Papua.

69. Fraksi PKS mengingatkan bahwa Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari APBN dan diperuntukkan bagi desa untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa. Sesuai amanat Pasal 72 ayat (1) huruf b UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, anggaran Dana Desa dialokasikan dengan mengefektifkan program berbasis desa secara merata dan berkeadilan. Dana Desa dialokasikan dengan tujuan agar desa mempunyai sumber pendapatan yang memadai untuk mendanai kewenangan yang diberikan kepada desa. Dana Desa bagi sebagian desa yang masuk dalam kategori minus merupakan sumber pembiayaan andalan dan menempati porsi terbesar dari total pendapatan desa pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Untuk itu, Fraksi PKS menekankan bahwa kualitas Dana Desa dipengaruhi oleh penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia, baik aparatur pemerintah desa, masyarakat maupun tenaga pendampingan desa.

70. Fraksi PKS berpandangan bahwa satu bentuk *quality contro/* terhadap TKDD adalah dengan memperbaiki koordinasi antara pusat dan daerah. Hal ini sangat penting untuk memastikan anggaran yang berkualitas, menghindari lambatnya penyerapan anggaran sampai dengan ketepatan pelaporan. Kondisi pandemi Covid-19 yang masih belum selesai menuntut keputusan

keuangan yang cepat dan tepat dengan mengedepankan prioritas, transparansi, akuntabilitas dan adanya penegakan hukum untuk terwujudnya tata kelola keuangan yang baik.

Defisit dan Pembiayaan

71. Fraksi PKS memandang Pemerintah dalam menetapkan defisit APBN 2022 sebesar Rp868,02 triliun atau 4,85 persen masih terlalu lebar. Rencana defisit yang tinggi menggambarkan tidak adanya optimisme pemerintah dalam menargetkan pendapatan negara. Sementara anggaran belanja dengan kebijakan *refocussing*, masih memberikan celah adanya ketidakefisienan. Angka defisit pada 2022 semestinya dapat lebih ditekan dengan mempertimbangkan bahwa pada 2023 Pemerintah wajib kembali tunduk kepada Undang-Undang Keuangan Negara terkait angka tiga persen sebagai batas maksimal defisit anggaran. Lebih lanjut, defisit membawa risiko bawahan berupa bertambahnya utang Pemerintah untuk memenuhi anggaran belanja yang kian meningkat pada situasi pendapatan yang makin terpuruk.
72. Fraksi PKS memberi peringatan kepada Pemerintah untuk tidak memanfaatkan keleluasaan relaksasi defisit anggaran yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 2020 dengan tidak memerhatikan risiko jangka panjang. Angka defisit sebesar 4,85 persen dalam RUU APBN 2022 merupakan rentang terdalam defisit dalam kesepakatan pada saat pembahasan KEM PPKF 2022. Kemudian jika melihat situasi pandemi saat ini, yang penuh dengan ketidakpastian dan adanya payung hukum kelonggaran defisit, maka tidak menutup kemungkinan bahwa angka defisit anggaran dapat lebih lebar. Fraksi PKS mengingatkan bahwa defisit membawa serta dampak negatif berupa pembiayaan utang. Oleh karena itu, Pemerintah tidak boleh memanfaatkan keleluasaan defisit anggaran tanpa mempertimbangkan beban bunga utang yang harus ditanggung APBN dalam jangka panjang dan tidak memperhitungkan dengan cermat tingkat produktivitas setiap Rupiah yang dikeluarkan.
73. Fraksi PKS berpendangan estimasi tambahan pembiayaan utang sebesar Rp973,6 triliun pada TA 2022 belum menggambarkan komitmen Pemerintah

dalam menekan jumlah utang. Sebagai catatan, posisi utang Pemerintah sampai dengan akhir Juni 2021 mencapai Rp6.554,56 triliun atau 42,35 persen terhadap PDB, serta *outlook* tambahan utang pada akhir tahun 2021 sebesar Rp1.027 triliun. Kemudian dengan anggaran pembiayaan utang TA 2022 tersebut, akan memosisikan utang Pemerintah pada angka 44,28 persen terhadap PDB. Pada 2014 jumlah akumulasi utang pemerintah sebesar Rp 2.608 triliun dengan rasio utang terhadap PDB sebesar 24,7 persen. Dengan demikian, dalam rentang 8 tahun akumulasi utang bertambah lebih dari dua kali lipat. Meningkatnya total utang juga berdampak pada rasio pembayaran utang terhadap pendapatan atau *debt to service ratio* (DSR) yang juga tercatat meningkat.

74. Fraksi PKS mengingatkan Pemerintah tentang dampak negatif terus melonjaknya utang terhadap kesinambungan fiskal. Porsi belanja beban utang bunga dibanding lurus dengan terus meningkatnya jumlah utang Pemerintah. Meningkatnya *debt to service ratio* (DSR) artinya bahwa penambahan pembiayaan utang pemerintah pada tahun berjalan sebagian besar alokasinya digunakan untuk pembayaran pokok dan beban bunga utang. Dinyatakan bahwa anggaran pembayaran bunga utang meningkat menjadi Rp405,9 triliun pada 2022, peningkatan tersebut secara langsung mengurangi fleksibilitas belanja fiskal pada yang dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat, seperti anggaran pendidikan dan kesehatan.

75. Porsi utang yang sebagian besar berbentuk surat berharga sangat rentan dengan tingkat suku bunga, baik domestik maupun global. Di mana beban bunga utang yang harus dibayarkan mengacu pada kedua suku bunga tersebut. Pemerintah perlu ekstra waspada dengan adanya percepatan pemulihan ekonomi Amerika Serikat yang dapat memengaruhi penetapan suku bunga pada 2022. Apabila hal ini terjadi, maka estimasi beban bunga utang akan mengalami perubahan.

76. Fraksi PKS mendesak Pemerintah segera memperbaiki defisit keseimbangan primer menjadi surplus kembali dalam jangka waktu menengah. Proyeksi APBN 2022 level keseimbangan primer pada negatif Rp462,15 triliun atau 2,65 persen terhadap dinilai masih sangat tinggi. Hal ini berarti

kesinambungan fiskal masih menjadi 'pekerjaan rumah' bagi Pemerintah, di mana jumlah pendapatan negara masih jauh dari kata cukup untuk memenuhi kebutuhan belanjanya. Beban bunga utang dibayar menggunakan penerbitan utang baru dengan biaya yang tidak murah.

77. Fraksi PKS menegaskan Pemerintah harus mengkaji secara mendalam tentang anggaran pembiayaan investasi dengan didasarkan pada evaluasi, prioritas serta memperhatikan keuangan negara. Tercatat bahwa pembiayaan investasi 2022 dianggarkan sebesar Rp182,32 triliun dengan hampir 50 persen (Rp86,4 triliun) digunakan untuk kebutuhan infrastruktur. Antara lain adalah PMN kepada PT PII, PMN kepada Perum Perumnas dan investasi kepada Badan Layanan Umum Lembaga ManajFemen Aset Negara (BLU LMAN). Investasi dalam bidang infrastruktur di tengah pandemi hanya akan mencederai rakyat, karena terlihat bagaimana Pemerintah mengutamakan proyek-proyek ambisius dibanding dengan keselamatan dan kesejahteraan rakyatnya sendiri.

78. Berkaca dari APBN 2021, dimana *outlook* penambahan dana investasi kepada BUMN mencapai lebih dari 100 persen realisasi dana investasi BUMN 2020. Fraksi PKS menilai sejumlah investasi dalam bentuk PMN tidak memerhatikan kemampuan keuangan negara. Di saat pandemi, di mana kebutuhan keuangan seharusnya dioptimalkan untuk penanganan krisis kesehatan dan pemulihan ekonomi, ironinya Pemerintah justru sibuk melakukan penyelamatan BUMN yang bermasalah yang terindikasi karena korupsi, *moral hazard*, buruknya *corporate governance* dan manajemen internal. Dana APBN semestinya diprioritaskan untuk penanganan dampak pandemi dan percepatan pemulihan ekonomi nasional.

79. Fraksi PKS mendesak Pemerintah agar dapat semaksimal mungkin menekan timbulnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) pada akhir tahun 2022. Pemerintah nampaknya belum memberikan konsentrasi terhadap dampak negatif adanya SILPA setiap tahun anggaran. Terbukti tren kenaikan SILPA dari tahun 2014 sampai 2019 tidak dapat dihindari. Jumlah SILPA diperparah ketika memasuki masa pandemi dimana pada 2020 mencapai Rp245,59 triliun dan per April 2021 tercatat sebesar Rp254,19 triliun. Dalam laporan hasil pemeriksaan BPK Saldo Anggaran Lebih (SAL) 2020 sebesar Rp388,12 triliun.

Oleh karena itu, Fraksi PKS menyerukan bahwa Pemerintah wajib melakukan perbaikan perencanaan keuangan dan program serta pengelolaan utang yang lebih bersifat produktif.

Hadirin yang Kami Muliaikan,

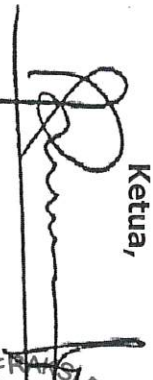
Demikian pandangan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI terkait Keterangan Pemerintah mengenai Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2022 beserta Nota Keuangannya agar dapat menjadi perhatian dan dapat ditindaklanjuti dalam pembahasan selanjutnya. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wallahul Muwafiq Ila Aqawamith Thorig, Billahi Taufiq wal Hidayah,
Wassalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, 10 Muharram 1443 H
19 Agustus 2021 M

**PIMPINAN
FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

Ketua,



DR. H. Jazuli Juwaini, MA.
A-449

Sekretaris,

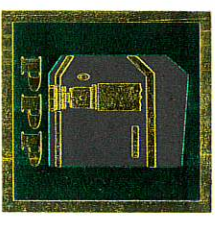


H. Ledia Hanifa, A.Si. M.Psi. T.
A-427





DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
GEDUNG NUSANTARA I, DPR/MPR-RI, JL JEND. GATOT SUBROTO, JAKARTA 10270
Telp. (021) 575 5531 - 575 5497 - 575 5498 - 575 5487 - Fax. (021) 575 5532
E-mail : fraksi_ppp@ DPR.go.id / fppp_dpr_r@yahoo.com / sel_fppp@ DPR.go.id



PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TERHADAP
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2022 BESERTA NOTA KEUANGANNYA

Disampaikan pada Rapat Paripurna DPR-RI, Kamis, 19 Agustus 2021

Oleh Juru bicara FPPP DPR-RI : Sy. Anas Thahir

Anggota DPR-RI Nomor : A-470

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alikum Wr. Wb.

Yang terhormat Saudara Pimpinan Sidang,
Yang kami hormati Saudara Menteri Keuangan RI dan jajarannya,
Yang kami hormati Saudara Anggota Dewan dan Hadirin yang berbahagia.

Pertama-tama saya mengajjak kepada hadirin sekalian untuk memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya kita dapat hadir dalam rapat yang mulia ini dalam keadaan sehat wal'afiat, untuk menjalankan tugas konstitusional kita membahas Rancangan Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 beserta Nota Keuangannya,

Tak lupa saya mengajjak kepada seluruh hadirin untuk menyampaikan shalawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, keluarganya, dan para sahabatnya, yang telah menjadi suri tauladan terbaik sehingga kita dapat mengikuti jejaknya hingga akhir zaman...amiin

Pimpinan Sidang dan Hadirin Yang Kami Hormati,

Bulan ini, Agustus 2021 bangsa Indonesia memperingati kemerdekaannya yang ke 76, dengan suasana penuh keharuan sekaligus keprihatinan akibat pandemi Covid-19 yang sudah berlangsung selama satu tahun. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (Fraksi PPP) mengucapkan, "Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke 76 tahun", semoga pencapaian tahun ini dan yang akan datang semakin meningkatkan semangat juang bangsa Indonesia dalam mewujudkan cita cita luhur yang telah diwariskan para pendahulu kita, sekaligus memantapkan diri mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana menjadi amanat konstitusi.

Pimpinan Sidang dan Hadirin Yang Kami Hormati

Makro Ekonomi

1. Pada tanggal 16 Agustus lalu, Presiden Jokowi telah menyampaikan RAPPB 2022 dan Nota Keuangannya di hadapan Sidang Paripurna DPR RI. Dalam penyampaian Nota Keuangan dan RAPPB 2022, Pemerintah telah menyusun asumsi makro ekonomi 2022 sebagai berikut: pertumbuhan ekonomi sebesar 5,0%-5,5%, inflasi sebesar 3,0%, suku bunga SUN 10 tahun sebesar 6,82%, nilai tukar rupiah Rp14.350 per dolar AS, harga minyak mentah US\$63 per barel, lifting minyak sebesar 703 ribu per hari dan lifting gas sebesar 1.036 ribu barel setara minyak per hari. Sementara defisit anggaran ditetapkan sebesar 5,5%.
2. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan menilai target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,0%-5,5% termasuk optimis tetapi insya Allah bisa tercapai, meski ekonomi tahun depan masih dalam masa konsolidasi akibat Pandemi Covid-19. Berkaca pada ekonomi kita saat ini, pertumbuhan ekonomi kuartal II-2021 sudah masuk zona positif dengan tumbuh 7,07% meskipun baseline pertumbuhan ekonomi tahun ini masih lebih rendah dari prakiraan sebelumnya. Fraksi PPP menilai pertumbuhan ekonomi tahun 2022 harus lebih tinggi dari tahun ini yang didorong oleh membaiknya peningkatan mobilitas masyarakat yang ditopang juga oleh semakin baiknya penanganan Covid-19. Melonggarnya restriksi akan mendorong kenaikan aktivitas ekonomi sekaligus diikuti oleh asumsi bahwa vaksinasi sudah terdistribusi merata ke sebagian besar daerah di Indonesia sehingga *herd immunity* sudah merata di banyak daerah. Sementara dari sisi pertumbuhan investasi tahun 2022 diperkirakan bertumbuh positif sejalan dengan mulai berdamainya pelonggaran-pelonggaran birokrasi melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang sudah dibuatkan aturan turunannya di tahun ini. Dengan kondisi tingkat konsumsi masyarakat yang menurun, kita berharap investasi membaik sehingga menopang target pertumbuhan ekonomi tahun depan. Lebih dari itu, Fraksi PPP juga berharap pemerintah bisa mendorong efisiensi investasi sehingga memberikan nilai tambah yang kuat terhadap daya saing perekonomian. Rasio Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia masih cukup tinggi yakni dalam kisaran level 6,3. Rasio Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia yang tinggi menunjukkan tingkat efisiensi yang masih rendah. ICOR Indonesia lebih tinggi dibandingkan semua negara di Asean dan ICOR yang tinggi tersebut membuat investasi di Indonesia melambat. Fraksi PPP meminta pemerintah untuk mendorong semua level kepala daerah memiliki visi yang sama bagaimana bisa menarik minat investasi sekaligus bagaimana mendorong agar investasi di daerahnya lebih efisien.
3. Dalam kerangka memacu pertumbuhan ekonomi tahun depan, Fraksi PPP juga meminta pemerintah mempercepat penanganan tingkat kasus Covid-19, melonggarkan pengelatan aktivitas ekonomi dan segera meningkatkan angka vaksinasi. Pemerintah juga harus segera memulihkan sektor-sektor ekonomi terutama UKM yang berkontribusi positif dan menjadi tumpuan hidup masyarakat serta menyerap banyak tenaga kerja. Kehidupan rakyat sekarang semakin sulit, PHK terus meningkat, pendapatan menurun dan keresahan masyarakat meningkat yang dikhawatirkan akan mendorong peningkatan tingkat kejahatan.
4. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan memberikan catatan terhadap target inflasi sebesar 3% yang sangat penting untuk bisa dijaga agar momentum daya beli masyarakat tidak semakin menurun di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang sudah tertekan akibat pandemi. Tingkat inflasi harus lebih rendah dari target pertumbuhan

- ekonomi dengan harapan tingkat daya beli tidak semakin tergerus yang dikhawatirkan bisa menambah jumlah penduduk miskin.
5. Target nilai tukar rupiah di posisi Rp14.350 per dolar AS cukup realistis untuk menopang ekspor, menahan laju inflasi dan naiknya impor. Namun kewaspadaan penuh terhadap kestabilan nilai tukar harus diarahkan pada kemungkinan normalisasi kebijakan The Fed dalam melakukan pengurangan stimulus atau *tapering off* dan perkembangan geo politik yang memungkinkan terjadinya risk off dimana dana-dana di negara berkembang termasuk negara kita ada tekanan lari ke luar. Fraksi PPP juga mendorong pemerintah terus meningkatkan basis investor domestik atas kepemilikan SBN agar nilai tukar rupiah tidak mudah goncang ketika terjadi aliran modal asing keluar (*capital outflow*) lantaran basis investor domestik meningkat. Meski demikian, untuk target suku bunga SUN 10 tahun, yakni 6,82 persen menurut Fraksi PPP angka tersebut masih bisa ditekan karena ada kecenderungan trend suku bunga rendah baik di negara maju dan juga banyak negara lainnya.
 6. Terkait dengan harga minyak mentah Indonesia (ICP) yang diperkirakan akan berkisar pada US\$63 per barel dan lifting minyak dan gas bumi diperkirakan masing-masing mencapai 703 ribu barel dan 1.036 ribu barel setara minyak per hari cukup realistis, meski Fraksi PPP berharap pemerintah terus berupaya agar lifting minyak bisa terus ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan kilang minyak dalam negeri dan menekan impor BBM. Target *lifting* minyak Indonesia tergolong cukup rendah. Meski begitu, realisasi *lifting* minyak rata-rata tercatat meleset dari target yang dipatok dalam asumsi makro pada anggaran pendapatan belanja negara (APBN). Maka, tak heran jika Indonesia dikatakan termasuk negara penghasil minyak yang tidak bisa menikmati dampak kenaikan harga minyak mentah dunia. Bahkan, gejala harga minyak dunia cenderung membuat pemerintah khawatir. Sebab, konsumsi minyak dan energi yang tinggi, tidak mampu dipenuhi dengan kemampuan dalam negeri dan bergantung pada impor dari negara lain

Pimpinan Sidang dan Hadirin Yang Kami Hormati,

Penerimaan Negara

1. Terkait dengan penerimaan negara, pemerintah mematok pendapatan negara dalam RAPBN 2022 senilai Rp1.840,7 triliun, belanja negara sebesar 2.708,7 triliun dan defisit anggaran sebesar Rp 868 triliun atau 4,85 persen dari PDB. Pada sisi penerimaan negara, target setoran perpajakan sebesar Rp1.506,9 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp333,2 triliun.
2. Terkait dengan penerimaan negara dari sektor perpajakan, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan memberikan catatan sebagai berikut.
Pertama, selama satu dekade sejak 2010-2020 penerimaan pajak selalu meleset dari target. Pemerintah mencatat hingga akhir tahun 2020, realisasi penerimaan pajak tercatat hanya sebesar Rp 1.069,98 triliun. Angka itu meleset dari target yang ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan sebesar Rp 1.198,82 triliun. Tahun ini penerimaan perpajakan juga diperkirakan akan meleset karena pandemic covid 19 yang mengakibatkan kondisi ekonomi berkontraksi. Dengan kondisi tersebut, Fraksi PPP menilai pemerintah belum bekerja optimal dalam mengupayakan peningkatan penerimaan dari sektor perpajakan.
Kedua, pemerintah harus berfokus pada bagaimana cara mengoptimalisasi penerimaan pajak, baik dengan perluasan basis pajak (*tax base*) maupun dengan

meningkatkan kepatuhan dari wajib pajak, dengan menekan penghindaran pembayaran pajak (*tax avoidance*) dan penggelapan pajak (*tax evasion*).

Ketiga, peningkatan kepatuhan wajib pajak dengan meningkatkan pelayanan dan edukasi perpajakan. Termasuk bagaimana bisa mengembangkan model pengawasan yang terstruktur dan terukur serta melakukan reformasi perpajakan dalam hal organisasi, teknologi, dan basis data termasuk memaksimalkan pertukaran data perpajakan atau *Automatic Exchange of Information* (AEOI).

Keempat, tax ratio perpajakan kita masih bisa ditingkatkan mengarah ke angka ideal menurut standar internasional, yaitu 15% keatas. Tax ratio kita tahun 2020 hanya 8,94%. Tax ratio pernah mencapai 13,7% pada tahun 2014, tetapi selama pemerintahan Jokowi tidak mampu mempertahankan angka itu bahkan terus menurun dibawah 9 persen. Ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintah dalam perpajakan belum optimal.

3. Terkait dengan penerimaan negara bukan pajak pemerintah menargetkan Penerimaan sebesar Rp333,2 triliun. Tidak berbeda jauh dengan pengelolaan perpajakan, pengelolaan PNBp juga belum dikelola secara optimal sehingga kontribusinya terhadap anggaran negara juga kurang maksimal.

Ada penerimaan yang bisa dioptimalkan oleh pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara lebih maksimal seperti penerimaan dari sektor pertambangan. Ada potential lost dari pengelolaan pertambangan di Indonesia seperti dari sektor minerba terdapat triliunan dari penerimaan royalti dan iuran tetap yang sampai saat ini belum maksimal masuk ke kas negara dan berpotensi hilang. Selain itu, potensi penerimaan negara dari sektor perikanan juga belum tergarap secara optimal karena dalam pengelolaan PNBp dari sektor kelautan dan perikanan tarif PNBp yang sangat kecil dan juga maraknya kegiatan illegal fishing. Selain itu ada potensi penerimaan dari jenis pendapatan jasa yang bisa lebih diintensifikan, seperti pendapatan hak dan perizinan serta pendapatan jasa bandar udara, kepelabuhanan dan kenavigasian. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan meminta Pemerintah melakukan penyempurnaan proses bisnis pengelolaan PNBp terutama mekanisme pemungutan, perhitungan, penyeteroran dan sanksi dalam pengelolaan PNBp. PNBp yang dibayarkan oleh para wajib bayar harus bisa lebih akurat, transparan dan akuratabel. Pemerintah juga perlu mengkaji ulang tarif dari PNBp terutama penerimaan dari kegiatan usaha yang profit oriented seperti di bidang pertambangan, perikanan ataupun perizinan lainnya karena dibandingkan dengan besarnya profit yang diterima oleh para pelaku usaha, saat ini tarif PNBp dirasa masih kurang menguntungkan bagi negara. Pemerintah juga perlu menindak tegas banyaknya kegiatan ilegal dalam sektor usaha penyumbang PNBp seperti *illegal mining* dan *illegal fishing*.

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan berharap pertumbuhan positif yang dialami sektor informasi dan komunikasi selama pandemi Covid-19, dapat menjadi sumber PNBp yang lebih besar. Karena itu, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan juga mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan kenaikan PNBp dari laba BUMN PT Telekomunikasi Indonesia untuk tahun anggaran 2022 dapat mendukung kebijakan dan anggaran Kominfo untuk digitalisasi pendidikan secara merata. Peningkatan penerimaan negara tersebut untuk meningkatkan fasilitas sarana pembelajaran daring (online), khususnya bagi keluarga peserta didik yang kurang mampu dan berada di daerah yang memiliki akses rendah terhadap teknologi informasi, termasuk pesantren dan madrasah di daerah terpencil. Selain itu, pemerintah juga perlu mendukung sarana komunikasi dan informatika agar memperkuat pertumbuhan usaha ekonomi berskala mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi, termasuk melalui usaha daring yang tumbuh di masa pandemi Covid-19.

Pimpinan Sidang dan Hadirin Yang Kami Hormati,

Belanja Negara

1. Dalam RAPBN 2021 pemerintah mengalokasikan belanja negara sebesar 2.708,7 triliun meliputi, belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.938,3 triliun serta Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp770,4 triliun. Fraksi PPP menilai angka belanja negara tersebut cukup besar untuk mendorong stimulus ekonomi, tentu dengan catatan bahwa realisasi belanja negara tidak menghadapi kendala masalah penyerapan dan kebocoran anggaran karena permasalahan APBN dari tahun ke tahun ada di tataran realisasinya dan penyerapan dan tingkat korupsiya.
2. Terkait dengan sektor kesehatan, pemerintah mengalokasikan anggaran kesehatan sebesar Rp255,3 triliun, atau 9,4% dari belanja negara dan diarahkan untuk melanjutkan penanganan pandemi, reformasi sistem kesehatan, percepatan penurunan stunting, serta kesinambungan program JKN. Fraksi kami perlu menyampaikan kembali tentang sejumlah permasalahan terkait bidang kesehatan. Pemerintah perlu memberikan kepedulian dan penghargaan kepada tenaga kesehatan karena telah memberikan banyak pengorbanan dalam upaya mengatasi masalah pandemi covid 19 ini. Mereka menjadi ujung tombak dalam upaya mengatasi pandemic covid 19. Pemerintah juga kurang memiliki kepedulian terhadap tingginya biaya tes polymerase chain reaction(PCR) untuk diagnosis virus corona (Covid-19) dan baru diturunkan setelah memperoleh banyak kritik dari masyarakat. Pemerintah mempunyai wewenang untuk mengatur harga reagensia/tes PCR. Fraksi PPP juga mendorong perlunya perbaikan di internal BPJS dengan meningkatkan kepesertaan BPJS Kesehatan dengan melakukan penyisiran terhadap perusahaan-perusahaan atau pemberi kerja yang belum memberi fasilitas BPJS Kesehatan kepada karyawannya. Langkah ini diyakini akan meningkatkan kepesertaan masyarakat dan tentunya memberi dampak pendisiplinan dalam pembayaran iuran.
3. Berkaitan dengan Penanganan Pandemi Covid 19, Fraksi PPP memandang masih lemah dan belum komprehensif, baik dari sisi manajemen kepemimpinan penanganan pandemi, SDM, upaya kesiapsiagaan dan sarana prasarana, koordinasi dan komunikasi, penyiapan anggaran bahkan serapan anggaran yang disediakan, dll. Buruknya manajemen dan komunikasi penanganan pandemi yang dilakukan pemerintah menyebabkan kurangnya literasi masyarakat terkait produk obat-obatan selama terjadi pandemi. Akibatnya banyak peredaran dan klaim tentang manfaat obat-obatan covid 19 yang belum teruji klinis. Selain meresahkan masyarakat, klaim obat-obatan ini juga berpotensi membahayakan kesehatan. Lebih dari itu pemulihan ekonomi menjadi lebih lambat dan diperkirakan ekonomi Indonesia mengalami pemulihan paling lambat secara global.
4. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan menyoroti sektor energi, terutama terkait subsidi energi dalam RAPBN 2022, yang direncanakan sebesar Rp134 triliun terdiri atas subsidi BBM dan LPG tabung 3 kg sebesar Rp77,5 triliun, serta subsidi listrik sebanyak Rp56,47 triliun. Sejalan dengan kebijakan transformasi subsidi berbasis komoditas menjadi berbasis target sasaran, pemerintah perlu melakukan perbaikan data penerima sasaran untuk memastikan agar subsidi atau bantuan diberikan kepada kelompok masyarakat yang perlu dilindungi, yaitu masyarakat miskin dan rentan. Terkait dengan subsidi energi tersebut, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan tetap mengingatkan kepada pemerintah untuk meningkatkan kapasitas kilang nasional untuk memenuhi kebutuhan BBM nasional. Pembangunan kilang minyak akan mengurangi ketergantungan dengan impor BBM dan impor minyak mentah untuk diolah dikilang

minyak. Karena masalah utama saat ini Indonesia masih bergantung dengan impor BBM dan impor minyak mentah untuk memenuhi kebutuhan BBM dalam negeri. Sudah 25 tahun lebih Indonesia tidak membangun satu kilang pun. Pembangunan kilang terakhir adalah tahun 1995, dengan terbangunnya kilang Balongan yang berkapasitas 125 ribu barel per hari. Sejak 2011 Indonesia menghadapi defisit transaksi berjalan (CAD). Penyebab defisit tersebut adalah impor minyak yang besar. Keran impor minyak yang terbuka lebar membuat neraca migas Indonesia terus mencatatkan defisit. Pemerintah harus serius menangani masalah ini. Pasalnya lifting minyak terus mengalami penurunan sedangkan konsumsi BBM terus meningkat.

5. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan menilai anggaran untuk ketahanan pangan pada tahun 2022 direncanakan Rp76,9 triliun sangatlah penting. Krisis Kesehatan dan ekonomi yang terjadi saat ini jangan sampai diikuti dengan krisis pangan. Fraksi PPP juga meminta agar perwujudan ketahanan pangan tidak dilakukan dengan memperkuat impor pangan, tetapi dengan cara meningkatkan produktifitas keanekaragaman pangan dalam negeri. Pemerintah harus bisa menekan impor pangan terutama produk hortikultura dan melindungi kepentingan petani dalam negeri dari serbuan pangan impor. Petani dan nelayan yang merupakan bagian terbesar dari profesi di negara kita belum mampu menikmati kesejahteraan sehingga tidak banyak generasi muda yang tertarik untuk masuk dalam sektor ini.

6. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan memberikan perhatian terhadap anggaran Pendidikan dalam RAPBN 2022 yang memperoleh anggaran sebesar Rp541,7 triliun (termasuk TKDD) atau 20,0 persen dari belanja negara. Fraksi PPP sangat prihatin bahwa Pandemi Covid-19 menyebabkan kita mengubah beberapa kebijakan di dalam sektor pendidikan, seperti diadakannya kegiatan belajar mengajar tatap muka di sekolah dan pesantren, diadakannya pelaksanaan Ujian Nasional (UN) yang seharusnya menjadi UN terakhir dan juga proses PPDB dilaksanakan secara daring. Fraksi PPP menilai kegiatan proses belajar secara daring menjadi sesuatu yang baru dalam proses pembelajaran, tetapi dengan kondisi tidak meratanya sebagian daerah dan kemampuan anak didik terhadap koneksi internet dan kepemilikan perangkat teknologi yang membuat sebagian anak didik tidak mampu mengikuti kegiatan pembelajaran jarak jauh (PJJ) yang dijadikan pengganti kegiatan belajar mengajar tatap muka di sekolah.

7. Fraksi PPP juga memberikan perhatian kepada sekolah-sekolah dan pondok pesantren yang sumber pembiayaannya bergantung dari iuran bulanan orang tua siswa mengalami tantangan finansial yang berat selama pandemi ini. Kegiatan operasional sekolah-sekolah dan pesantren seperti ini, yaitu sekolah swasta dan pesantren berbiaya rendah, pada umumnya sangat bergantung pada iuran bulanan dari orang tua siswa selain menerima dana bantuan operasional sekolah (BOS) yang tidak terlalu menutupi biaya operasional sekolah. Menyadari hal itu, Fraksi PPP meminta kepada pemerintah, dimana saat ini dimulai tahun ajaran baru untuk dapat memberikan bantuan kuota internet khusus bagi anak-anak sekolah dan membantu sekolah-sekolah swasta dan pesantren berbiaya rendah, terutama terkait dengan gaji guru, Ustad dan staf sekolah selama masa pandemi. Fraksi PPP juga meminta kepada pemerintah agar guru honorer memperoleh subsidi atau bantuan sosial, mengingat honor mereka selama ini sangat rendah, kisaran Rp 300.000 - Rp 500.000 sebulan. Kondisi tersebut untuk mencegah kemungkinan terburuk yakni penutupan sekolah dan pesantren karena permasalahan keuangan, sementara sekolah-sekolah swasta dan pesantren berbiaya rendah sangat penting perannya dalam menyerap siswa baru, menyediakan akses pendidikan untuk siswa dan santri yang berasal dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi dan berkontribusi mencerdaskan anak bangsa.

8. Fraksi PPP meminta pemerintah untuk memastikan dan memaksimalkan bantuan operasional bagi pesantren terealisasi dan terdistribusi secara proporsional ke seluruh pesantren di Indonesia. (BOP) harus diberikan kepada pesantren dan pendidikan keagamaan Islam yang aktif menyelenggarakan kegiatan pembelajaran dan terdaftar di Kantor Kemenag. Fraksi PPP terus konsisten mendorong agar Bantuan Operasional Pesantren (BOP) ini tidak hanya diperuntukkan untuk membantu pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan Islam di masa pandemi Covid-19 ini saja, tetapi skema BOP ini harus terus berkelanjutan dan ditingkatkan sebagai salah satu upaya mendorong pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan Islam mendukung penyelenggaraan pendidikan secara lebih meningkat dan bermutu.

Pimpinan Sidang dan Hadirin Yang Kami Hormati,

Transfer Ke Daerah, Dana Desa (TKDD) dan Defisit Anggaran

TKDD diproyeksikan mencapai Rp770,4 triliun atau meningkat Rp141,3 miliar dibandingkan outlook tahun 2021, yang diarahkan untuk peningkatan pemulihan ekonomi dan peningkatan kualitas pelaksanaan guna mendukung peningkatan kinerja daerah. Fraksi PPP meminta pemerintah memanfaatkan Dana Desa sebagai salah satu instrumen yang efektif untuk memperbaiki kualitas dan pemerataan layanan publik antardesa, memajukan perekonomian desa, dan mengurangi kemiskinan pedesaan. Fraksi PPP mendorong pemerintah agar Dana Desa juga dimanfaatkan untuk mendukung kewirausahaan UMKM dan BUMDes. BUMDes harus inovatif dan beradaptasi melihat peluang usaha yang muncul saat pandemi agar kegiatan ekonomi di desa tetap bergairah. UMKM dan BUMDes adalah unit ekonomi paling dekat dengan rakyat sehingga perlu diberdayakan dan berperan efektif dalam pengentasan kemiskinan pedesaan.

Pimpinan Sidang dan Hadirin Yang Kami Hormati,

Defisit anggaran dan Utang

Dalam RAPBN 2022 defisit anggaran direncanakan sebesar Rp 868 triliun atau 4,85 persen dari PDB. Defisit anggaran negara kita tiap tahun terus membengkak akibat penerimaan negara yang dikontribusi dari perpajakan tidak pernah meningkat secara signifikan sementara belanja negara terus meningkat, terutama akibat pandemi covid 19. Dampak lebih lanjut adalah utang yang terus meningkat bahkan kenaikan utang melebihi kenaikan dari kemampuan kita mendorong penerimaan perpajakan. Fraksi PPP meminta penjelasan pemerintah terkait skenario penyelesaian utang, dibandingkan dengan kemampuan kita menghasilkan devisa dari ekspor, pariwisata dan jasa remitansi pegiriman tenaga kerja luar negeri.

Yang terhormat Saudara Pimpinan Sidang,

Yang kami hormati Saudara Menteri Keuangan RI dan jajarannya,

Yang kami hormati Saudara Anggota Dewan,

dan Hadirin yang berbahagia.

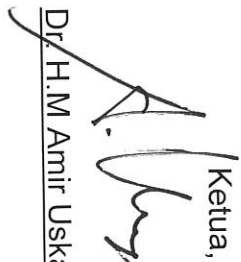
Demikianlah Tanggapan dan Pemandangan Umum Fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Hal-hal lain yang belum disampaikan dalam Pemandangan Umum ini akan disampaikan pada saat Pembahasan RUU APBN Tahun Anggaran 2022 beserta Nota Keuangannya selanjutnya.

Kepada saudara Pimpinan Sidang, Saudara Menteri Keuangan, Saudara-saudara Anggota Dewan, dan Hadirin sekalian diucapkan terimakasih atas perhatian dan kesabarannya mendengarkan Pemandangan Umum kami.

Wallahul Muwafik Ila Aqwarimith Thariq
Wasalamualikum Wr Wb.

Jakarta, 19 Agustus 2021
PIMPINAN

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
Ketua,



Dr. H.M. Amir Uskara, M. Kes.



Dr. H. Ach. Baidowi, S.Sos., M.Si



Sekretaris,